

KINERJA

JURNAL BISNIS DAN EKONOMI

**Pengaruh Stimuli Lingkungan dan Fasilitas Pembayaran
Terhadap Tingkat Emosi Konsumen**

Yasinta Soelasih

**Kinerja Fiskal Daerah:
Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Jaka Sriyana

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Laki-Laki dan Perempuan
dalam Kegiatan Ekonomi di Provinsi Aceh**

Abubakar Hamzah, Susanti, dan Sofyan Syahnur

**Corporate Governance dan Manajemen Laba:
Pengaruh Presiden Komisaris Independen dan Komite Audit Independen**

Surifah

**Analisis Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Faktor-Faktor Demografi Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Surakarta**

Amalia Kurniati dan Sotya Fevriera

**Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan terhadap Hubungan antara
Cash Flow Right Leverage dan Manajemen Laba: Oportunistik atau Efisien**

I Putu Sugiarta Sanjaya

Status Likuiditas Saham, Struktur Aset, dan Struktur Modal

Bambang Sutopo

FORMULIR BERLANGGANAN

Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :
..... Kode Pos :
Telepon/HP : Fax :
Nama Institusi :
Alamat Institus :
.....Kode Pos :
Telepon:ext..... Fax :

*Mohon dikirimkan Jurnal Kinerja rnulai Volume ...Nomor ...Tahun
Sampai Volume Nomor Tahun yang akan datang.
Adapun pembayaran kami lakukan di depan dengan cara:*

- TUNAI**
 TRANSFER BANK BNI46

Kantor Cabang UGM No. Rek. 0038711488

Pengiriman Jurnal dialamatkan ke **Alamat Tinggal/Alamat Institusi *)**

Rp 75.000 untuk2 Nomor

*) Coret yang tidak perlu

Untuk berlangganan silahkan isi lengkap formulis ini dan kirimkan ke rekdaksi KINERJA:

Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jalan Babarsari 43 - Yogyakarta 55281

Telpon (0274) 487711 est 2215/2316

Fax (0274) 485225

Email: kinerja@pasca.uajy.ac.id



KINERJA

JURNAL BISNIS DAN EKONOMI
TERAKREDITASI SK NO. 68a/DIKTI/Kep/2010

DAFTAR ISI

Daftar isi

Pengaruh Stimuli Lingkungan dan Fasilitas Pembayaran Terhadap Tingkat Emosi Konsumen <i>Yasintha Soelasih</i>	103-118
Kinerja Fiskal Daerah: Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta <i>Jaka Sriyana</i>	119-130
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Laki-Laki dan Perempuan dalam Kegiatan Ekonomi di Provinsi Aceh <i>Abubakar Hamzah, Susanti, dan Sofyan Syahnur</i>	131-144
Corporate Governance dan Manajemen Laba: Pengaruh Presiden Komisaris Independen dan Komite Audit Independen <i>Surifah</i>	145-159
Analisis Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Surakarta <i>Amalia Kurniati dan Sotya Fevriera</i>	160-174
Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan terhadap Hubungan antara Cash Flow Right Leverage dan Manajemen Laba: Oportunistik atau Efisien <i>I Putu Sugiarta Sanjaya</i>	175-185
Status Likuiditas Saham, Struktur Aset, dan Struktur Modal <i>Bambang Sutopo</i>	186-194
Pedoman Penulisan	
Indeks Artikel	

PENGARUH STIMULI LINGKUNGAN DAN FASILITAS PEMBAYARAN TERHADAP TINGKAT EMOSI KONSUMEN

Yasinta Soelasih

Unika Atma Jaya Jakarta

Email : yasinta.soelasih@atmajaya.ac.id

Abstract

The purpose of this research to see environment stimuli and payment facilities toward consumer emotion level with education moderating variable and married status that will influence impulse buying fashion product. Regression analysis is used to analyses data from 148 sample. The result shows that environment stimuli variable and consumer emotion level have effect toward impulse buying fashion product, but payment facilities has not effect to impulse buying fashion product. Education moderating variable and married status not strengthen between environment stimuli and consumer emotion level, as well as education and married status moderating variable not strengthen payment facilities and consumer emotion level.

Keywords : *environment stimuli, payment facilities, consumer emotion level, impulse buying, education, married status.*

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini semakin banyak tempat belanja modern yang didirikan. Hal ini terlihat di kota-kota besar dengan banyaknya tempat belanja modern, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan sebagainya. Tempat belanja modern tidak hanya didirikan di kota Propinsi saja tetapi di kota Madya bahkan di kota Kabupaten juga mulai didirikan. Semakin banyaknya tempat belanja modern didirikan akan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Sering terjadi pembelian tidak terencana (*Impulse buying*) timbul bila konsumen sedang berkunjung ditempat perbelanjaan modern. Produk yang sering dibeli tanpa perencanaan salah satunya adalah fashion. Menurut Park, 2006, *impulse buying* terjadi karena pengaruh dari produk seperti fashion, pengaruh *psychological* seperti *personality, self-regulation* (Rook and Fisher, 1995), pengaruh lingkungan seperti *store atmosphere* (Donovan and Rossiter, 1982). Ada tiga perspektif tradisional yang digunakan untuk menjelaskan tentang *impulse buying* (Iyer, 1989) yaitu: (1) karakteristik dari produk yang dibeli, (2) karakteristik dari konsumen, dan (3) karakteristik dari pajangan toko. Perspektif pertama dikemukakan oleh Kollat and Willett (1969, 1967), *impulse buying* berkurang untuk kebutuhan pokok roti, susu, telur, lalu untuk kebutuhan tidak pokok seperti vitamin, permen, desserts. Progressive Grocer (1968) melaporkan produk baru mempunyai frekuensi pembelian lebih tinggi untuk *impulse buying*. Perspektif kedua, karakteristik konsumen didasarkan pada demografi (Kollat and Willett, 1967), *personality traits* (Raju, 1980) dan *proclivity to visit stores* (Granbois, 1968) semua itu menunjukkan pengaruh didalam *impulse buying*. Perspektif ketiga yaitu pajangan toko merupakan faktor didalam *impulse buying*. *Point-of-purchase and end-of-aisle display* merupakan stimuli didalam *impulse buying* (McClure and West 1969; Progressive Groces 1971a, 1971b). *Likewise, shelf design parameters such as shelf-spacing, shefft height, and shelft-facing are reported to influence unplanned purchasing behavior* (Cox 1964; Harris 1958; Kotzman and Evanson 1969). Produk yang tidak dilakukan didalam *impulse buying* yaitu pakaian mahal, peralatan elektronik, buku dan pakaian dalam (Rook & Hoch, 1985).

Perkembangan pembelian tidak terencana (*impulse buying / unplanned purchases*) ini menjadi dasar dari pembelian impulsif (*impulse buying*), (Clover 1950; Applebaum 1951; West 1951; Stern 1962; Kollat and Willett 1969). *Impulse buying* ini merupakan semua pembelian yang tanpa diharapkan dan tanpa rencana sebelumnya (Clover 1950; West 1951), dan termasuk *impulse buying* (Hausman, 2000). Menurut Rook & Hoch (1985), *definition of impulse buying (i.e. unplanned purchases) by distinguishing five crucial elements: (1) a sudden and spontaneous desire to act, (2) a state of psychological disequilibrium, (3) the onset of psychological conflict and struggle, (4) a reduction in cognitive evaluation, and (5) lack of regard for consequences of impulse buying.* Rook (1987), *impulse buying occurs when a consumer experiences a sudden, often powerful and persistent urge to buy something immediately. The impulse to buy is hedonically complex and may stimulate emotional conflict. Also, impulse buying is prone to occur with diminished regard for its consequences.* Rook & Fisher (1995), *buying impulsive as a consumer's tendency to buy spontaneously, unreflectively, immediately, and kinetically. Impulse buying as the degree to which an individual is likely an to make unintended, immediate, and unreflective purchases* (Huang Lin, Chien; Ming Lin, Hung; 2005) . *Impulse buying is a sudden and immediate purchase with no pre-shopping intentions either to buy the specific product category or to fulfill a specific buying task. The behavior occurs after experiencing an urge to buy and it tends to be spontaneous and without a lot of reflection (i.e.. it is "impulsive"). It does not include the purchase of a simple reminder item, which is an item that is simply out-of-stock at home* (Beatty, Sharon E.; Ferrell, M.Elizabeth;1998). Perusahaan akan melakukan usaha untuk meningkatkan *impulse buying* dengan cara melakukan pengenalan produk, melakukan percobaan pasar, dan meningkatkan pangsa pasar (Abratt dan Goodey, 1990). Dalam hal ini perusahaan banyak menghabiskan dana untuk melakukan promosi pada produknya dalam setiap ruang pajang di supermarket, walaupun perusahaan mengetahui bahwa peningkatan penjualan tidak hanya disebabkan oleh promosi saja.

Applebaum (1951) mengatakan bahwa perusahaan harus mengetahui pelanggannya maka perusahaan mempelajari perilaku konsumen dalam pembelian di toko. Ada dua hal yang perlu diketahui menurut Applebaum (1951) yaitu: (1) identifikasi konsumen, dan (2) bentuk perilaku pembelian. Tujuan untuk mengetahui identifikasi konsumen dan perilaku pembelian adalah perusahaan dapat melihat siapa yang membeli, dimana konsumen membeli, apa yang mereka beli, kapan mereka membeli dan bagaimana mereka membeli. Menurut Applebaum (1951) bahwa didalam identifikasi konsumen dibedakan antara customer dan consumer. *A customer is a purchaser of a product or a service; a consumer is a user of a product or a service*, sehingga yang dituju oleh perusahaan adalah customer.

Perilaku pembelian konsumen menurut Applebaum (1951), dibedakan antara shopping dan pembelian, dimana pembelian belum tentu shopping. Shopping adalah dimana konsumen melakukan pembelian dengan cara konsumen mendatangi toko retail dan melakukan kegiatan pembelian di toko tersebut, sedangkan pembelian adalah konsumen dapat melakukan transaksi pembelian tersebut lewat order melalui telepon, bila hal ini dilakukan maka kemungkinan tidak akan terjadi pembelian impulsif, sedangkan kalau shopping maka akan menimbulkan *impulse buying*. Bentuk perilaku pembelian konsumen dapat dikelompokkan berdasarkan : tempat pembelian, item yang dibeli, waktu dan frekuensi pembelian, cara pembelian, dan respon terhadap promosi penjualan. Maka dilakukan penelitian terhadap item dan jumlah item yang dibeli. Didalam jumlah item yang dibeli tergantung dari banyak factor yaitu berapa banyak jumlah konsumen yang mengetahui item produk tersebut, daya tahan produk tersebut, persediaan barang tersebut, fasilitas yang tersedia, kemampuan membeli konsumen, cara pembayaran produk, unit yang dijual, dan harga.

Timbul perbedaan pada jumlah pembelian yang dilakukan oleh wanita, pria dan pasangan. Hasil penelitian oleh Applebaum (1951) bahwa pasangan akan membeli dalam jumlah banyak dibandingkan oleh wanita atau pria, dalam hal ini biasanya pasangan tersebut saling mempengaruhi didalam pembelian produk di toko. Begitu juga respon terhadap promosi yang dilakukan akan berpengaruh terhadap jumlah keluarga yang besar dibandingkan dengan jumlah keluarga yang sedikit.

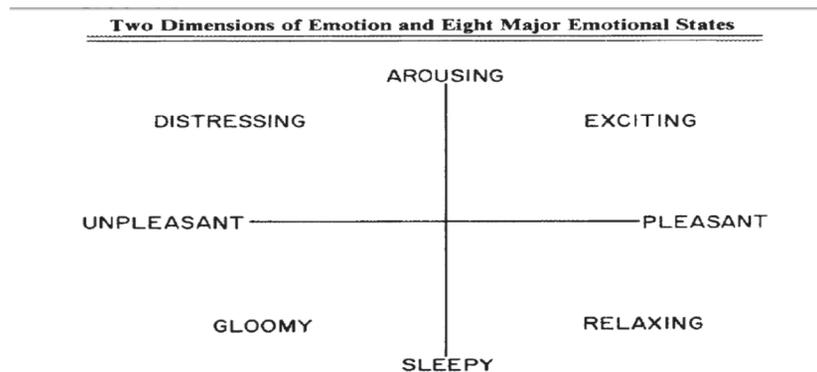
Faktor individu dapat menjadi dasar didalam keputusan pembelian konsumen yang cenderung berperilaku afektif yaitu *pleasure, arousal*, dan *dominance* menurut Mehrabian-Russell didalam penelitian yang dilakukan oleh

Donovan dan Rossiter (1982). *Pleasure* adalah individu merasakan baik, penuh kegembiraan, bahagia, atau puas dalam suatu situasi; *arousal* adalah individu merasakan tertarik, siaga, atau aktif dalam suatu situasi; *dominance* adalah perasaan yang direspon oleh konsumen saat mengendalikan atau dikendalikan oleh lingkungan. Menurut Mehrabian dan Russell pengaruh psikologis lingkungan menunjukkan perilaku pembelian karena akibat dari suasana toko dimana Paradigma *Stimulus – Organism – Response (S-O-R)*, digunakan untuk mendesain lingkungan berbelanja yang ada. Dalil Mehrabian dan Russell mengatakan bahwa semua respon terhadap lingkungan dapat dipertimbangkan sebagai perilaku positif atau negative, bila terjadi perilaku positif maka akan menimbulkan pembelian impulse dan bila perilaku negative maka tidak akan terjadi pembelian impulse.

Approach-avoidance behaviors are considered to have four aspects menurut Mehrabian and Russell yang dikutip oleh Donovan and Rossiter (1982):

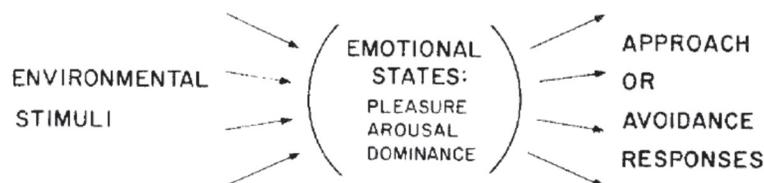
- 1) A desire physically to stay in (approach) or to get out of (avoid) the environment,
- 2) A desire or willingness to look around and to explore the environment (approach) versus a tendency to avoid moving through or interacting with the environment or a tendency to remain inanimate in the environment (avoidance),
- 3) A desire or willingness to communicate with others in the environment (approach) as opposed to a tendency to avoid interacting with others or to ignore communication attempts from others (avoidance),
- 4) The degree of enhancement (approach) or hindrance (avoidance) of performance and satisfaction with task performances.

Pada penelitian Mehrabian dan Russell terdapat variable intervening yaitu tingkat emosi yang ditunjukkan dengan *Pleasure-Arousal-Dominance*. Model Mehrabian dan Russell tersebut memperlihatkan interaksi antara *pleasure* dan *arousal* dalam menentukan *approach-avoidance*. Seperti terlihat pada Gambar 1. :



Gambar 1.

Pada Gambar 1 diatas terlihat bahwa perilaku *arousal* dan *pleasant* menimbulkan pembelian tinggi. Terlihat dari model Mehrabian – Russell seperti dibawah ini :



Gambar 2.
The Mehrabian-Russell Model

Bahwa lingkungan merangsang konsumen secara emosional yang menimbulkan respon terhadap lingkungan tersebut baik positif atau negative. Bila respon positif maka akan menimbulkan kesenangan bagi konsumen yang menyebabkan berbelanja lebih banyak dibandingkan bila respon negatif.

Konsumen melakukan keputusan pembelian belum tentu direncanakan terlebih dahulu, sehingga sering timbul pembelian yang tidak direncanakan (*impulse buying*) akibat adanya rangsangan lingkungan belanja. Secara spesifik, suasana sebuah lingkungan belanja serta lingkungan retail dapat mengubah emosi konsumen (Donovan dan Rossiter, 1982).

Banyak faktor yang mempengaruhi pembelian impulsif, seperti penelitian oleh Iyer (1989) dikatakan bahwa faktor lingkungan dan waktu mempengaruhi konsumen didalam melakukan *impulse buying*, penelitian ini didukung oleh Beatty, Sharon E.; Ferrell, M.Elizabeth (1998) dikatakan bahwa pembelian impulsif sangat dipengaruhi oleh waktu dan uang hal ini diperkuat pendapat Huang Lin, Chien; Ming Lin, Huang (2005), dimana disebutkan bahwa remaja Taiwan didalam pembelian impulsif memperlihatkan hasil dalam penelitian ternyata remaja wanita lebih tinggi dibandingkan remaja pria, serta juga pengaruh dari uang saku. Donovan & Rossiter (1982) bahwa *impulse buying* dipengaruhi oleh lingkungan dan factor psikologis konsumen, diperkuat oleh Rook & Hoch (1985) meneliti tentang faktor psikologis konsumen dan lingkungan belanja. Rook, Dennis W. (1987) mengatakan bahwa factor psikologis juga mempengaruhi konsumen didalam pembelian impulsif. Penelitian ini juga diperkuat lagi oleh Donovan & Rossiter (1994), dikatakan bahwa suasana toko dan factor psikologis konsumen mempengaruhi *impulse buying*. Rook & Fisher (1995) menambahkan ada factor mediasi yaitu normative yang menyebabkan *impulse buying*. Mattila&Wirtz (2008) menyatakan bahwa lingkungan toko yang menyenangkan akan merangsang konsumen untuk melakukan *impulse buying*.

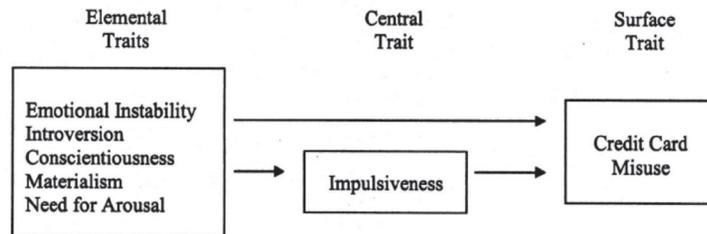
Peneliti terdahulu yang meneliti tentang *impulse buying*, timbul banyak perspektif yang ada. Perspektif tersebut melihat adanya perbedaan pendapat dari para peneliti tentang *impulse buying* disebabkan oleh obyek yang diteliti. Peneliti ingin melihat apakah ada pengaruh stimuli lingkungan dan fasilitas pembayaran terhadap tingkat emosi konsumen dengan adanya variable moderating pendidikan dan status pernikahan yang mempengaruhi pembelian tidak terencana (*impulse buying*) terutama pada produk fashion, sehingga penelitian ini akan mengacu pada permasalahan :

- 1) Apakah Tingkat Emosi Konsumen, Stimuli Lingkungan dan Fasilitas pembayaran berpengaruh terhadap Pembelian Tidak Terencana produk fashion
- 2) Apakah Stimuli Lingkungan dan Fasilitas Pembayaran berpengaruh terhadap Tingkat Emosi Konsumen
- 3) Apakah Pendidikan dan status pernikahan mempengaruhi hubungan antara Stimuli Lingkungan dengan Tingkat Emosi Konsumen
- 4) Apakah Pendidikan dan status pernikahan mempengaruhi hubungan antara Fasilitas Pembayaran dengan Tingkat Emosi Konsumen.

2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Penelitian yang dilakukan oleh Abratt & Goodey (1990) memberikan definisi tentang *impulse buying* yang disebabkan adanya rangsangan yang diterima konsumen dari retail, disini sudah menambahkan variable lingkungan retail. Donovan et.al. (1994) menjelaskan tentang *impulse buying* yang disebabkan karena adanya rangsangan dari lingkungan retail yang menyebabkan emosi konsumen timbul dan mengakibatkan pembelian tidak terencana, sehingga Donovan sudah menggabungkan variable antara lingkungan retail dengan factor psikologis. Rook & Fisher (1995) tetap melihat bahwa terjadinya *impulse buying* karena faktor psikologi konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Iyer (1989), dimana menekankan pada waktu dan lingkungan. Huang dan Ming (2005) mendefinisikan bahwa *impulse buying* merupakan suatu pembelian yang harus segera dilakukan tanpa adanya suatu rencana sebelumnya, disini menambahkan variable demografi pada penelitiannya. *Impulse buying* dapat dipengaruhi oleh factor psikologi, factor lingkungan, maupun demografi dari konsumen.

Pirog III, Stephen F.; Roberts, James A (2007) dalam penelitian *Personality and credit card misuse among college students: The mediating Role of Impulsiveness*

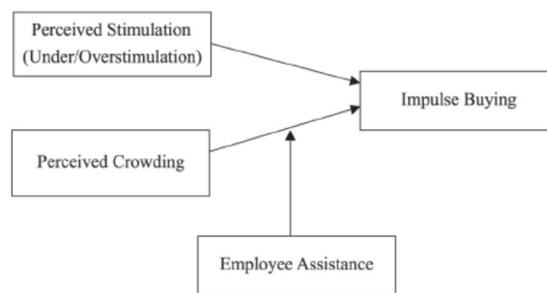


Gambar 3.
Hierarchical Model of Credit Card Misuse

Terlihat bahwa penyalahgunaan penggunaan kartu kredit sangat tinggi dikalangan pelajar yang ada. Hal ini dapat dilihat dari *elemental traits in the 3M hierarchical model of personality* dimana diterapkan pada sifat pelajar yang masih tidak stabil emosinya, memperhatikan diri sendiri, kurang hati-hati, materialis, dan kebutuhan untuk kesenangan. Penyalahgunaan kartu kredit menjadi tinggi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Huang Lin et. al., (2005) menekankan *impulse buying* pada remaja dengan penyebab salah satunya adalah uang saku yang dimiliki.

Menurut Donovan et. al., (1994, 1982) memperlihatkan bahwa suasana lingkungan yang mempengaruhi konsumen didalam melakukan pembelian impulsive disebabkan karena konsumen berinteraksi dengan suasana toko yang menimbulkan pengaruh emosional sehingga timbul efek positif atau negatif.

Menurut Mattila, Anna S.;Wirtz, Jochen (2008) dalam penelitian *The role of store environmental stimulation and social factors on impulse purchasing*, menyatakan ada factor mediasi antara *perceived stimulation* dan *perceived crowding* yang menimbulkan *impulse buying* yaitu *employee assistance*.



Gambar 4.
Overview of the research design by Mattila, et. al. (2008)

Penelitian yang dilakukan oleh Mattila et. al., (2008) mengatakan bahwa rangsangan tinggi yang diterima oleh konsumen menyebabkan pembelian impulsive. Rangsangan yang dilakukan dari lingkungan belanja mempunyai efek positif bagi konsumen. Penelitian tentang lingkungan ini seperti yang dilakukan oleh Donovan et. al., (1994, 1982) dan Abratt et. al., (1990) sebelumnya yang memperlihatkan juga pengaruh suasana lingkungan yang positif mempunyai efek terhadap pembelian impulsive.

Model Mehrabian-Russell yang digunakan oleh Donovan et. al., (1994, 1982) terlihat dimana ada rangsangan dari lingkungan yang menimbulkan tingkat emosional berdampak terhadap respon pendekatan atau penghindaran (respon positif atau negative) seperti pada gambar 2. Dimana diharapkan yang timbul adalah respon pendekatan (respon positif) yang akhirnya menimbulkan pembelian impulsive.

Penelitian ini mengacu pada model Mehrabian-Russell yang digunakan oleh Donovan et. al., (1994,1982) dan penelitian yang dilakukan oleh Rook (1995, 1987, 1985) yang menjadikan dasar didalam model ini. Pengaruh environmental stimuli menimbulkan emosi pada konsumen sehingga terjadi perasaan *arousal*, *pleasant* dan *dominance* yang mengakibatkan respon pendekatan dan penghindaran, sehingga respon pendekatan inilah yang merupakan *impulse buying*.

Penelitian Donovan, et. al., (1994,1982) menunjukkan *impulse buying* dengan kondisi suasana yang menyenangkan akan menimbulkan konsumen untuk berbelanja lebih banyak tanpa disadari oleh konsumen itu sendiri. Donovan et. al., (1994,1982) mengembangkan teori atau paradigma dari Mehrabian dan Russell.

Pembelian tidak terencana yang diteliti oleh peneliti dikaitkan dengan tempat belanja yang modern, suasana yang menyenangkan, karyawan yang ramah, cara pembayaran, pendidikan, dan status pernikahan.

Konsumen dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti didasarkan pada kelas social, maka dapat dibagi kedalam kelas social bawah, menengah dan atas. Kelas social yang mengakibatkan pembelian impulsive seperti pada penelitian Huang Lin, et. al., (2005). Setiap faktor seperti kelas social, pendapatan, usia, pendidikan dan lain-lain belum tentu menimbulkan *impulse buying*, ada faktor lain seperti lingkungan berbelanja, dan pengaruh psikologi konsumen. Menurut Paul Peter dan Jerry Olson (2002), lingkungan dibagi menjadi dua yaitu lingkungan makro, dimana mempunyai pengaruh umum atas perilaku, seperti keadaan ekonomi, politik, sosial, alam, lingkungan mikro mempunyai pengaruh langsung terhadap konsumen, seperti orang tidak akan berlama-lama didalam keadaan mal yang tidak nyaman, karyawan toko yang cerewet, antrian yang panjang. Lingkungan juga belum tentu menimbulkan *impulse buying*, sehingga perlu didesain lingkungan bagaimana yang menimbulkan *impulse buying*, seperti pada penelitian Donovan et.al. (1994,1982), Rook, Dennis; Hoch, Stephen J. (1985), Iyer, Easwar S. (1989), Mattila, Anna S.;Wirtz, Jochen (2008).

Faktor psikologis mempengaruhi *impulse buying* seperti pada penelitian Rook, Dennis; Hoch, Stephen J. (1985), Rook, Dennis W. (1987), Donovan, Robert J.; Rossiter, John R.; Marcoolyn, Gilian; Nesdale, Andrew (1994), Silvera, David H.; Lavack, Anne M.; Kropp, Fredric; (2008). Konsumen akan sensitive bila emosi dipengaruhi, pengaruh yang positif akan menimbulkan dampak pada *impulse buying* sedangkan pengaruh yang negative akan menimbulkan konsumen untuk meninggalkan lingkungan belanja tersebut. Faktor psikologis dapat dilihat dari *cognitive*, *affective* dan *conative* seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Donovan, Robert J.; Rossiter, John R.; Marcoolyn, Gilian; Nesdale, Andrew (1994), factor *affective* sangat rentan terhadap konsumen yang impulsive sehingga mengakibatkan *conative* bagi konsumen yang menyebabkan *impulse buying*.

Dasar dari lingkungan belanja, faktor psikologis, pendidikan, dan status pernikahan inilah maka penulis menggunakan Paradigma *Stimulus – Organism – Responde (S-O-R)* dari Mehrabian dan Russell (1974) dalam penelitian yang dilakukan oleh Donovan, Robert J.; Rossiter, John R.; Marcoolyn, Gilian; Nesdale, Andrew (1994) mengatakan bahwa tanggapan ke stimuli lingkungan (S) dapat diperlakukan sebagai suatu tanggapan pendekatan (*approach*) atau penghindaran (*avoidance*) (R), dengan pengalaman individu di dalam lingkungan (O) sebagai mediator. Individu bereaksi didalam lingkungan dengan dua perilaku yaitu pendekatan dan penghindaran (*approach and avoidance*).

Timbul dua perilaku positif dan negatif, dimana perilaku pendekatan (*approach behavior*) merupakan perilaku positif yang diarahkan pada hal tertentu seperti keinginan untuk tinggal, bekerja, dan bersosialisasi. Sedangkan perilaku negatif yaitu terjadi pada perilaku penghindaran (*avoidance behavior*). Mehrabian dan Russell (1974) dalam penelitian Donovan et. al., (1994,1982), menyatakan bahwa *pleasure* berhubungan dengan perilaku pendekatan-penghindaran (*approach avoidance*) yang diukur keseluruhan, dan *arousal* mempunyai suatu efek interaktif yang menyenangkan. *Arousal* secara positif dihubungkan dengan perilaku pendekatan (*approach*) dalam lingkungan yang menyenangkan, tetapi secara negatif terkait dengan lingkungan yang tidak nyaman.

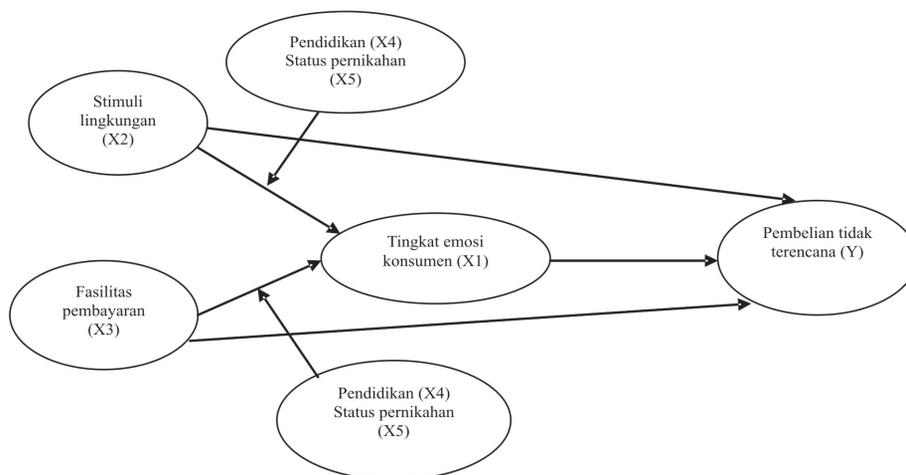
Respon lingkungan belanja menimbulkan dua efek, dimana lingkungan belanja tersebut menyenangkan maka akan menimbulkan efek positif dan sebaliknya. Donovan et.al. (1994, 1982), menggunakan dasar dari Mehrabian dan Russel menyatakan bahwa respons afektif lingkungan atas perilaku pembelian dapat diuraikan oleh tiga variabel yaitu : *Pleasure*, mengacu pada tingkat dimana individu merasakan baik, penuh kegembiraan, bahagia yang berkaitan dengan situasi tersebut. *Pleasure* diukur dengan penilaian reaksi lisan ke lingkungan. Konseptualisasi terhadap *pleasure* dikenal dengan pengertian lebih suka, kegembiraan, serta perbuatan positif. *Arousal*, mengacu pada tingkat dimana seseorang merasakan siaga, digairahkan, atau situasi aktif. *Arousal* secara lisan dianggap sebagai laporan responden, seperti pada saat dirangsang, ditentang, atau diperlonggar, dan membatasi *arousal* sebagai keadaan perasaan yang secara langsung ditaksir oleh laporan verbal. Beberapa ukuran nonverbal telah diidentifikasi dapat dihubungkan dan sesungguhnya membatasi sebuah ukuran dari *arousal* dalam situasi sosial. *Dominance*, ditandai dengan laporan responden yang merasa dikendalikan sebagai lawan mengendalikan, mempengaruhi sebagai lawan dipengaruhi. Donovan dan Rossiter (1982) memperkenalkan model psikologi lingkungan Mehrabian dan Russell, untuk studi suasana lingkungan toko. Studi ini menjelaskan lingkungan eceran dengan lingkungan toko, keadaan emosional, dan perilaku pembelian. Hasilnya *pleasure* secara positif berhubungan dengan kesediaan untuk membeli, *arousal* berhubungan dengan waktu yang dihabiskan di toko dan kesediaan berinteraksi dengan karyawan toko seperti pada penelitian Mattila et. al., (2008).

Impulse buying merupakan kegiatan untuk menghabiskan uang yang tidak terkontrol, kebanyakan terjadi pada barang-barang yang sebetulnya tidak diperlukan. Produk impulsif kebanyakan adalah produk-produk baru, yang dijual dengan cara menggunakan *sales promotion*, tujuannya adalah untuk menarik konsumen yang impulsif. Penjual menarik konsumen ketika indera perasa mengirimkan pesan pada otak sehingga konsumen merasakan kebutuhan produk tersebut sehingga timbul keinginan untuk membeli. Beberapa macam barang yang dibeli oleh konsumen adalah perhiasan, pakaian, ornamen-ornamen yang digunakan untuk penampilan (Semuel, 2005).

2.1. Hubungan antar Konsep

Dalam penelitian ini terlihat bahwa pendidikan dan status pernikahan merupakan variable moderating antara stimuli lingkungan, fasilitas pembayaran dan tingkat emosi konsumen didalam mempengaruhi pembelian tidak terencana.

Pengembangan model yang dilakukan sebagai berikut :



Gambar 5.
Kerangka Pemikiran

2.2. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang diteliti dan kajian teori yang ada maka dapat disusun beberapa hipotesis untuk penelitian ini, yaitu :

- Hipotesis 1 : Stimuli lingkungan berpengaruh positif terhadap pembelian tidak terencana
- Hipotesis 2 : Fasilitas pembayaran berpengaruh positif terhadap pembelian tidak terencana
- Hipotesis 3 : Tingkat emosi konsumen berpengaruh positif terhadap pembelian tidak terencana
- Hipotesis 4 : Stimuli lingkungan berpengaruh positif terhadap tingkat emosi konsumen
- Hipotesis 5 : Fasilitas pembayaran berpengaruh positif terhadap tingkat emosi konsumen
- Hipotesis 6 : Pendidikan memoderasi hubungan antara stimuli lingkungan dengan tingkat emosi konsumen
- Hipotesis 7 : Status pernikahan memoderasi hubungan antara stimuli lingkungan dengan tingkat emosi konsumen
- Hipotesis 8 : Pendidikan memoderasi hubungan antara fasilitas pembayaran dengan tingkat emosi konsumen
- Hipotesis 9 : Status pernikahan memoderasi hubungan antara fasilitas pembayaran dengan tingkat emosi konsumen.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah :

Verifikatif (*verificative survey*) atau *explanatory survey* bertujuan untuk mengetahui hubungan-hubungan antar variable yang ada serta menguji hipotesis. Penelitian ini memilih investigasi kausalitas, dengan unit analisisnya adalah konsumen dengan tingkat pendidikan dan status pernikahan sedangkan unit observasinya adalah konsumen yang sudah berpendidikan sebagai individu dengan cakupan waktu *cross-sectional (one shoot)* yang dilakukan pada tahun 2010.

Penelitian ini terdiri dari 6 variabel yaitu :

- a. Dua variable independent :
 - 1. Stimuli lingkungan terdiri dari : x1, x2, x3
 - 2. Fasilitas pembayaran terdiri dari : x4, x5
- a. Dua variable moderating :
 - 1. Pendidikan
 - 2. Status Pernikahan
- a. Satu variabel intervening :
 - 1. Tingkat emosi konsumen terdiri dari : x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12
- a. Satu variabel dependent :
 - 1. Pembelian tidak terencana terdiri dari : x13, x14, x15, x16, x17, x18, x19, x20, x21, x22

Sebelum pengambilan data dilapangan, maka dilakukan uji kuesioner dengan menggunakan validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis faktor untuk melihat apakah indikator yang ada membentuk variabel.

**Tabel 1.
KMO and Bartlett's Test**

		Variabel			
		Stimuli lingkungan (SL)	Fasilitas pembayaran (FP)	Tingkat emosi Konsumen (TE)	Pembelian tidak terencana (IB)
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy		0,664	0,500	0,776	0,832
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	27,586	65,234	159,502	303,874
	df	3	1	21	45
	Sig	0,000	0,000	0,000	0,000

Berdasarkan hasil penghitungan tabel diatas angka KMO Measure of Sampling Adequacy dari empat variable adalah diatas 0,5 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga variable dan data diatas dapat terus dianalisis lebih lanjut, berarti kuesioner dikatakan valid. Hal ini perkuat dengan nilai anti image correlationnya diatas 0,5.

**Tabel 2.
Anti-image Matrices**

		x1	x2	x3
Anti-image Covariance	x1	.746	-.139	-.247
	x2	-.139	.720	-.271
	x3	-.247	-.271	.653
Anti-image Correlation	x1	.698 ^a	-.190	-.354
	x2	-.190	.676 ^a	-.395
	x3	-.354	-.395	.630 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Jika dilihat dari hasil analisis diatas maka indicator yang ada mempunyai MSA diatas 0,5 berarti indicator x1 – x3 membentuk stimuli lingkungan.

**Tabel 3.
Anti-image Matrices**

		x4	x5
Anti-image Covariance	x4	.253	-.219
	x5	-.219	.253
Anti-image Correlation	x4	.500 ^a	-.864
	x5	-.864	.500 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Jika dilihat dari hasil analisis diatas maka indicator yang ada mempunyai MSA sama dengan 0,5 berarti indicator x4 dan x5 membentuk fasilitas pembayaran.

Tabel 4.
Anti-image Matrices

		x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12
Anti-image Covariance	x6	.506	-.134	-.109	.034	-.037	-.076	-.148
	x7	-.134	.429	-.050	-.154	-.091	.121	.066
	x8	-.109	-.050	.340	-.175	-.018	-.026	.062
	x9	.034	-.154	-.175	.305	.042	-.113	-.030
	x10	-.037	-.091	-.018	.042	.484	-.207	-.222
	x11	-.076	.121	-.026	-.113	-.207	.517	-.042
	x12	-.148	.066	.062	-.030	-.222	-.042	.617
Anti-image Correlation	x6	.849 ^a	-.288	-.264	.086	-.075	-.149	-.264
	x7	-.288	.770 ^a	-.132	-.425	-.199	.257	.129
	x8	-.264	-.132	.802 ^a	-.544	-.043	-.061	.135
	x9	.086	-.425	-.544	.742 ^a	.111	-.285	-.069
	x10	-.075	-.199	-.043	.111	.758 ^a	-.413	-.406
	x11	-.149	.257	-.061	-.285	-.413	.773 ^a	-.074
	x12	-.264	.129	.135	-.069	-.406	-.074	.724 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Jika dilihat dari hasil analisis diatas maka MSA diatas 0,5 berarti indicator x6 – x12 dapat membentuk variable tingkat emosi konsumen.

Tabel 5.
Anti-image Matrices

		x13	x14	x15	x16	x17	x18	x19	x20	x21	x22
Anti-image Covariance	x13	.352	-.038	-.196	.044	-.039	-.007	.018	-.010	-.054	-.045
	x14	-.038	.360	-.086	-.059	.023	.032	-.113	-.046	.011	-.034
	x15	-.196	-.086	.314	-.052	.005	-.032	-.006	.035	.000	-.035
	x16	.044	-.059	-.052	.228	-.191	.042	-.007	.009	-.006	.001
	x17	-.039	.023	.005	-.191	.248	-.005	.021	-.031	-.010	.033
	x18	-.007	.032	-.032	.042	-.005	.541	-.177	-.028	-.043	-.047
	x19	.018	-.113	-.006	-.007	.021	-.177	.356	-.117	.027	.039
	x20	-.010	-.046	.035	.009	-.031	-.028	-.117	.248	-.150	-.114
	x21	-.054	.011	.000	-.006	-.010	-.043	.027	-.150	.413	-.052
	x22	-.045	-.034	-.035	.001	.033	-.047	.039	-.114	-.052	.508
Anti-image Correlation	x13	.838 ^a	-.108	-.590	.154	-.132	-.017	.052	-.033	-.143	-.105
	x14	-.108	.910 ^a	-.256	-.205	.078	.074	-.315	-.152	.027	-.079
	x15	-.590	-.256	.830 ^a	-.193	.016	-.078	-.018	.126	.001	-.088
	x16	.154	-.205	-.193	.683 ^a	-.802	.120	-.023	.038	-.019	.004
	x17	-.132	.078	.016	-.802	.695 ^a	-.013	.069	-.126	-.031	.093
	x18	-.017	.074	-.078	.120	-.013	.874 ^a	-.403	-.075	-.092	-.090
	x19	.052	-.315	-.018	-.023	.069	-.403	.833 ^a	-.395	.071	.092
	x20	-.033	-.152	.126	.038	-.126	-.075	-.395	.839 ^a	-.469	-.322
	x21	-.143	.027	.001	-.019	-.031	-.092	.071	-.469	.892 ^a	-.113
	x22	-.105	-.079	-.088	.004	.093	-.090	.092	-.322	-.113	.919 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Hasil analisis table diatas terlihat bahwa nilai MSA tidak ada yang dibawah 0,5, berarti bahwa indicator x13 – x22 membentuk variable pembelian tidak terencana.

Tabel 6.
Reliability

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	N of lems
1.	Stimuli lingkungan	0,708	3
2.	Fasilitas pembayaran	0,924	2
3.	Tingkat emosi konsumen	0,841	7
4.	Pembelian tidak terencana	0,890	10

Terlihat pada tabel reliability bahwa nilai cronbach's alpha diatas 0,6 berarti bahwa variabel yang diteliti mempunyai indikator yang reliabel.

Nilai validitas dan reliability indikator didalam kuesioner memenuhi syarat untuk dilakukan pengambilan data dengan menyebarkan kuesioner yang sudah teruji. Data yang terambil berjumlah 148 responden.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan data menggunakan regresi analysis.
Substruktur 1

Tabel 7.
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.723 ^a	.523	.513	.65395	1.612

a. Predictors: (Constant), TE, FP, SL

b. Dependent Variable: IB

Besarnya angka R square (r^2) adalah 0, 523. Angka tersebut dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh stimuli lingkungan, fasilitas pembayaran dan tingkat emosi konsumen terhadap pembelian tidak terencana dengan cara menghitung Koefisien Determinasi (KD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,523 \times 100\%$$

$$KD = 52,3\%$$

Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh stimuli lingkungan, fasilitas pembayaran dan tingkat emosi konsumen terhadap pembelian tidak terencana secara gabungan adalah 52,3%. Adapun sisanya sebesar $100\% - 52,3\% = 47,7\%$ dipengaruhi oleh factor lain. Dengan kata lain, variabilitas pembelian tidak terencana yang dapat diterangkan dengan menggunakan variable stimuli lingkungan, fasilitas pembayaran dan tingkat emosi konsumen sebesar 52,3%, sedangkan pengaruh sebesar 47,7% disebabkan oleh variable-variabel lain di luar model ini.

Untuk mengetahui apakah model regresi diatas sudah benar atau salah perlu dilakukan uji model. Uji model menggunakan angka F sebagaimana tertera dalam table dibawah ini :

Tabel 8.
ANOVA^b

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	67.457	3	22.486	52.579	.000 ^a
	Residual	61.582	144	.428		
	Total	129.039	147			

a. Predictors: (Constant), TE, FP, SL

b. Dependent Variable: IB

Untuk menguji model maka digunakan cara yaitu :

Jika angka signifikansi penelitian kurang dari 0,05 maka dikatakan signifikan. Sedangkan nilai signifikansi penelitian sebesar 0,000 berarti signifikan, maka model penelitian tersebut fit. Artinya, ada hubungan linier antara stimuli lingkungan, fasilitas pembayaran dan tingkat emosi konsumen dengan pembelian tidak terencana.

Untuk melihat pengaruh variable stimuli lingkungan, fasilitas pembayaran dan tingkat emosi konsumen secara parsial terhadap pembelian tidak terencana digunakan uji hipotesis dengan uji T, sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh digunakan angka Beta atau Unstandardized Coefficients di bawah ini :

Tabel 9.
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.234	.294		.795	.428		
	SL	.240	.071	.234	3.370	.001	.686	1.457
	FP	.004	.045	.006	.084	.933	.755	1.324
	TE	.601	.069	.580	8.715	.000	.747	1.338

a. Dependent Variable: IB

1) Pengaruh antara stimuli lingkungan dengan pembelian tidak terencana

H1 : Stimuli lingkungan berpengaruh positif terhadap pembelian tidak terencana

Nilai t penelitian sebesar 3,370 dan tingkat signifikan sebesar 0,001, dimana nilai signifikan dibawah 0,05 berarti H1 diterima artinya stimuli lingkungan berpengaruh positif terhadap pembelian tidak terencana untuk produk fashion.

2) Pengaruh antara fasilitas pembayaran dengan pembelian tidak terencana

H2 : Fasilitas pembayaran berpengaruh positif terhadap pembelian tidak terencana

Nilai t penelitian sebesar 0,084 dan tingkat signifikan sebesar 0,933, nilai signifikan diatas 0,05 berarti H2 ditolak artinya tidak ada pengaruh antara fasilitas pembayaran dengan pembelian tidak terencana untuk produk fashion.

3) Pengaruh antara tingkat emosi konsumen dengan pembelian tidak terencana

H3 : Tingkat emosi konsumen berpengaruh positif terhadap pembelian tidak terencana

Pengaruh Stimuli Lingkungan dan Fasilitas Pembayaran Terhadap Tingkat Emosi Konsumen
(Yasinta Soelasih)

Nilai t penelitian sebesar 8,715 dan tingkat signifikan sebesar 0,000, nilai signifikan dibawah 0,05 berarti H3 diterima artinya tingkat emosi konsumen berpengaruh positif dengan pembelian tidak terencana untuk produk fashion.

Persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$IB = 0.234 + 0.240SL + 0.0047FP + 0.601TE + \epsilon_1 \dots \dots \dots (1)$$

Substruktur 2

Tabel 10.
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.503 ^a	.253	.242	.78799

a. Predictors: (Constant), FP, SL

Besarnya angka R square (r^2) adalah 0, 253. Angka tersebut dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh stimuli lingkungan dan fasilitas pembayaran, terhadap tingkat emosi konsumen dengan cara menghitung Koefisien Determinasi (KD) sebesar 25,3%. Angka tersebut mempunyai arti bahwa pengaruh stimuli lingkungan dan fasilitas pembayaran terhadap tingkat emosi konsumen secara gabungan adalah 25,3%. Adapun sisanya sebesar $100\% - 25,3\% = 74,7\%$ dipengaruhi oleh factor lain. Dengan kata lain, variabilitas tingkat emosi konsumen yang dapat diterangkan dengan menggunakan variable stimuli lingkungan dan fasilitas pembayaran sebesar 25,3%, sedangkan pengaruh sebesar 74,7% disebabkan oleh variable-variabel lain di luar model ini.

Untuk mengetahui apakah model regresi diatas sudah benar atau salah perlu dilakukan uji model. Uji model menggunakan angka F sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini :

Tabel 12.
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	30.451	2	15.225	24.520	.000 ^a
Residual	90.034	145	.621		
Total	120.485	147			

a. Predictors: (Constant), FP, SL

b. Dependent Variable: TE

Untuk menguji model maka digunakan cara yaitu :

Jika angka signifikansi penelitian kurang dari 0,05 maka dikatakan signifikan. Sedangkan nilai signifikansi penelitian sebesar 0,000 berarti signifikan, maka model fit. Artinya, ada hubungan linier antara stimuli lingkungan dan fasilitas pembayaran dengan tingkat emosi konsumen untuk produk fashion.

Untuk melihat pengaruh variable stimuli lingkungan dan fasilitas pembayaran secara parsial terhadap tingkat emosi konsumen digunakan uji hipotesis dengan uji T, sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh digunakan angka Beta atau Unstandardized Coefficients di bawah ini :

**Tabel 13.
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.407	.334		4.208	.000		
SL	.372	.080	.375	4.642	.000	.788	1.268
FP	.135	.053	.204	2.520	.013	.788	1.268

a. Dependent Variable: TE

1) Pengaruh antara stimuli lingkungan dengan tingkat emosi konsumen

H4 : Stimuli lingkungan berpengaruh positif terhadap tingkat emosi konsumen

Nilai t penelitian sebesar 4,642 dan tingkat signifikan sebesar 0,000, dimana nilai signifikan dibawah 0,05 berarti H4 diterima artinya stimuli lingkungan berpengaruh positif terhadap tingkat emosi konsumen untuk produk fashion.

2) Pengaruh antara fasilitas pembayaran dengan tingkat emosi konsumen

H5 : Fasilitas pembayaran berpengaruh positif terhadap tingkat emosi konsumen

Nilai t penelitian sebesar 2,520 dan tingkat signifikan sebesar 0,013, dimana nilai signifikan dibawah 0,05 berarti H5 diterima artinya fasilitas pembayaran berpengaruh positif terhadap tingkat emosi konsumen untuk produk fashion.

Persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$TE = 1.407 + 0.372SL + 0.135FP + \epsilon_i \dots\dots\dots(2)$$

Substruktur 3

Pengujian hipotesis 6, 7, 8 dan 9 dengan menggunakan model Moderating Regression Analysis (MRA). Pengujian ini dilakukan dengan memperhatikan tingkat signifikansi dari variabel yang diinteraktifkan (dikalikan).

3) Pengujian hipotesis 6

H6 : Pendidikan memoderasi hubungan antara stimuli lingkungan dengan tingkat emosi konsumen

Hasil uji T terlihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,981 dengan nilai t hitung sebesar -0,024. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa H 6 tidak dapat diterima. Artinya variabel pendidikan tidak memoderasi hubungan antara stimuli lingkungan dengan tingkat emosi konsumen.

4) Pengujian hipotesis 7

H7 : Status pernikahan memoderasi hubungan antara stimuli lingkungan dengan tingkat emosi konsumen

Hasil uji T terlihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,941 dengan nilai t hitung sebesar -0,074. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa H 7 tidak dapat diterima. Artinya variabel status pernikahan tidak memoderasi hubungan antara stimuli lingkungan dengan tingkat emosi konsumen.

5) Pengujian hipotesis 8

H8 : Pendidikan memoderasi hubungan antara fasilitas pembayaran dengan tingkat emosi konsumen

Hasil uji T terlihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,977 dengan nilai t hitung sebesar -0,029. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa H 8 tidak dapat diterima. Artinya variabel pendidikan tidak memoderasi hubungan antara fasilitas pembayaran dengan tingkat emosi konsumen.

6) Pengujian hipotesis 9

H9 : Status pernikahan memoderasi hubungan antara fasilitas pembayaran dengan tingkat emosi konsumen

Hasil uji T terlihat bahwa nilai signifikan 0,107 dengan nilai t hitung sebesar -1,622. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa H 9 tidak dapat diterima. Artinya variabel status pernikahan tidak memoderasi hubungan antara fasilitas pembayaran dengan tingkat emosi konsumen.

5. PENUTUP

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel stimuli lingkungan dan tingkat emosi konsumen terhadap pembelian tidak terencana untuk produk fashion sedangkan variabel fasilitas pembayaran tidak berpengaruh terhadap pembelian tidak terencana untuk produk fashion. Variabel moderating pendidikan dan status pernikahan tidak dapat memoderasi hubungan antara stimuli lingkungan dan tingkat emosi konsumen, begitu juga variabel moderating pendidikan dan status pernikahan tidak dapat memoderasi antara fasilitas pembayaran dan tingkat emosi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abratt, Russell; Goodey, Stephen Donald, (1990) *Unplanned Buying and In-store Stimuli in Supermarkets*. Managerial and Decision Economics, vol. 11. 111-121.
- Applebaum, William., (1951), Studying customer behavior in retail stores, *Journal of Marketing*, 16, ABI/INFORM Global, pg. 172.
- Beatty, Sharon E.; Ferrell, M.Elizabeth, (1998), Impulse buying: Modeling it precursors. *Journal of Retailing*, Volume 74(2), pp. 169-191.
- Clover, Vernon T., (1950), Relative importance of impulse-buying in retail stores, *The Journal of Marketing*, Jul; 15, 1; ABI/INFORM Global, pg. 66.
- Cox, Keith R., (1964), The Responsiveness of Food Sales to Shelft-Space Changes in Supermarkets, *Journal of Marketing Research*, 1 (May), pp. 63-68.
- Donovan, Robert J.; Rossiter, John R., (1982), Store Atmosphere: An Environmental Psychology Approach, *Journal of Retailing*, Vol. 58, No. 1, Spring, pp. 34-57.
- Donovan, Robert J.; Rossiter, John R.; Marcoolyn, Gilian; Nesdale, Andrew, (1994), Store Atmosphere and Purchasing Behavior, *Journal of Retailing*, Vol. 70, No. 3, pp. 283-294.
- Granbois, Donald H., (1958), Improving the Study of Customer In-Store Behavior, *Journal of Marketing*, 32, pp. 28-33.
- Harris, Douglas H., (1968) *The Effect of Time-Pressure on Vertical Structure and Decision Making in Small Groups*. Organizational Behavior and Human Performance, 27, pp. 119-134.
- Hausman, A., (2000), A Multi-method Investigation of Consumer Motivations in Impulse Buying Behavior, *Journal of Consumer Marketing*, Vol.17, pp. 403-419.

- Hong, Wen-Bing.; Lee, Cheng-Ping.; Chen, Chun-Wen, (2001), Classification of Age Groups Based on Facial Features, *Tamkang Journal of Science and Engineering*, Vol. 4, No. 3, Hlm. 183-192.
- Huang Lin, Chien; Ming Lin, Hung, (2005), *An exploration of Taiwanese adolescents' impulse buying tendency*. Adolescence; Spring; 40, 157.
- http://andayuna.blogspot.com/2009/10/batas-batas-lanjut-usia_16.html.
- John, West C., (1951), Results of Two Years' of Study Into Impulse Buying, *Journal of Marketing*. Jan; 15, 000003; ABI/INFORM Global pg. 362.
- Kollat, David T.; Willett, Ronald P., (1969), Is Impulse Purchasing Really a Useful Concept for Marketing Decisions?. *Journal of Marketing*; Jan, 33, 000001; ABI/INFORM Global pg.79-83.
- _____, (1967), Customer Impulse Purchasing Behavior. *Journal of Marketing Research*, 4, pp. 21-31.
- Mattila, Anna S.;Wirtz, Jochen, (2008), The role of store environmental stimulation and social factors on impulse purchasing, *Journal of Services Marketing*, 22/7, pp. 562-567.
- McClure, Peter J.; West, James E., (1969), *Sales Effects of a New Counter Display*. *Journal of Advertising Research*, 9, pp. 29-34.
- Mehrabian, Albert and James A. Russell, (1974), *An Approach to Environmental Psychology*. Cambridge,MA: MIT Press.
- Park, Eun Joo, (2006), A structural model of fashion-oriented impulse buying behavior, *Journal of Fashion Marketing and Management*, Vol. 10 No. 4, pp. 433-446.
- Peter, Paul and Olson, Jerry, (2002) *Consumer Behavior and Marketing Strategy*. 6th ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Pirog III, Stephen F.; Roberts, James A., (2007), Personality and credit card misuse among college students: The mediating Role of Impulsiveness, *Journal of Marketing Theory and Practice*; Winter;15, 1; ABI/INFORM Global pg. 65.
- Progressive Grocer. 1971a. *How In-Store Merchandising Can Boost Sales*. October, pp. 94-97
- _____, (1971b), *How the Basics of Special Display Affect Sales and Profits*. January, pp. 34-40.
- _____, (1968), *Out-of-Stocks Dissappoint Shoppers, Force Switching*. November, pp. 26-29.
- Raju, P.S., (1980), Optimum Stimulation Level: Its Relationship to Personality, Demographics, and Exploratory Behavior. *Journal of Consumer Research*, 7, pp. 272-282.
- Rook, Dennis W., (1987), The Buying Impulse, *Journal of Consumer Research*, Vol. 14. September, pp. 189-199.
- Rook, Dennis W.; Fisher, Robert J., (1995), Normative Influences on Impulse buying Behavior, *Journal of Consumer Research*, Inc. Vol. 22, pp. 305-313.
- Semuel, Hatane, (2005), Respon Lingkungan Berbelanja sebagai Stimulus Impulse buying pada Toko Serba Ada (Toserba) (Studi Kasus Carrefour Surabaya), *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vo. 7. No. 2, September: 152-170.
- Silvera, David H.; Lavack, Anne M.; Kropp, Fredric, (2008), Impulse buying: the role of affect, social influence, and subjective wellbeing, *Journal of Consumer Marketing* 25/1, pp. 23-33.
- Stern, Hawkins, (1962), The Significance of Impulse Buying Today, *Journal of Marketing*. Apr; 26,000002/ABI/INFORM Global pp. 59.

KINERJA FISKAL DAERAH: KASUS KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA¹

Jaka Sriyana
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Email: jakasriyana@fe.uui.ac.id

Abstract

The fiscal decentralization policy in Indonesia since 1999 failed to increase local government's fiscal capacity. Although it increases the local government role in planning development, but its impact on local economic performance is not yet significant. It was hypothesized that fiscal performance played an important role to this failure. This paper attempts to analyze fiscal performance, especially fiscal efficiency in among five local governments in Yogyakarta province. It applies Data Envelopment Analysis (DEA) to identify the level of fiscal efficiency in these districts. The result show that there is a significant fiscal efficiency disparity among districts in Yogyakarta Province. Yogyakarta city has a highest relative efficiency in the period of 2007-2009 comparing to other districts. It implies that all districts should refer to Yogyakarta city to improve their fiscal efficiency.

Keywords : decentralization, fiscal, government, efficiency.

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak sepuluh tahun yang lalu memiliki dua dimensi, yaitu dimensi politik dan dimensi ekonomi. Dimensi politik ditandai dengan semakin kuatnya kewenangan daerah dalam menentukan berbagai kebijakan di daerah, sedangkan dimensi ekonomi ditandai dengan adanya kebijakan transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja fiskal di daerah. Kebijakan otonomi daerah, sesuai dengan UU 32/2004 dan UU 33/2004, pada dasarnya bertujuan untuk (i) menyalurkan ketahanan fiskal yang berkesinambungan (*fiscal sustainability*) dalam konteks kebijakan ekonomi makro, (ii) memperkecil ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical imbalance*), (iii) mengoreksi ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangan (*horizontal imbalance*), (iv) meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah, (v) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta (vi) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik (demokratisasi).

Evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah sejauh ini menunjukkan berbagai masalah yang muncul, yaitu masih dominannya faktor non ekonomi dalam penentuan dana transfer, belum terciptanya pemerataan alokasi DAU kepada daerah, terciptanya disparitas kapasitas fiskal antara kota dan kabupaten (Salam, 2005). Mengingat bahwa dana transfer merupakan porsi terbesar dari pendapatan daerah, maka besaran dana tersebut akan sangat menentukan capaian hasil pembangunan.

Evaluasi terhadap kebijakan desentralisasi di Indonesia menjelaskan bahwa pelaksanaan bantuan pemerintah pusat kepada daerah dalam bentuk block grant belum mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan pemerataan kapasitas fiskal antar daerah sehingga akan berdampak pada tercapainya kinerja pembangunan di daerah. Hal ini disebabkan oleh, pertama, adanya faktor politik yang sangat dominan dalam

¹ Penelitian ini terlaksana atas biaya dari skim Penelitian Strategis Nasional, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DP2M), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010.

penentuan transfer fiskal. Kedua, besaran dana transfer tidak maupu mengatasi kebutuhan belanja daerah (fiscal needs) (Haris, 2005; Hoffman, et.al., 2006)

Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan belanja daerah ditengarai sebagai akibat tingginya pertambahan jumlah penduduk serta terjadinya transisi demografi di daerah yang berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk tidak produktif. Permasalahan transisi demografi bersifat alamiah dan akan terjadi di semua negara yang mengalami perubahan karakteristik demografi sebagai akibat kemajuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk besar, juga akan menghadapi masalah ini. Penurunan jumlah penduduk usia produktif akan berdampak kepada tingginya ketergantungan ekonomi penduduk dan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi.

Pelambatan laju pertumbuhan ekonomi terjadi ketika *supply* tenaga kerja berkurang sebagai akibat penurunan relatif jumlah penduduk usia produktif. Penurunan *supply* tenaga kerja, dengan asumsi tingkat produktifitas konstan, akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan pula pajak. Penurunan pajak ini akan menurunkan penerimaan pemerintah. Tetapi pada sisi pengeluaran, pemerintah daerah memerlukan belanja daerah yang lebih besar sebagai akibat proses transisi demografi tersebut. Dampak berikutnya adalah menurunnya kinerja fiskal daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.

Desentralisasi pada dasarnya adalah penataan mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi daerahnya, keinginan masyarakat di daerah masing-masing dibandingkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat merealisasikan pendapatan yang mereka punya dengan membelanjakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Oleh karenanya pelaksanaan otonomi daerah banyak dimaknai oleh pemerintah daerah dengan berlomba-lomba meningkatkan sumber penerimaan tanpa memperhitungkan berbagai kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkannya seperti penurunan tingkat pendapatan dan karenanya kesejahteraan petani dan unit kegiatan masyarakat, menurunnya minat investor untuk melakukan investasi di sektor-sektor tertentu karena banyaknya biaya yang harus ditanggung, degradasi kualitas lingkungan hidup, dan sebagainya.

Berbagai kebijakan pemerintah pusat telah mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan kapasitas fiskalnya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah. Seringkali upaya optimalisasi penerimaan ini tidak diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan pencapaian kinerja pembangunan daerah sehingga justru menimbulkan ketidakefisienan pengelolaan fiskalnya. Misalnya, pengaruh penambahan suatu jenis pajak dan retribusi baru terhadap sektor riil. Artinya, diperlukan sensitivitas yang tinggi dari pemerintah daerah dalam semua upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masing-masing. Dampak berikutnya adalah justru terjadi pemborosan dan memburuknya kinerja pengelolaan fiskal daerah.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu provinsi yang memiliki jumlah kota/kabupaten relatif sedikit juga menghadapi masalah yang tidak berbeda, yaitu semakin menurunnya kemampuan untuk membiayai program-program pembangunan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja fiskal, khususnya pada aspek efisiensi fiskal di kota dan kabupaten di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. KAJIAN TEORITIS DAN STUDI TERKAIT

Desentralisasi dapat diartikan sebagai suatu transfer tanggung jawab atau penyerahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah di daerah bawahannya. Mengenai desentralisasi fiskal ada beberapa pendapat yang berbeda dalam melaksanakan fungsi, tanggung jawab dan penyediaan sumber keuangan daerah. *Pendapat pertama*, menyatakan bahwa kemampuan daerah dalam melaksanakan fungsinya tergantung pada kemampuan daerah dalam menggali sumber penerimaan yang independen, seperti dana yang berasal dari pajak dan retribusi, karena semakin besar menggali sumber penerimaannya akan memperkecil pengawasan pusat. *Pendapat kedua*, menyatakan bahwa hubungan ketergantungan daerah atas dana dari pusat dengan keleluasaan daerah atas pengeluaran-pengeluaran daerah adalah tidak langsung. Pemerintah daerah harus mempunyai

sumber pendapatan yang elastis, tidak tergantung dari asal dana tersebut dan memiliki keleluasaan terutama dalam menggunakan dana tersebut. Desentralisasi mengenai kewenangan pemerintahan menyangkut berbagai aspek misalnya bidang politik, urusan pemerintahan, sosial dan pembangunan ekonomi dan aspek fiskal (Ananda, 2002).

Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan, desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (UU No. 33 Pasal 1). Definisi tersebut menunjukkan wewenang Pemda dalam mengelola keuangan dan anggaran daerahnya yang disebut dengan kebijakan Desentralisasi Fiskal. Kebijakan tersebut banyak dipergunakan di Negara-negara Sedang Berkembang untuk menghindari ketidak-efektifan dan ketidak-efisienan pemerintahan, ketidakstabilan ekonomi makro, dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi (Bahl dan Linn, 1992).

Dengan berlakunya UU otonomi daerah No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat-daerah, maka pemerintah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan dalam rangka meningkatkan derajat otonomi fiskal daerahnya. Sehingga, semakin tinggi derajat otonomi fiskal suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Derajat otonomi fiskal daerah merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan daerah dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat otonomi fiskal daerah ini diukur dengan menggunakan rasio antara pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin besar derajat otonomi fiskal daerah maka akan semakin besar kemampuan daerah untuk melakukan kebijakan di daerahnya.

Kebijakan daerah merupakan tatanan keseluruhan atas perangkat kelembagaan dan kebijakan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan pembelanjaan daerah (APBD). Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (atau pendapatan) di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang. Sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, berbagai kebijaksanaan keuangan daerah yang diambil, diarahkan agar pemerintah daerah dapat semakin meningkatkan kemampuannya dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya (Suparmoko, 2002).

Daerah sebagai badan hukum mempunyai otonomi dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana daerah membutuhkan sumber-sumber pendapatan sebagai kekayaan untuk membiayai pembangunan daerah. Dalam usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah tersebut, diupayakan dengan berbagai cara, yaitu dengan berpedoman pada peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Adapun sumber penerimaan daerah dapat dilihat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan daerah yang dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah; penerimaan pinjaman daerah; dana cadangan daerah; dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Implikasi langsung dari fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk membiayai tugas yang menjadi tanggung jawabnya tersebut, kepada daerah diberikan sumber-sumber pembiayaan, baik melalui pemberian kewenangan dalam pemungutan pajak/retribusi, sistem transfer, dan pemberian kewenangan untuk melakukan pinjaman. Sistem pembiayaan tersebut merupakan langkah maju bila dibandingkan dengan pengaturan-pengaturan yang selama ini berlaku. Peranan pemerintah dapat dikaji dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan instrumen kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan. Instrumen ini diharapkan berfungsi sebagai salah satu komponen pemicu tumbuhnya perekonomian daerah. Pemahaman akan betapa pentingnya peran anggaran sebagai salah satu instrumen kebijakan yang berfungsi memacu perekonomian

suatu daerah harus berhadapan dengan kondisi di lapangan yang tidak dapat menjamin berjalannya fungsi tersebut dengan baik. Besar kecilnya pengeluaran pembangunan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah akan menentukan besarnya pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah.

Selain beberapa hal tersebut, praktek pemerintahan dan pembangunan nasional adalah penyempitan ruang ekonomi menjadi ruang administrasi yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Setiap daerah berlomba-lomba mengeluarkan regulasi untuk meningkatkan pendapatan daerahnya tanpa memperhitungkan konsekuensinya bagi daerah lain. Secara langsung, tipikal regulasi yang demikian telah membatasi transaksi ekonomi lintas batas, bahkan di dalam lingkup wilayah yang sebenarnya saling tergantung satu sama lain. Praktek yang demikian sekaligus mengingkari bingkai besar dalam pembangunan nasional yang seharusnya berada dalam payung negara kesatuan. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa implementasi otonomi telah diiringi oleh pembentukan "negara-negara boneka" di dalam negara kesatuan. Oleh karenanya daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja fiskalnya, khususnya dalam aspek efisiensi alokasi anggaran (Tarigan, 2005).

Efisiensi adalah perbandingan output terhadap input, atau jumlah output per unit input (jumlah output/unit input). Dalam banyak pusat pertanggungjawaban, efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya-biaya aktual dengan standar dimana biaya-biaya tersebut harus diukur dengan output yang terukur. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Suatu aktivitas dapat dikatakan efisien apabila dapat memperoleh hasil yang sama dengan aktivitas lain tetapi sumber daya yang digunakan lebih sedikit. Tingkat efisiensi diukur dengan indikator yang dihitung dari rasio antara nilai tambah (*value added*) dengan nilai output. Ini berarti semakin tinggi nilai rasio tersebut semakin tinggi tingkat efisiensinya, karena semakin rendah biaya input yang diperlukan untuk menghasilkan suatu unit output.

Sebuah organisasi atau perusahaan dikatakan efisiensi bila dapat hasilkan lebih banyak output dengan sejumlah input yang sama atau dengan menurunkan penggunaan input dapat dihasilkan output yang sama. Konsep dan pengertian efisiensi diatas dikemukakan oleh Pareto dan Koopmans (1950), Farel (1957), Kopp(1981), Koop & Diewart (1982), seperti dikemukakan dalam Rustam (2005). Berbagai pendapat tersebut menyimpulkan adanya respon antara perencanaan dengan nilai input serta nilai output itu sendiri dipasar. Jumlah output yang sama dapat dihasilkan dengan menggunakan input yang lebih sedikit, akan tetapi output yang kita hasilkan ternyata lebih mahal harganya dipasar dibanding output yang sama dihasilkan pesaing. Permasalahan mahalnya harga jual produk padahal dengan komposisi input yang semakin berkurang dapat disebabkan diantaranya; penurunan penggunaan input karena keterpaksaan, disebabkan harga input yang semakin mahal.

Sumiyarti dan Imamy (2005) menganalisis pengaruh ketergantungan fiskal pusat-daerah yang tercermin dari dana perimbangan terhadap kemajuan ekonomi dan juga bagaimana pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja sebagai cerminan dari sumber daya yang dimiliki oleh daerah terhadap kemajuan ekonomi daerah kota Depok. Dari hasil analisis menunjukkan : (1) Variabel PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan PDRB Kota Depok. Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwa variabel PAD diduga berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB Kota Depok. Kecilnya kontribusi PAD dalam penerimaan APBD telah menyebabkan pengaruh variabel PAD terhadap PDRB menjadi tidak berarti; (2) Variabel Dana Perimbangan mempengaruhi PDRB Kota Depok secara positif dan signifikan. Hasil pengujian ini sesuai dengan hipotesis bahwa semakin tinggi tingkat Penerimaan Dana Perimbangan, maka semakin meningkat PDRB Kota Depok.; (3) Tenaga kerja mempengaruhi PDRB Kota Depok secara positif dan signifikan.

Kurnia (2005) menemukan bahwa efisiensi fiskal dalam pengeluaran belanja pemerintah daerah dipengaruhi oleh kesesuaian pengeluaran belanja dengan preferensi masyarakat. Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, efisiensi alokasi bisa karena sumber daya yang ada dialokasikan diantara berbagai jenis pengeluaran belanja yang sesuai dengan preferensi masyarakat daerah. Pengukuran efisiensi alokasi ini tidak bisa dilakukan secara langsung karena ukuran preferensi marginal masyarakat sulit untuk diketahui. Efisiensi fiskal menyangkut pula aspek sumber penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran belanja pemerintah daerah. Efisiensi fiskal dalam kaitannya dengan sumber penerimaan ini ditentukan oleh tiga hal : (1) apakah pajak dan retribusi daerah yang dipungut merupakan pajak yang tepat dalam artian bahwa pajak dan retribusi daerah

yang dipungut dari objek pajak tertentu langsung terkait dengan target-target pengeluaran tertentu pula; (2) Dana perimbangan (transfer pemerintah pusat) seharusnya ditujukan untuk penyesuaian-penyesuaian karena adanya eksternalitas tanpa mengganggu kepentingan pemerintah daerah; (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya tidak menyebabkan tekanan dan dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi regional.

Sebayang (2005) melakukan studi tentang kinerja fiskal daerah pasca krisis ekonomi 1997. Dalam penelitian ini, digunakan *Data Envelopment Analysis (DEA)*. Pengembangannya didasarkan pada programasi linear pada pengukuran kinerja relatif antar Unit Kegiatan Ekonomi (UKE). Pengukuran kinerja kebijakan fiskal daerah pada studi ini menggunakan lima variabel (DAU, Belanja Rutin, Pengeluaran untuk Transportasi, Pajak, dan Retribusi). Wilayah yang diamati mencakup 26 propinsi pada empat periode (1999-2002), dan melibatkan banyak wilayah yang mempunyai kapasitas yang berbeda, khususnya perbedaan kapasitas fiskal. Untuk itu, dilakukan penghitungan nilai riil dengan membagi setiap variabel dengan inflasi (*deflator*). Variabel-variabel dalam nilai riil ini dianggap akan lebih mewakili perilaku daerah sebenarnya. Kriteria efisiensi pada suatu UKE terkait dengan tujuannya. UKE yang berorientasi pada laba akan berbeda tujuannya dengan UKE yang berorientasi pada maksimasi utilitas (sektor publik). Pengukuran kinerja kebijakan fiskal juga memiliki ciri yang spesifik. Pada sektor publik mengatasi sumber inefisiensi tidak bisa sefleksibel sektor swasta. Banyak variabel sudah bersifat "given", misalnya anggaran daerah biasanya sudah tertentu dan sulit diintervensi. Informasi inefisiensi dapat digunakan pada pola anggaran berikutnya dengan berbagai pertimbangan.

Dari studi tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua wilayah yang mencapai efisiensi terbaik yakni DKI Jakarta dan Jawa Timur. Kedua wilayah ini dikategorikan sebagai wilayah yang mampu memanfaatkan sumber daya keuangan daerah dengan optimal. Dengan catatan, tolak ukur keberhasilannya adalah kemampuan mengotimalkan penerimaan pajak dan retribusi. Ada juga wilayah yang mencapai efisiensi yang baik, namun tidak konsisten seperti wilayah: Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Wilayah-wilayah yang memiliki konflik internal juga cenderung memiliki efisiensi yang rendah. Daerah itu adalah: Papua, Maluku, Kalimantan Tengah dan Nangro Aceh Darussalam (NAD). Keempat wilayah ini teridentifikasi sebagai wilayah yang mencapai efisiensi terendah pada periode pengamatan. Kondisi ini cukup memprihatinkan mengingat pajak dan retribusi merupakan sumber penting terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kesenjangan pencapaian efisiensi kebijakan fiskal ini juga merupakan gambaran kesenjangan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan kesenjangan sumber daya wilayah. Ini dapat dilihat dari identifikasi sumber inefisiensi di masing-masing wilayah yang cukup beragam. Ada wilayah yang inefisien pada variabel input, namun banyak pula yang inefisiensi pada variabel output.

Kajian tersebut juga memberikan kesimpulan bahwa kapasitas fiskal daerah di Indonesia sangat bervariasi bahkan cenderung menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas fiskal antar daerah. Pada periode 1999-2002, wilayah yang mampu membiayai belanja rutin bersumber dari PAD hanya Jawa Timur dan Bali. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan sehingga diperlukan upaya lebih lanjut agar daerah mampu "membiayai" pengeluarannya. Dari perhitungan kinerja kebijakan fiskal menunjukkan adanya variasi bobot kinerja yang tinggi. Terdapat dua wilayah yang konsisten mencapai efisiensi tertinggi pada pungutan yakni DKI Jakarta dan Jawa Timur. Kedua daerah ini kemudian bisa mencapai referensi bagi daerah lain untuk peningkatan kinerja kebijakan fiskalnya. Dan mampu mencapai 100 persen efisiensi selama empat periode. Pada wilayah yang belum efisien memiliki sumber inefisiensi yang relatif beragam. Konsekuensinya, kebijakan untuk masing-masing daerah harus spesifik dengan tetap membandingkan terhadap perkembangan wilayah lain.

Pertiwi (2006), mengadakan penelitian tentang tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan tujuan untuk menganalisis besarnya tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada sektor pendidikan dan kesehatan. Metode yang digunakan pada analisis ini adalah menggunakan pendekatan non parametrik *Data Envelopment Analysis (DEA)* dengan menggunakan data 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 1999 dan 2002. Analisis ini dimaksudkan untuk pengukuran efisiensi belanja daerah yang melibatkan banyak input dan banyak output (*multi-input multi-output*). Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengeluaran pendidikan pada tahun 1999 di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah cenderung belum efisien. Tingkat efisiensi sempurna

(100%) hanya pada Kota Salatiga, sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya rata-rata tingkat efisiensinya dibawah 50%. Adapaun pada tahun 2002 tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan membaik, terjadi peningkatan walaupun peningkatan tersebut tidak banyak. Kota Surakarta merupakan kota yang tingkat efisiensi pengeluaran kesehatannya sempurna 100%, lalu kabupaten Karanganyar 68,84% dan untuk kabupaten/kota lainnya rata-rata tingkat efisiensi dibawah 50%.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan statistik non parametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan menggunakan data 5 kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2007 – 2009. Analisis ini dimaksudkan untuk pengukuran efisiensi pengelolaan fiskal daerah yang melibatkan beberapavariabl input dan output (*multi-input multi-output*).

Data-data dari variabel input yang terdiri dari komponen penerimaan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan pengeluaran daerah berupa Belanja Rutin serta Belanja Modal, bahwa DAU mempunyai peran yang sangat penting dalam menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal daerah kabupaten/kota. Tujuannya membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Sehingga transfer dana dari pemerintah pusat ini dapat di alokasikan untuk membiayai pengeluaran belanja rutin dan belanja modal. Komponen variabel output yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana dua komponen ini mempunyai peranan penting bagi perekonomian dan kapasitas fiskal daerah.

Selanjutnya, disusun pula dua variabel output yakni pajak dan retribusi daerah. Variabel ini dijadikan variabel output mengingat pentingnya peranan kedua penerimaan ini pada perekonomian dan kapasitas fiskal daerah. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan pada semua objek pajak seperti orang/badan, benda bergerak/tak bergerak. Retribusi Daerah, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran / pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata. Retribusi daerah terdiri dari pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi daerah, ijin peruntukan penggunaan tanah, dan lain-lain.

3.2. Metode Analisis

Analisis dengan metode DEA merupakan prosedur yang dirancang secara khusus untuk mengukur efisiensi relatif suatu unit kegiatan ekonomi yang menggunakan banyak input dan banyak output, dimana penggabungan input dan output tersebut tidak mungkin dilakukan. Efisiensi relatif adalah efisiensi suatu unit/organisasi dibanding dengan unit/organisasi lain dalam sekelompok unit/organisasi yang saling diperbandingkan yang menggunakan jenis input dan output yang sama.

Efisiensi relatif didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibagi total input tertimbang (*total weighted output/ total weighted input*). Inti dari DEA adalah menentukan bobot (*weights*) atau timbangan untuk setiap input dan output unit/organisasi. Bobot tersebut memiliki sifat; (1) tidak bernilai negatif, dan (2) bersifat universal, artinya setiap unit/organisasi dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya (*total weighted output/total weighted input*) dan rasio tersebut tidak boleh lebih dari 1 (*total weighted output/total weighted input* ≤ 1) atau 100%.

Analisis ini berasumsi bahwa setiap unit/organisasi akan memilih bobot yang memaksimalkan rasio efisiensinya (*maximize total weighted output/total weighted input*). Karena setiap unit/organisasi menggunakan kombinasi input yang berbeda untuk menghasilkan kombinasi output yang berbeda pula, maka setiap unit/organisasi akan memilih seperangkat bobot yang mencerminkan keragaman tersebut. Secara umum unit/organisasi akan

menetapkan bobot yang tinggi untuk input yang penggunaannya sedikit dan untuk output yang diproduksi dengan banyak. Bobot-bobot tersebut bukan merupakan nilai ekonomis dari input dan outputnya, melainkan sebagai penentu untuk memaksimalkan efisiensi dari suatu unit/organisasi.

Penggunaan teknik linear programming sangat perlu digunakan dalam analisis DEA. Andaikan kita akan membandingkan efisiensi dari sejumlah unit/organisasi, misalkan n . Setiap unit/organisasi menggunakan m jenis input untuk menghasilkan s jenis output. Sebagai contoh, $X_{ij} > 0$ merupakan jumlah input i yang digunakan oleh unit/organisasi j ; dan $Y_{rj} > 0$ merupakan jumlah output r yang dihasilkan oleh unit/organisasi j . Variabel keputusan dari kasus tersebut adalah bobot yang harus diberikan pada setiap input dan output oleh unit/organisasi k .

Misal v_{ik} adalah bobot yang diberikan pada input i oleh unit/organisasi k , dan u_{rk} adalah bobot yang diberikan pada output r oleh unit/organisasi k . Sehingga v_{ik} dan u_{rk} merupakan variabel keputusan, yaitu variabel yang nilainya akan ditentukan melalui literasi program linear. Diformulasikan sejumlah n program linear fraksional, satu formulasi program linear untuk setiap unit/organisasi di dalam sampel. Fungsi tujuan dari setiap program linear fraksional tersebut adalah rasio dari output tertimbang total dari unit/organisasi k dibagi dengan input tertimbang totalnya.

Formulasi fungsi tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Maksimumkan } Z_k = \frac{\sum_{r=1}^s u_{rk} \cdot Y_{rk}}{\sum_{i=1}^m v_{ik} \cdot X_{ik}} \dots\dots\dots(1)$$

Kriteria universalitas mensyaratkan DMU (*Decision Management Unit*) k untuk memilih bobot dengan batasan/kendala bahwa tidak ada unit/organisasi lain yang akan memiliki efisiensi lebih besar dari 1 atau 100% jika unit/organisasi lain tersebut menggunakan bobot yang dipilih oleh unit/organisasi k . Sehingga formulasi selanjutnya adalah :

$$\frac{\sum_{r=1}^s u_{rk} \cdot Y_{rj}}{\sum_{i=1}^m v_{ik} \cdot X_{ij}} \leq 1; j = 1, \dots, n \dots\dots\dots(2)$$

Bobot yang dipilih tidak boleh bernilai negatif :

$$U_{rk} \geq 0; r = 1, \dots, s \dots\dots\dots(3)$$

$$V_{ik} \geq 0; i = 1, \dots, m \dots\dots\dots(4)$$

Transformasi program linear, yang kita sebut dengan DEA sebagai berikut :

$$\text{Maksimumkan } Z_k = \sum_{r=1}^s u_{rk} \cdot Y_{rk} \dots\dots\dots(5)$$

Dengan batasan/kendala :

$$[p_{kj}] \quad \sum_{r=1}^s u_{rk} \cdot Y_{rj} - \sum_{i=1}^m v_{ik} \cdot X_{ij} \leq 0; j = 1, \dots, n \dots\dots\dots(6)$$

$$[q_k] \quad \sum_{i=1}^m v_{ik} \cdot X_{ik} = 1 \dots\dots\dots(7)$$

$$u_{rk} \geq 0; r = 1, \dots, s \dots\dots\dots(8)$$

$$v_{rk} \geq 0; i=1, \dots, m \dots\dots\dots (9)$$

Hasil analisis dari DEA memiliki beberapa nilai manajerial, yaitu (1) DEA akan menghasilkan nilai efisiensi untuk setiap unit/organisasi relatif terhadap unit/organisasi yang lain di dalam sampel. Angka efisiensi ini memungkinkan untuk mengenali unit/organisasi yang paling tidak/ kurang efisien; (2) Jika suatu unit/organisasi kurang efisien (efisien < 100%), DEA menunjukkan sejumlah unit/organisasi yang memiliki efisiensi sempurna (*efficient reference set*, efisiensi = 100 %) dan seperangkat angka pengganda (*multipliers*) yang dapat digunakan untuk menyusun strategi perbaikan. Informasi tersebut memungkinkan untuk membuat unit/organisasi yang menggunakan input lebih sedikit dan menghasilkan output paling tidak sama atau lebih banyak dibanding unit/organisasi yang tidak efisien, sehingga unit/organisasi hipotesis tersebut akan memiliki efisiensi yang sempurna jika menggunakan bobot input dan bobot output dari unit/organisasi yang tidak efisien. Pendekatan tersebut memberi arah strategis untuk meningkatkan efisiensi suatu unit/organisasi melalui pengenalan terhadap input yang terlalu banyak digunakan serta output produksinya terlalu rendah; (3) DEA menyediakan matriks efisiensi silang. Efisiensi silang unit/organisasi A terhadap unit/organisasi B merupakan rasio dari output tertimbang dibagi input tertimbang yang dihitung dengan menggunakan tingkat input dan output unit/organisasi A dan bobot input dan output unit/organisasi B. Analisis efisiensi silang dapat membantu untuk mengenali unit/organisasi yang efisien tetapi menggunakan kombinasi input dan menghasilkan kombinasi output yang sangat berbeda dengan unit/organisasi lain. Unit/organisasi tersebut sering disebut sebagai *maverick* (menyimpang, unik).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kuantitatif bertujuan mencari efisiensi relatif dari masing-masing daerah kota/kabupaten. Analisis ini mampu menunjukkan daerah mana yang efisien dalam satu aspek tertentu secara relatif dibanding daerah yang lain. Hal ini memungkinkan daerah yang belum efisien secara relatif dalam aspek tersebut untuk meningkatkan efisiensinya dengan menggunakan daerah yang lebih efisien sebagai rujukan. Analisis semacam ini dikenal dengan nama *Data Envelopment Analysis* (DEA).

4.1. Deskripsi Fiskal Daerah

Kondisi kemampuan fiskal daerah ditunjukkan oleh besarnya sumber-sumber pendapatan daerah. Ketergantungan fiskal sebagai indikator kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja dapat dilihat dari besarnya rasio DAU terhadap belanja daerah. Indikator lain atas kemampuan fiskal daerah diperoleh dari rasio antara PAD terhadap belanja daerah, dikenal sebagai kemandirian fiskal.

Data-data Kemandirian Fiskal, dan Ketergantungan Fiskal yang berasal dari rata-rata Pendapatan asli Daerah (PAD), Belanja Total, Dana Alokasi Umum (DAU) periode 2007-2009 pada empat kabupaten dan kota di propinsi DI Yogyakarta ditampilkan pada Tabel 1. Data-data yang dianalisis diambil dari berbagai sumber, khususnya berbagai dokumen realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk semua kota dan kabupaten pada periode 2007-2009. Untuk melihat perbedaan kemandirian secara visual dapat diperhatikan Gambar 1. Data-data fiskal kabupaten/kota tersebut menunjukkan adanya variasi dalam kapasitas fiskal selama tahun 2007-2009 di provinsi DIY.

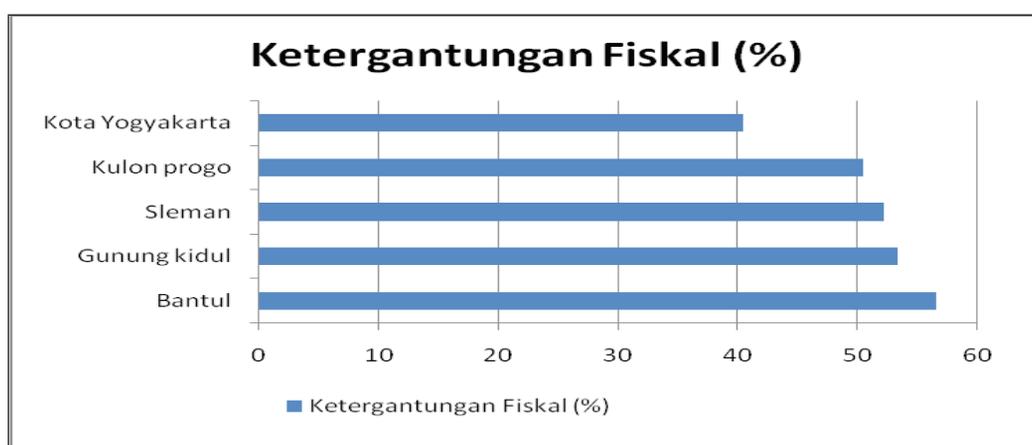
Dari analisis tentang ketergantungan fiskal ini dapat dikatakan bahwa secara umum, kota/kabupaten tersebut mempunyai rata-rata rasio ketergantungan fiskal 50,45%. Dengan demikian, sekitar 51% sumber pembelanjaan didapat dari sumber di luar daerah, khususnya dari pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah pusat dan pememrintah provinsi dalam bentuk transfer fiskal. Analisis secara lebih mendalam dapat dipakai untuk mengetahui penyebab angka ketergantungan tersebut. Beberapa sebab yang bisa dikemukakan adalah: (1) secara alamiah daerah tersebut memang tidak memiliki banyak sumber pendapatan, (2) efisiensi kinerja yang kurang baik sehingga mempertinggi tingkat pengeluaran, (3) daerah tersebut memiliki agenda pencapaian pembangunan yang terlalu tinggi, (4) terdapat ketidaksesuaian antara sumber alokasi dan jenis pengeluaran.

Tabel 1.
Rata-Rata Ketergantungan Fiskal Kota/Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2007-2009

No.	DIY	KMF(%)	KTF(%)
1.	Kota Yogyakarta	19,39	40,4
2.	Kulon progo	7,67	50,43
3.	Sleman	14,83	52,17
4.	Gunung kidul	5,92	53,28
5.	Bantul	8,08	56,52

Sumber: Data diolah dari Realisasi APBD, tahun 2007-2009.

KMF=Kemandirian Fiskal; KTF=Ketergantungan Fiskal.



Gambar 1.
Rata-Rata Ketergantungan Fiskal Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2007-2009

4.2. Hasil Analisis Kinerja Fiskal

Untuk melakukan analisis DEA, diperlukan data baik yang berfungsi sebagai data input maupun data output dalam proses analisis. Dalam analisis ini meneliti struktur pendapatan dan belanja pada kota/kabupaten. Sebagai variabel input adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Lag Belanja Tidak Langsung (LBTL), dan Lag Belanja Langsung (LBL). Yang menjadi variabel output adalah Pajak (PJK), Retribusi (RET) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun salah satu periode dari data-data yang digunakan untuk analisis efisiensi ditampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Input pada Analisis Efisiensi Fiskal Daerah

Kota/Kabupaten	Input			Output		
	DAU	LBTL	LBL	PJK	RET	PAD
Kulon Progo	201231000	410014180	245527981	27809500	17410319	288915470
Gunung Kidul	231438000	242261211	109883221	29191400	16866338	254859030
Kota Yogyakarta	318139000	643909250	334853679	47899850	24202491	916265030
Sleman	268325000	589511980	120484019	74395000	69174100	156013933
Bantul	308106000	452878610	134254894	26660000	10019834	190520190

Sumber: Data diolah dari Realisasi APBD, tahun 2007-2009.

Tabel 3.
Hasil Analisis Efisiensi Relatif

Kota/Kabupaten	Efisiensi	Grafik	
Kulon Progo	74 %		
Gunung Kidul	71.1 %		
Sleman	80.8 %		
Kota Yogyakarta	100 %		
Bantul	51.5 %		

Sumber: Hasil analisis.

Dari hasil analisis yang dipaparkan pada Tabel 3 tersebut bisa diketahui, bahwa kota Yogyakarta memiliki efisiensi tertinggi, yaitu 100%. Ini berarti bahwa kota tersebut bisa dijadikan rujukan (*references*) kabupaten yang lain untuk menjadi efisien. Dalam rangka menuju efisiensi, sebuah kabupaten/kota kadang-kadang harus merujuk ke lebih dari satu kabupaten/kota. Hasil analisis DEA memberikan nilai input yang harus digunakan dan hasil output yang diharapkan dengan merujuk ke kabupaten/kota yang lain. Oleh karena itu hasil tersebut juga memperlihatkan bahwa daerah yang lebih tinggi nilai efisiensinya dapat dijadikan referensi/rujukan bagi daerah lain untuk meningkatkan efisiensinya. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dapat dijadikan referensi oleh 3 kabupaten yang lain dalam rangka menuju efisiensi.

Tabel 4.
Penyesuaian Input dan Harapan Output untuk Mencapai Efisiensi

Daerah	DAU	LBTL	LBL	PJK	RET	PAD
Kulon Progo	Turun	Turun	Turun	Naik	Konstan	Naik
Gunung Kidul	Turun	Turun	Turun	Naik	Konstan	Naik
Kota Yogyakarta	Konstan	Konstan	Konstan	Konstan	Konstan	Konstan
Sleman	Turun	Turun	Turun	Naik	Konstan	Naik
Bantul	Turun	Turun	Turun	Naik	Konstan	Naik

Pembahasan lebih lanjut terhadap kota yang mencapai efisiensi sempurna, yakni kota Yogyakarta didapatkan bahwa kota tersebut memiliki angka kemandirian fiskal, yang dihitung sebagai rasio antara PAD dan Total Belanja yang tertinggi di antara semua kabupaten (Tabel 4). Kota Yogyakarta, yang memiliki angka kemandirian fiskal tertinggi dibanding kabupaten lainnya dan sekaligus memiliki efisiensi yang tertinggi pula. Kondisi ini mencerminkan hubungan yang selaras antara tingkata kapasitas dan kualitas tata kelola anggaran. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa peningkatan transfer dana dari pemerintah pusat berbentuk DAU tidak terlalu signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Dalam rangka mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi, empat kabupaten lain dapat merujuk pada kota Yogyakarta. Secara ringkas empat kabupaten tersebut dapat meningkatkan efisiensi tata kelola fiskalnya dengan menambah capaian output atau menurunkan penggunaan input. Seperti dipaparkan pada Tabel 4, peningkatan

efisiensi pada empat kabupaten sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal ini mengindikasikan rendahnya efisiensi terjadi pada sektor pencapaian tingkat penerimaan pajak daerah.

Berbagai faktor mungkin bisa menjadi penyebab rendahnya efisiensi tata kelola pencapaian pajak daerah, salah satu faktor yang mungkin adalah disebabkan oleh lemahnya kapasitas kelembagaan di daerah. Kemungkinan yang lain adalah bahwa transfer dari pemerintah pusat maupun dampak belanja pemerintah daerah terhadap capaian pajak dan retribusi memerlukan waktu (*time lag*) untuk membuahkan hasil yang signifikan. Hal ini sangat dimungkinkan, mengingat peranan jenis sumber dana dan jenis alokasi peruntukan belanja merupakan faktor yang sangat penting dalam analisis efisiensi belanja. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut yang perlu diagendakan adalah meneliti pengaruh time-lag atas dampak transfer dana pemerintah pusat ke perekonomian daerah.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, kewenangan daerah kota/kabupaten menjadi sangat luas, dan untuk menyelenggarakan kewenangannya itu diperlukan pembiayaan yang makin besar. Di lain pihak sumber keuangan daerah dalam hal ini Kota/Kabupaten di Provinsi D I Yogyakarta yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah masih terbatas dan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat masih cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan fiskal masih sangat tinggi. Dengan kata lain kemandirian fiskal masih rendah.

Pajak daerah yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan tambang golongan C dan pajak parkir, pajak parkir kendaraan bermotor, dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tanah. Pajak penerangan jalan umum (PPJU) secara nominal proporsinya paling besar, yaitu rata-rata untuk semua daerah lebih dari 90%. Penerimaan pendapatan asli daerah dari jenis pajak maupun retribusi mengalami pertumbuhan positif yang cukup signifikan tiap tahun. Tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi selama periode 2007-2009 relatif baik, dengan tingkat pencapaian hampir 100%.

Analisis kinerja fiskal yang diukur dari tingkat efisiensi menunjukkan adanya hasil yang sangat bervariasi di kota/kabupaten di provinsi DI Yogyakarta. Kota Yogyakarta menunjukkan kinerja fiskal yang relatif lebih baik dari kabupaten lainnya. Oleh karena itu perlu adanya berbagai usaha untuk meningkatkan tingkat efisiensi fiskal di semua kabupaten di provinsi DI Yogyakarta.

5.2. Implikasi Temuan Penelitian

Hasil temuan penelitian ini memberikan rekomendasi perlunya peningkatan kapasitas fiskal serta peningkatan efisiensi pengelolannya di kota/kabupaten di provinsi DI Yogyakarta. Kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi perlu dilakukan dengan upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan. Dalam rangka peningkatan cakupan, perlu dideteksi kemungkinan adanya kebocoran dan mengevaluasi kembali besarnya penetapan serta estimasi terhadap besarnya potensi. Peningkatan cakupan dapat pula dilakukan dengan mengurangi besarnya tunggakan. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap tunggakan rekening, kemudian diambil langkah-langkah kongkrit untuk mengurangi tunggakan yang ada maupun mencegah terjadinya tunggakan baru.

Bentuk-bentuk usaha intensifikasi dapat ditempuh dengan menganalisis permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menggali penerimaan pendapatan asli daerah serta memformulasikan kembali perhitungan nilai pajak dan retribusi dari sektor-sektor penerimaan baik dari pajak daerah maupun dari retribusi daerah. Namun ada beberapa persoalan yang sering dihadapi oleh Pemerintah Daerah antara lain ketidakcukupan sumber daya finansial, minimnya jumlah pegawai yang memiliki ketrampilan dan keahlian, sistem pengendalian manajemen yang tidak memadai, rendahnya produktivitas pegawai, inefisiensi, infrastruktur yang kurang mendukung, lemahnya perangkat hukum dan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum, budaya *rent seeking behaviour* serta

lemahnya akuntabilitas publik. Pendekatan yang paling mudah dilakukan untuk usaha intensifikasi ini adalah menghitung kembali secara riil potensi PAD yang dimiliki, melakukan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah, menjadikan pajak bumi dan bangunan sebagai pajak daerah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, memperbaiki sistem perpajakan daerah, dan optimalisasi peran BUMD.

Evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah diperlukan, karena masih banyak yang beranggapan bahwa otonomi daerah berarti pemerintah daerah harus mencukupi kebutuhan daerahnya dengan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri. Harus dipahami bahwa otonomi daerah tidak berarti eksploitasi daerah untuk menghasilkan PAD setinggi-tingginya. Jika otonomi diartikan sebagai eksploitasi PAD, maka justru masyarakat daerahlah yang terbebani. Maksimalisasi PAD akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Adanya fakta kesenjangan efisiensi pengelolaan anggaran antar kota/kabupaten memerlukan berbagai kebijakan dari pemerintah provinsi, yaitu kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya pengelola serta kebijakan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi. Untuk itu perlu dilakukan kebijakan khusus dalam hal peningkatan kapasitas (*capacity building*) pengelolaan alokasi anggaran pada kabupaten yang memiliki efisiensi relatif lebih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, C.A., (2002), *Problems of The Implementation of Fiscal Decentralization in Regional Autonomy : The Case of Malang Municipality and Trenggalek District*, Laporan Penelitian, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Bahl, R., and Linn, J., (1992), *Urban Public Finance in Developing Countries*, New York: Oxford University Press.
- Biro Pusat Statistik, (2009), *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta*, BPS, Jakarta.
- Biro Pusat Statistik, (2009), *DI Yogyakarta Dalam Angka*. Yogyakarta.
- Haris, S., (2005), "Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah", LIPI Press, Anggota IKAPI, Jakarta.
- Hofman, B., Kadjatmiko, Kaiser, K., dan Sjahrir, B.S., (2006), "Evaluating Fiscal Equalization in Indonesia", *World Bank Policy Research Working Paper 3911*, May.
- Kurnia, A. S., (2006), "Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik Metode Free Disposable Hull (FDH)", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 11, No. 1, hlm. 1-20
- Pertiwi, Lela Dina., (2006), *Efisiensi Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan : Studi Kasus di Jawa Tengah Tahun 1999 dan 2002*, Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. (Tidak dipublikasikan).
- Salam, A., (2005), "Menimbang Kembali Kebijakan Otonomi Daerah", LIPI Press, Anggota IKAPI, Jakarta.
- Sebayang, A. F., (2005), "Kinerja Kebijakan Fiskal Daerah di Indonesia Pasca Krisis", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 10, No. 3, hlm. 203-214
- Sumiyarti dan Imamy, A. F., (2005), "Analisis Pengaruh Perimbangan Pusat-Daerah Terhadap Perekonomian Kota Depok", *Media Ekonomi*, Vol 11, No. 2, hlm. 113-128
- Suparmoko, (2002), *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Rustam, R., (2005), "Analisis Efisiensi Teknis Bank Devisa Nasional Dengan Menggunakan Metode Non Parametrik : Data Envelopment Analysis (DEA)", *Media Ekonomi*, Vol 11, No. 2, hlm. 173-188
- Tarigan, A., (2005), "Urgensi Penguatan Keuangan Daerah, Suatu Tinjauan Terhadap Regulasi Daerah dan Implikasinya dalam Penyediaan Pelayanan Publik", *Perencanaan Pembangunan*, Edisi 04/IX/Jul-Sept, BPFE, UGM, Yogyakarta.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KEGIATAN EKONOMI DI PROVINSI ACEH

Abubakar Hamzah
Universitas Syiah Kuala

Susanti
Universitas Syiah Kuala,

Sofyan Syahnur
Universitas Syiah Kuala

Abstract

Gender equality of income is an interesting topic to analyse in line with the participation of women and male workers in the economic activities. In 2010, the proportion of 547205 workers in Aceh Province consisted of male and female workers amounted to 66.08 percent and 33.92 percent, respectively (SAKERNAS, 2010). This research investigates the factors that affect earnings of men and women in economic activities in the province. The data used is the National Labor Force Survey (SAKERNAS) in 2010 and examined by the Multiple Classification Analysis (MCA). The result of the research shows that the characteristics of labor have a significant relationship and affect on the gender equality of income. To increase income, the gender equality issues should be more focused by the government relating to the rural region empowerment activities and training and educational assistance subsidy.

Keywords: *Income, Characteristics of workers, Gender Equality, MCA, Aceh Province*

1. PENDAHULUAN

Jumlah penduduk dunia berjumlah 6,81 miliar, lebih dari separuhnya berjenis kelamin perempuan (UNDP, 2009). Indonesia menempati urutan keempat yang memiliki jumlah penduduk terbesar dunia yaitu 243,3 juta jiwa setelah AS, India serta China. Pertumbuhan jumlah penduduk perempuan berjumlah 5 persen lebih banyak dari penduduk laki-laki (BPS, 2009). Meskipun, pertumbuhannya yang lebih tinggi daripada laki-laki, ketertinggalan perempuan di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi telah menggambarkan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terindikasi dari penduduk perempuan dewasa (15 tahun keatas) dunia yang turut beraktivitas secara ekonomi hanya 52,5 persen, jauh lebih rendah daripada penduduk laki-laki berjumlah 67 persen. Dan di negara-negara berkembang tercatat 52,4 persen adalah perempuan dan laki-laki 64 persen. Di negara-negara Asia Selatan hanya 36,2 persen dengan rasio perempuan terhadap laki-laki 44 persen. Sedangkan di Indonesia 51 persen dengan rasio perempuan terhadap laki-laki 60 persen (UNDP, 2007).

Lebih spesifik, pekerja tidak dibayar merupakan salah satu karakteristik pekerja perempuan dalam kegiatan ekonomi, meskipun pekerja yang dibayar semakin bertambah. Pada tahun 2006 diperkirakan sebanyak 1,2 milyar pekerja adalah perempuan dari 2,9 milyar pekerja. Karakteristik lainnya, produktivitasnya dianggap masih rendah, banyak berkulat pada sektor pertanian dan jasa atau menerima upah yang lebih rendah daripada laki-laki (ILO, 2007; UNDP, 2007; Hayghe, 2007; Ruhayat, 2000; Glendoh, 2000). Namun, tingkat partisipasi angkatan kerja

perempuan, khususnya pekerja dibayar, terus meningkat (Acharya and Bennett, 1983; Bruce and Dwyer, 1988; Desai and Jain, 1994; Dreze and Sen, 1989; Folbre et al., 1991; Kishore, 1996; Sen, 1990).

Merujuk pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain (Bellante dan Jackson, 1983; Samuelson, 1987; Kementerian Negara PP, 2000). Lebih lanjut pemerintah dan legislatif telah mengesahkan UU No. 9 tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kedudukan perempuan Indonesia. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh World Economic Forum (2008) mengenai Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indonesia menduduki peringkat 93 dari 134 negara. Indonesia hanya lebih unggul sedikit dibandingkan Malaysia (no101) dan Kamboja (no104).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Selama kurun waktu 2005-2008, IPM dan IPG Indonesia meningkat, namun kesenjangan relatif tetap pada 4,8 point pada tahun 2005 dan hanya mengalami sedikit penurunan 0,1 point yaitu menjadi 4,79 di tahun 2008. Peningkatan IPM dan IPG ini sangat berkaitan dengan semakin besarnya akses perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

Secara umum kondisi keterbelakangan perempuan di tingkat nasional tidak jauh berbeda dengan kondisi di tingkat provinsi, khususnya di provinsi Aceh. Jumlah penduduk Provinsi Aceh pada tahun 2009 tercatat mencapai 4.363.477 jiwa terdiri dari penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.200.000 jiwa dan laki-laki sebesar 2.171,39 jiwa. Walaupun pertumbuhan penduduk semakin meningkat setiap tahunnya, peningkatan penduduk perempuan tetap lebih banyak dibandingkan pertumbuhan penduduk laki-laki. Peningkatan penduduk perempuan dan laki-laki rata-rata mencapai 1,95 % per tahun, berbeda dengan tahun 2005 jumlah penduduk di Aceh mengalami penurunan mencapai 1,25 %. Penurunan jumlah penduduk ini disebabkan banyaknya korban meninggal dunia akibat bencana Tsunami yang melanda Provinsi Aceh pada tanggal 26 desember 2004.

Pemerintah daerah dalam membangun potensi perempuan melaksanakan berbagai macam program diantaranya adalah Kota Ramah Gender (KRG) merupakan istilah yang dicanangkan oleh pemerintah kota Banda Aceh untuk merespon dan mempercepat pembangunan pemberdayaan perempuan. Dalam kebijakan tersebut digambarkan bahwa KRG merupakan upaya pemerintahan kota Banda Aceh untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Perempuan dan Anak dalam kerangka hukum ke dalam definisi operasional, strategi, dan intervensi pembangunan, seperti kebijakan, institusi, dan program yang ramah gender. KRG dimaksudkan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat terutama kepentingan perempuan dan anak. Selama periode tahun 2004-2007, IPM Provinsi Aceh tahun 2004 sebesar 68,7 dan tahun berikutnya 69,0 (2005), 69,4 (2006), dan 70,35 (2007), sedangkan IPG Provinsi Aceh mengalami peningkatan yaitu 59,3 (2004), 59,6 (2005), 62,8 (2006) dan 63,9 (2007). Perubahan peningkatan ini juga disebabkan oleh adanya peningkatan IPG di setiap kabupatennya. Pada tahun 2007 IPG tertinggi adalah kabupaten Bireun sebesar 68,8 sedangkan terendah kabupaten Simeulue sebesar 55,1. Secara umum bila nilai IPM dibandingkan dengan nilai IPG, maka rata-rata IPM lebih besar 7,5 point dibandingkan dengan nilai IPG.

Penelitian ini akan lebih memfokuskan pada sisi penawaran tenaga kerja perempuan dan laki-laki di Provinsi Aceh yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam dunia ketenagakerjaan di Provinsi Aceh dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapatan pekerja laki-laki maupun perempuan di propinsi Aceh. Penelitian ini diklasifikasikan dalam lima bagian; pertama, pemaparan permasalahan penelitian; kedua, memaparkan beberapa studi terkait/penelitian sebelumnya; ketiga, metode penelitian; keempat, hasil dan pembahasan; dan kelima, kesimpulan.

2. STUDI TERKAIT/SEBELUMNYA

Upah merupakan balas jasa yang diterima rumah tangga atas penyerahan dan pemanfaatan faktor produksi untuk proses produksi. Upah yang diberikan dapat berbentuk uang, barang, atau fasilitas umum. Pemberian upah ini dimaksudkan agar tenaga kerja tersebut memperoleh penghidupan yang layak. Beberapa teori upah yang dikenal antara lain teori upah subsisten, teori dana upah, teori produktivitas marjinal, teori perundingan, teori daya beli, teori upah nilai lebih dan pemerasan, teori upah etika, dan teori upah sosial (Ruhayat, 2000; Glendoh, 2000).

Pissarides (2000) dalam Hertweck (2007) dalam upah *The Bargaining Set*, mengemukakan bahwa upah per pekerja ditentukan secara bersama-sama (*respectively*) oleh rumahtangga dan perusahaan. Secara lebih spesifik Martin (2005) membuat model persamaan upah pekerja menggunakan variabel sumberdaya manusia dan variabel pasar kerja, atau *W* merupakan fungsi dari Human, market. *W* juga merupakan fungsi dari *Education, Age, Duration of current employment, Birthplace, Family responsibilities, Health, Gender, Type of shift worked, Casual or permanent contract, Location of facility, Size of facility, Facility ownership*.

Lebih lanjut, Teori Neo Klasik menjelaskan tentang pembagian kerja seksual, menekankan perbedaan seksual di dalam berbagai variabel yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Perbedaan-perbedaan itu antara lain meliputi tanggung jawab rumah tangga, kekuatan fisik, pendidikan, keterampilan, lamanya jam kerja, jenis pekerjaan, dan sektor pekerjaan (Gupta, 2002; Balakrishnan, 2002; Anker, 1997).

Akinbobola (2009) menggunakan model MCA untuk menganalisis efektivitas sistem belajar dengan variabel kontrol jenis kelamin. Selanjutnya, Lolle (2007) menggunakan MCA sebagai model yang digunakan untuk menganalisis efikasi politik (Y) di Denmark. MCA digunakannya karena lebih efektif menjelaskan variabel dependen daripada model OLS (*Ordinary Least Squares*) yang agak bias dengan harus memenuhi berbagai asumsi regresi. Sedangkan MCA lebih stabil karena dapat menjelaskan variabel dependen dari berbagai jenis data ordinal, nominal, interval, maupun rasio.

Pencari kerja yang berpendidikan tinggi berpeluang lebih besar mendapatkan gaji tinggi. Oleh sebab itu perempuan yang mempunyai pendidikan lebih tinggi berkeinginan lebih besar memperoleh pekerjaan atau berpartisipasi dalam dunia kerja. Di sisi lain pendidikan dan perilakunya (sebagai akibat dari pendidikan) akan memperkuat peluang perempuan dalam bekerja (Hore, 2005; Jaumotte, 2003). Jika perempuan meneruskan pendidikan berarti ia meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan mengharapkan pekerjaan yang dapat memperoleh upah lebih tinggi. Akibatnya ia mempunyai kapasitas lebih tinggi dan memperbesar peluangnya dalam pasar kerja (Leppel, 2005).

Pada usia 50-an kemungkinan partisipasi pekerja secara individu menurun (Fallick & Pingle, 2006). Pekerja muda (20-24 tahun) menerima gaji lebih rendah daripada pekerja yang lebih tua karena pengalaman dan keahlian masih sedikit. Namun antara pekerja laki-laki dan perempuan muda, perbedaan gaji yang diperoleh lebih kecil daripada pekerja usia lebih tua (Hayghe, 2007). Partisipasi kerja perempuan cenderung rendah pada usia muda. Kemudian seiring bertambahnya usia dan tingkat pendidikan, tenaga serta pengalaman, partisipasi kerja perempuan meningkat seperti huruf U terbalik. Disisi lain, pendapatan yang diperoleh bukan dari hasil kerjanya (misalkan dari pendapatan suami) dan adanya anak kecil atau bayi yang harus diasuh, kecenderungan perempuan untuk bekerja menurun (Arango & Posada, 2007).

Jumlah anak yang bersekolah merupakan respon atas meningkatnya jumlah perempuan yang masuk dalam dunia kerja. Peningkatan perempuan sebagai orangtua tunggal juga menyebabkan mereka harus bekerja untuk memperoleh penghasilan (Kipkorir and Njenga 1993; Myers 1992). Kemampuan perempuan untuk ambil bagian dalam kegiatan ekonomi tergantung pada akses pemeliharaan dan fasilitas anak. Perempuan yang menjadi orangtua tunggal khususnya, memerlukan fasilitas pemeliharaan anak yang baik. Hal itu mungkin menjadi faktor yang menurunkan perempuan bekerja paruh waktu dan pekerjaan kasar. Perempuan yang berkeluarga merasa lebih tenang jika suaminya bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Namun jika mereka bercerai dan anak ikut ibunya, maka perempuan tersebut berusaha mencari pendapatan dengan bekerja (Hore, 2005). Sebagai akibat yang tidak diinginkan dalam keluarga misalnya kehilangan pencari pendapatan, sementara meneruskan kehidupan

merupakan suatu kewajiban. Akhirnya, hal itu membuat perempuan terjun dalam dunia kerja. Demikian juga halnya jika terjadi penambahan anggota rumahtangga yang membuat beban hidup bertambah berat (Ruwanpura, 2004).

Status perkawinan dapat mengurangi peluang perempuan dalam kesempatan kerjanya, karena suaminya bekerja penuh waktu. Dengan demikian akan mengurangi peluang perempuan bekerja dan hanya bekerja paruh waktu. Disisi lain, jika mungkin suaminya mendukung istrinya bekerja penuh atau paruh waktu daripada isterinya menganggur (Leppel, 2005). Seseorang yang telah berstatus kawin/cerai harus meluangkan waktu untuk urusan rumahtangganya, seperti mengasuh anak, membersihkan rumah, dan sebagainya, sehingga waktu kerjanya dapat berkurang. Dengan demikian pendapatan yang diperoleh berkurang akibat waktu kerjanya terbagi untuk urusan rumahtangga (Bowles dan Park, 2004).

Model mobilitas tenaga kerja dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan atau dari sektor tradisional ke sektor modern di perkotaan (Lewis, 1953 dalam Ananta, 1988), menganggap bahwa pembangunan perdesaan mengalami kemacetan sehingga menimbulkan banyak pengangguran tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja sangat rendah bahkan mencapai minus. Di perkotaan seseorang berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja penuh, terdapat kesempatan untuk bekerja sebagai pekerja tak tetap, dan bahkan seandainya tak memperoleh pekerjaan di kedua-duanya, masih ada kesempatan untuk berusaha sendiri sebagai pedagang eceran, asongan, pengrajin, atau melakukan beberapa usaha yang lain.

Di negara-negara maju tingkat partisipasi perempuan lebih tinggi daripada negara-negara berkembang (Jaumotte, 2003). Pada umumnya wilayah perdesaan dengan kegiatan ekonomi tradisionalnya mempunyai peluang kerja yang lebih sempit daripada daerah perkotaan. Di perkotaan peluang kerja berbagai jenis pekerjaan lebih tersedia, sementara perempuan yang tinggal di perkotaan umumnya mempunyai bekal pendidikan yang lebih baik. Kebanyakan anak perempuan hanya dapat memperoleh pekerjaan dengan upah rendah seperti pembantu rumahtangga. Mereka berasal dari desa-desa yang mempunyai fasilitas minim dan lapangan pekerjaan terbatas (Ondimu, 2003).

Di Afrika Selatan partisipasi kerja perempuan cenderung meningkat pada periode 1995-2004 (Ntuli, 2007). Perempuan kulit putih partisipasinya lebih tinggi daripada ras lainnya. Faktor utama yang mempengaruhi partisipasi kerja perempuan adalah pendidikan. Pendapatan selain upah, status perkawinan, fertilitas, dan kondisi geografis merupakan faktor penentu lainnya.

Penelitian Lolle (2007) mengenai efikasi/kemampuan politik di Denmark menggunakan MCA dengan variabel independen jenis kelamin, umur, pendidikan, dan jenis pekerjaan. Kaum laki-laki mempunyai pengaruh lebih besar pada efikasi politik dibandingkan perempuan. Sementara semakin muda umur seseorang, pengaruhnya semakin kecil. Sedangkan pendidikan tinggi akan berpengaruh besar pada variabel dependen, serta jenis pekerjaan pimpinan (*white collar*) berpengaruh terbesar dibanding jenis pekerjaan lain terhadap efikasi politik.

Perempuan muda dari perdesaan banyak ditemukan bekerja sebagai pembantu rumahtangga di Kota Nairobi karena dibayar rendah. Mereka mempunyai pendidikan yang terbatas karena kesenjangan gender masih terjadi. Dengan demikian peluang kerjanya sangat terbatas pada sektor kerja tertentu. Disisi lain mereka juga kerap kali dieksploitasi secara ekonomi dan dilecehkan (Ondimu, 2003).

Model partisipasi angkatan kerja berdasarkan kohor pada perempuan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pada kelompok umur 16-24 tahun partisipasi perempuan meningkat perlahan pada tahun 1950-2000. Pada kelompok umur 25-34 tahun dan 34-44 tahun, partisipasi perempuan meningkat cepat pada periode tersebut. Kemudian meningkat perlahan pada perempuan usia 45-54 dan usia 55-64 tahun selama periode bersangkutan, serta pada usia 65 tahun keatas tidak berubah selama periode tersebut (Fallick & Pingle, 2006).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan analisis yaitu (1) analisis deskriptif dan (2) analisis inferensia. Pendekatan deskriptif ini lebih menekankan pada pentabulasian silang (*cross tabulation*) antarvariabel. Analisis ini digunakan untuk memperkuat analisis regresi antara peubah bebas dan peubah tidak bebas. Untuk mengetahui ketergantungan antara dua variabel akan digunakan uji ketergantungan dengan uji Pearson Chi-Square. Uji

ketergantungan dengan Likelihood Ratio juga ditampilkan, karena jumlah sampel yang besar, nilainya akan sama dengan Pearson Chi-Square (Santoso, 2001). Hipotesis nol (H_0) yang digunakan adalah tidak ada ketergantungan antara pendapatan pekerja dengan variabel bebas (pendidikan, usia, jam kerja, pengalaman kerja). Dengan tingkat keyakinan 95 persen ($\alpha = 5\%$), maka H_0 diterima jika nilai *Asymp. Sig. (2-sided)*, lebih besar dari 0,05 dan H_0 ditolak jika nilai *Asymp. Sig. (2-sided)* lebih kecil dari 0,05.

Besarnya hubungan antara dua buah variabel secara simetris atau tanpa menentukan salah satunya sebagai variabel bebas dan yang lainnya sebagai variabel tak bebas dapat diketahui dengan melakukan uji statistik. Dalam penelitian ini digunakan dengan statistik uji *Phi, Cramer's V dan Contingency Coefficient* (Santoso, 2001). Hipotesis nol (H_0) yang digunakan adalah tidak ada hubungan antara kedua variabel, dan hipotesis alternatifnya terdapat hubungan antara kedua variabel. Tingkat keyakinan yang digunakan 95 persen ($\alpha = 5\%$), maka H_0 diterima jika nilai *Asymp. Sig. (2-sided)*, lebih besar dari 0,05 dan H_0 ditolak jika nilai *Asymp. Sig. (2-sided)* lebih kecil dari 0,05.

Sedangkan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara pendapatan pekerja laki-laki dan pekerja perempuan, akan dilakukan uji kesamaan rata-rata menggunakan *t-test* dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 5\%$). Dengan hipotesis nol terdapat perbedaan antara pendapatan pekerja laki-laki dan pekerja perempuan, maka tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sebaliknya, jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka tidak tolak H_0 atau tidak terdapat perbedaan antara pendapatan pekerja laki-laki dan pekerja perempuan.

Multiple Classification Analysis (MCA) adalah metode analisis inferensia yang menggunakan uji statistik dan hampir mirip dengan analisis regresi dengan variabel *dummy*. MCA akan sangat tepat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara beberapa variabel bebas yang berskala katagori dengan sebuah variabel tidak bebas yang berskala numerik (Lolle, 2007:2). MCA memiliki kelebihan-kelebihan yaitu (1) MCA memiliki kemampuan untuk menunjukkan pengaruh masing-masing variabel bebas sebelum dan sesudah dikontrol oleh variabel bebas lain dan kovariat, (2) Pengaruh setiap variabel bebas dalam persamaan MCA dapat dinyatakan dalam bentuk nilai rata-rata keseluruhan dari variabel tidak bebas setelah mengontrol variabel-variabel lainnya. Sebab itu *adjusted mean score* atau angka rata-rata yang telah disesuaikan dapat dihitung dan akan lebih mudah menginterpretasikannya dari pada nilai atau koefisien beta yang dihasilkan melalui analisis regresi dengan variabel *dummy*. Karena untuk analisis regresi dengan *dummy variable*, harus dikeluarkan dari analisis salah satu katagori (katagori referen yang bernilai 0) ketika menyusun persamaan regresinya. Dengan demikian, pada katagori yang dihilangkan dari analisis regresi tidak akan diperoleh betanya, padahal koefisien-koefisien beta lainnya dinyatakan sebagai penyimpangan dari katagori yang dihilangkan. Sebaliknya, koefisien MCA dihitung untuk seluruh katagori pada variabel bebasnya, yaitu dalam bentuk variabel berskala nominal dan dinyatakan sebagai penyimpangan dari angka rata-ratanya, dan (3) MCA bebas dari pembatasan-pembatasan penggunaan skala ukuran untuk variabel bebasnya, artinya variabel bebas dapat berskala ukuran yang paling lemah (nominal), katagori, maupun interval (Andrews, 1969; Lolle, 2007).

Dalam tabel anova, statistik yang diperlukan untuk uji hipotesis adalah uji F dan signifikansinya atau α . Lebih lanjut, misalnya $\alpha < 0,05$ mendorong kita untuk menolak H_0 yang mengindikasikan bahwa paling tidak rata-rata dari satu katagori suatu faktor yang diteliti berbeda secara signifikan dari rata-rata keseluruhan (*grand mean*). Karena merupakan analisis lebih lanjut dari tabel anova, maka model yang digunakan adalah model aditif (model penambahan) yang dapat ditulis sebagai berikut (Andrews, 1969):

$$Y_{1...n} = m + \sum_{i=1}^n x_i + e_{1...n} \text{ dimana } x_i \text{ adalah variabel ke } 1, \dots, n \dots\dots\dots (1)$$

Berdasarkan persamaan 1, maka dapat ditulis kembali modelnya dalam bentuk sebagai berikut:

$$Y_{ijklmno} = m + a_i + b_j + c_k + d_l + e_m + f_n + g_o + h_p + e_{ijklmnop} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana: $Y_{ijklmnop}$ = pendapatan pekerja pada katagori ke-i variabel A (tempat tinggal), katagori ke-j variabel B (status perkawinan), katagori ke-k variabel C (tingkat pendidikan), katagori ke-l variabel D (jenis pekerjaan), katagori ke-

m variabel E (lapangan usaha), katagori ke-n variabel F (usia), katagori ke-o variabel G (jam kerja), katagori ke-p variabel H (jumlah tanggungan); μ = rata-rata keseluruhan pendapatan pekerja (*grand mean*); a_i = pengaruh variabel tempat tinggal pada katagori ke-i; $i=1,2$; b_j = pengaruh variabel status perkawinan pada katagori ke-j; $j = 1,2$; c_k = pengaruh variabel pendidikan pada katagori ke-k; $k = 1, 2$; d_l = pengaruh variabel pada jenis pekerjaan katagori ke-l; $l = 1,2$; e_m = pengaruh variabel lapangan usaha pada katagori ke-m; $m = 1, 2, 3$; f_n = pengaruh variabel usia pada katagori ke-n; $n = 1, 2, 3$; g_o = pengaruh variabel jam kerja pada katagori ke-o; $o = 1, 2$; h_p = pengaruh variabel jumlah tanggungan pada katagori ke-p; $p = 1, 2$; $\varepsilon_{ijklmnop}$ = residual untuk individu bersesuaian dengan $Y_{ijklmnop}$.

Koefisien $a_p, b_j, c_k, d_l, e_m, f_n, g_o,$ dan h_p , adalah nilai estimasi dari parameter model dari variabel tempat tinggal, status perkawinan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lapangan usaha, usia, jumlah jam kerja, dan jumlah tanggungan yang dapat dicari dengan metode kuadrat terkecil, melalui persamaan normal. Bentuk persamaan normal tersebut adalah:

$$a_i = A_i - \bar{Y} - \frac{1}{W_j} \sum W_j b_j - \frac{1}{W_k} \sum W_k c_k - \frac{1}{W_l} \sum W_l d_l - \frac{1}{W_m} \sum W_m e_m - \frac{1}{W_n} \sum W_n f_n - \frac{1}{W_o} \sum W_o g_o - \frac{1}{W_p} \sum W_p h_p$$

$$b_j = B_j - \bar{Y} - \frac{1}{W_i} \sum W_i a_i - \frac{1}{W_k} \sum W_k c_k - \frac{1}{W_l} \sum W_l d_l - \frac{1}{W_m} \sum W_m e_m - \frac{1}{W_n} \sum W_n f_n - \frac{1}{W_o} \sum W_o g_o - \frac{1}{W_p} \sum W_p h_p$$

$$c_k = C_k - \bar{Y} - \frac{1}{W_j} \sum W_j b_j - \frac{1}{W_i} \sum W_i a_i - \frac{1}{W_l} \sum W_l d_l - \frac{1}{W_m} \sum W_m e_m - \frac{1}{W_n} \sum W_n f_n - \frac{1}{W_o} \sum W_o g_o - \frac{1}{W_p} \sum W_p h_p$$

$$d_l = D_l - \bar{Y} - \frac{1}{W_j} \sum W_j b_j - \frac{1}{W_i} \sum W_i a_i - \frac{1}{W_k} \sum W_k c_k - \frac{1}{W_m} \sum W_m e_m - \frac{1}{W_n} \sum W_n f_n - \frac{1}{W_o} \sum W_o g_o - \frac{1}{W_p} \sum W_p h_p$$

$$e_m = E_m - \bar{Y} - \frac{1}{W_j} \sum W_j b_j - \frac{1}{W_i} \sum W_i a_i - \frac{1}{W_k} \sum W_k c_k - \frac{1}{W_l} \sum W_l d_l - \frac{1}{W_n} \sum W_n f_n - \frac{1}{W_o} \sum W_o g_o - \frac{1}{W_p} \sum W_p h_p$$

$$f_n = F_n - \bar{Y} - \frac{1}{W_j} \sum W_j b_j - \frac{1}{W_i} \sum W_i a_i - \frac{1}{W_k} \sum W_k c_k - \frac{1}{W_l} \sum W_l d_l - \frac{1}{W_m} \sum W_m e_m - \frac{1}{W_o} \sum W_o g_o - \frac{1}{W_p} \sum W_p h_p$$

$$g_o = G_o - \bar{Y} - \frac{1}{W_j} \sum W_j b_j - \frac{1}{W_i} \sum W_i a_i - \frac{1}{W_k} \sum W_k c_k - \frac{1}{W_l} \sum W_l d_l - \frac{1}{W_m} \sum W_m e_m - \frac{1}{W_n} \sum W_n f_n - \frac{1}{W_p} \sum W_p h_p$$

$$h_p = H_p - \bar{Y} - \frac{1}{W_j} \sum W_j b_j - \frac{1}{W_i} \sum W_i a_i - \frac{1}{W_k} \sum W_k c_k - \frac{1}{W_l} \sum W_l d_l - \frac{1}{W_m} \sum W_m e_m - \frac{1}{W_n} \sum W_n f_n - \frac{1}{W_o} \sum W_o g_o$$

di mana: $A_i = \frac{\sum_i \sum_j \sum_k \sum_l \sum_m \sum_n \sum_o \sum_p Y_{ijklmnop}}{W_i}$ atau rata-rata pendapatan yang diperoleh pada katagori ke-

i pada variabel tempat tinggal pekerja. W_i = banyaknya individu/amanan katagori ke-i pada variabel tempat tinggal pekerja. Hal yang sama juga berlaku pada $B_j, C_k, D_l, E_m, F_n, G_o,$ dan H_p .

Peubah penjelas yang digunakan bersifat kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan pengkatagorian, sehingga peubah-peubah tersebut menjadi berskala nominal seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.
Nilai Katagori Peubah-peubah yang Digunakan dalam Penelitian

Peubah	Nama Peubah	Nilai Katagori Peubah
Y	Pendapatan pekerja	Rupiah
A = X1	Wilayah tempat tinggal	1 = perkotaan dan 2 = perdesaan
B = X2	Status perkawinan	1 = belum kawin dan 2 = kawin/pernah kawin
C = X3	Tingkat pendidikan	1 = < SMP dan 2 = SMP keatas
D = X4	Jenis pekerjaan	1 = pekerja terampil dan 2 = pekerja tidak terampil
E = X5	Lapangan Usaha	1 = sektor primer, 2 = sektor sekunder, dan 3 = sektor tersier
F = X6	Usia	1 = < 25 tahun, 2 = 25-54 tahun, dan 3 = ≥ 55 tahun
G = X7	Jumlah jam kerja	1 = < 35 jam dan 2 = ≥ 35 jam
H = X8	Jumlah tanggungan	1 = ≤ 2,5 orang dan 2 = > 2,5 orang
Z (variabel kontrol)	Jenis Kelamin	1 = laki-laki dan 2 = perempuan

Data yang digunakan merupakan data primer/data mentah hasil SAKERNAS di Provinsi Aceh pada tahun 2010. Sebanyak 547.205 orang pekerja terpilih dalam survey mencakup jumlah sampel 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh. Sedangkan, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ekonomi, dimana dibatasi oleh variabel bebas yaitu wilayah tempat tinggal, status perkawinan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lapangan usaha, usia, jumlah jam kerja, jumlah tanggungan dan jenis kelamin.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Pekerja

Setiap pekerja mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik tersebut dapat memberikan implikasi yang berbeda terhadap pendapatan. Tabel 2 memperlihatkan bahwa 361.588 pekerja (66,08 persen) adalah laki-laki dan 185.617 pekerja perempuan (33,92 persen). Selain itu, pekerja yang bertempat tinggal di perkotaan adalah 43,52 persen dan 56,48 persen bertempat tinggal di wilayah perdesaan. Pekerja perempuan yang berada di perkotaan sebanyak 21,37 persen dari total pekerja, sementara di wilayah perdesaan lebih banyak yaitu 32,61 persen dari keseluruhan pekerja di perdesaan. Hal ini mengindikasikan perbedaan komposisi yang relatif besar tersebut karena adanya perbedaan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap di wilayah perdesaan lebih besar dibandingkan di wilayah perkotaan, khususnya pada sektor primer.

Tabel 2.
Pengolongan Pekerja Menurut Karakteristik Pekerja laki-laki dan Perempuan

Karakteristik	Pekerja	Laki-Laki			Perempuan			Total		
		Jumlah	Persen Baris	Persen Kolom	Jumlah	Persen Baris	Persen Kolom	Jumlah	Persen Baris	Persen Kolom
Tempat Tinggal	Perkotaan	149.322	62,71	41,30	88.804	37,29	47,84	238.126	100,00	43,52
	Perdesaan	212.266	68,68	58,70	96.813	31,32	52,16	309.079	100,00	56,48
Status Kawin	Belum Kawin	129.922	70,98	35,93	53.115	29,02	28,62	183.037	100,00	33,45
	Kawin/Cerai	231.666	63,62	64,07	132.502	36,38	71,38	364.168	100,00	66,55
Tingkat Pendidikan	Tdk tamat SMP	76.136	77,74	21,06	21.804	22,26	11,75	97.940	100,00	17,90
	SMP keatas	285.452	63,54	78,94	163.813	36,46	88,25	449.265	100,00	82,10
Kualitas Pekerja	Terampil	124.004	47,17	34,29	138.878	52,83	74,82	262.882	100,00	48,04
	Tidak terampil	237.584	83,56	65,71	46.739	16,44	25,18	284.323	100,00	51,96
Lapangan Usaha	Primer	69.988	82,07	19,36	15.291	17,93	8,24	85.279	100,00	15,58
	Skunder	75.411	91,39	20,86	7.109	8,61	3,83	82.520	100,00	15,08
	Tersier	216.189	56,98	59,79	163.217	43,02	87,93	379.406	100,00	69,34

Karakteristik Pekerja	Laki-Laki			Perempuan			Total		
	Jumlah	Persen Baris	Persen Kolom	Jumlah	Persen Baris	Persen Kolom	Jumlah	Persen Baris	Persen Kolom
Umur < 25	65.898	68,21	18,22	30.713	31,79	16,55	96.611	100,00	17,66
Umur 25-54	278.822	65,18	77,11	148.942	34,82	80,24	427.764	100,00	78,17
Umur > 54	16.868	73,89	4,66	5.962	26,11	3,21	22.830	100,00	4,17
Jam Kerja <35	97.875	51,48	27,07	92.257	48,52	49,70	190.132	100,00	34,75
Jam Kerja 35+	263.713	73,85	72,93	93.36	26,15	50,30	357.073	100,00	65,25
Tanggung < 2,5	25.074	59,75	6,93	16.89	40,25	9,10	41.964	100,00	7,67
Tanggung > 2,5	336.514	66,60	93,07	168.727	33,40	90,90	505.241	100,00	92,33
Total	361.588	66,08	100,00	185.617	33,92	100,00	547.205	100,00	100,00

Sumber : Hasil penelitian, 2011

Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antarvariabel tak bebas pendapatan dan masing-masing variabel tak bebas digunakan uji ketergantungan. Uji statistik *Pearson Chi-Square* dan *Likelihood Ratio*, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat adanya ketergantungan yang signifikan antara pendapatan dan masing-masing variabel bebas. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 3. Tiga nilai signifikansi yang terbesar adalah antara variabel pendapatan dengan variabel bebas yaitu pendapatan dengan Lapangan Usaha, pendapatan dengan kualitas kerja, dan pendapatan dengan umur.

Tabel 3.
Uji Ketergantungan Beberapa Variabel yang Mempengaruhi Pendapatan

Hubungan Variabel	Uji Statistik	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
pendapatan * tempat tinggal	Pearson Chi-Square	83269,692	1	0,000
	Likelihood Ratio	100748,618	1	0,000
pendapatan * status kawin	Pearson Chi-Square	105367,927	1	0,000
	Likelihood Ratio	126757,732	1	0,000
pendapatan * pendidikan	Pearson Chi-Square	97979,882	1	0,000
	Likelihood Ratio	104907,836	1	0,000
pendapatan * kualitas kerja	Pearson Chi-Square	160891,006	1	0,000
	Likelihood Ratio	189659,264	1	0,000
pendapatan * Lapangan Usaha	Pearson Chi-Square	198835,724	1	0,000
	Likelihood Ratio	191010,754	1	0,000
pendapatan * Umur	Pearson Chi-Square	157771,151	1	0,000
	Likelihood Ratio	131915,188	1	0,000
pendapatan * Jam Kerja	Pearson Chi-Square	110338,117	1	0,000
	Likelihood Ratio	122760,168	1	0,000
pendapatan * tanggungan	Pearson Chi-Square	65825,451	1	0,000
	Likelihood Ratio	40628,384	1	0,000

Sumber : Hasil penelitian, 2011

Sesuai dengan signifikansi uji ketergantungan diatas, hubungan terkuat antara variabel pendapatan dengan variabel-variabel bebas berturut-turut adalah antara pendapatan dengan lapangan usaha, pendapatan dengan tingkat kualitas kerja, dan pendapatan dengan umur. Sebaliknya antara pendapatan dan tanggungan merupakan hubungan yang terlemah dibandingkan hubungan pendapatan dengan variabel-variabel lainnya, namun masih signifikan. Tanggungan merupakan masalah external yang tidak berkaitan dengan masalah produktivitas seorang

pekerja, seperti kualitas kerja dan umur. Semakin baik kualitas kerjanya maka produktivitasnya semakin baik, apalagi kalau pekerja masih berumur produktif serta bekerja di lapangan usaha yang sesuai. Hal ini tentu akan menjamin upah yang sesuai setiap pekerja dan menjamin pendapatan lebih baik.

Hasil uji hubungan dengan menggunakan uji statistik *Phi*, *Cramer's V*, dan *Contingency Coefficient* antara dua variabel adalah menolak H_0 . Hal ini menjelaskan bahwa hubungan antara pendapatan dengan masing-masing variabel bebas adalah kuat. Kuatnya hubungan antara kedua variabel dapat dilihat pada Tabel 4 pada kolom *value* dan untuk signifikansi hubungannya terdapat pada kolom *Approx. Sig.*

Tabel 4.
Uji Hubungan Beberapa Variabel Terhadap Pendapatan

Hubungan Variabel	Uji Statistik	Value	Approx. Sig.
pendapatan * tempat tinggal	Phi	0,390	0,000
	Cramer's V	0,390	0,000
	Contingency Coefficient	0,363	0,000
pendapatan * status kawin	Phi	0,439	0,000
	Cramer's V	0,439	0,000
	Contingency Coefficient	0,402	0,000
pendapatan * pendidikan	Phi	0,423	0,000
	Cramer's V	0,423	0,000
	Contingency Coefficient	0,390	0,000
pendapatan * kualitas kerja	Phi	0,542	0,000
	Cramer's V	0,542	0,000
	Contingency Coefficient	0,477	0,000
pendapatan * lapangan usaha	Phi	0,603	0,000
	Cramer's V	0,426	0,000
	Contingency Coefficient	0,516	0,000
pendapatan * umur	Phi	0,537	0,000
	Cramer's V	0,380	0,000
	Contingency Coefficient	0,473	0,000
pendapatan * jam kerja	Phi	0,449	0,000
	Cramer's V	0,449	0,000
	Contingency Coefficient	0,410	0,000
pendapatan * perkawinan	Phi	0,552	0,000
	Cramer's V	0,552	0,000
	Contingency Coefficient	0,483	0,000

Sumber : Hasil penelitian, 2011

4.2. Analisis Klasifikasi Berganda (*Multiple Classification Analysis*)

Penelitian ini menggunakan analisis multivariat yaitu *Multiple Classification Analysis* (MCA) untuk mengetahui pola hubungan antara variabel bebas dengan pendapatan pekerja. Analisis ini menggunakan beberapa asumsi yang harus dipenuhi (1) pengaruh variabel bebas terhadap upah pekerja dan (2) interaksi antarpasangan variabel bebas. Pertama, untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel tak bebas digunakan melalui uji nilai *F main effect*. Hasilnya nilai *p-value* ternyata kurang dari 0,05 maka hipotesis awal yang menyatakan bahwa tidak ada keterkaitan antara variabel bebas dan variabel tak bebas/terikat ditolak. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Dari hasil pengolahan *Analysis of Variance* (ANOVA) diperoleh hasil bahwa semua variabel bebas dan variabel kontrol memiliki nilai signifikansi *F* kurang dari 0,05. Dengan demikian variabel tempat tinggal, status kawin, pendidikan, kualitas pekerja, lapangan usaha, umur, jam kerja, tanggungan, serta jenis kelamin berkaitan dengan pendapatan pekerja.

Kedua, Asumsi selanjutnya adalah *simple linear additivity* yaitu setiap variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebas nilainya bebas dari faktor yang lain. Untuk menguji asumsi ini maka bisa dilihat dari hasil uji ANOVA. Hasilnya, terdapat interaksi antarvariabel bebas kecuali interaksi tempat tinggal dan jumlah tanggungan. Nilai signifikansinya berada di bawah 0,05 sehingga masih terdapat interaksi antara pasangan variabel bebas tersebut. Dengan demikian harus dilakukan uji tahap kedua untuk menentukan pembentukan model MCA.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa jenis kelamin sebagai variabel kontrol atau kovariat ternyata memberikan pengaruh nyata terhadap pendapatan atau upah yang diterima pekerja. Sehingga masing-masing variabel bebas secara langsung mempengaruhi upah yang diterima pekerja, maupun melalui variabel kontrol (jenis kelamin). Pada hasil MCA, perkiraan rata-rata pendapatan pekerja pada masing-masing variabel bebas akan terlihat lebih jelas baik sebelum ataupun sesudah dibebaskan pengaruh jenis kelamin sebagai variabel kontrol.

Tabel 5.
Hasil Penghitungan Analisis Klasifikasi Berganda (MCA^a)

Variabel	N	Predicted Mean			Deviation			
		Unadjusted	Adjusted for Factors	Adjusted for Factors and Covariates	Unadjusted	Adjusted for Factors	Adjusted for Factors and Covariates	
Tempat tinggal	kota	238.126	1.773.830	1.652.068	1.657.235	256.248	134.486	139.654
	desa	309.079	1.320.159	1.413.969	1.409.987	-197.423	-103.613	-107.594
Status kawin	belum kawin	183.037	1.017.233	1.157.994	1.142.496	-500.348	-359.588	-375.086
	kawin/cerai	364.168	1.769.065	1.698.317	1.706.106	251.484	180.735	188.524
				-751.832	-540.323	-563.61		
Pendidikan	tidak tamat SMP	97.94	954.486	1.204.479	1.234.931	-563.096	-313.102	-282.65
	SMP keatas	449.265	1.640.337	1.585.838	1.579.200	122.755	68.256	61.618
				-685.851	-381.359	-344.268		
Kualitas pekerja	terampil	262.882	1.876.920	1.751.706	1.817.392	359.338	234.124	299.81
	tidak terampil	284.323	1.185.342	1.301.113	1.240.381	-332.24	-216.469	-277.201
Lapangan usaha	primer	85.279	1.053.959	1.418.561	1.397.998	-463.623	-99.021	-119.584
	sekunder	82.52	1.222.111	1.505.603	1.451.697	-295.471	-11.978	-65.885
	tersier	379.406	-168.152	-87.042	-53.698	168.473	24.862	41.209
Umur			-463.944	-36.841	-107.094			
	< 25	96.611	841.77	1.225.872	1.256.658	-675.811	-291.709	-260.924
	25-54	427.764	1.660.910	1.573.230	1.568.659	143.328	55.649	51.077
	> 54	22.83	-819.139	-347.358	-312.001	174.345	191.76	147.142
Jam kerja			-31.018	-136.111	-96.065			
	<35	190.132	1.312.369	1.244.342	1.286.133	-205.213	-273.24	-231.448
	35+	357.073	1.626.852	1.663.075	1.640.822	109.27	145.493	123.24
Tanggungan			-314.483	-418.732	-354.689			
	< 2,5	41.964	1.496.824	1.554.962	1.582.152	-20.758	37.38	64.57
	≥ 2,5	505.241	1.519.306	1.514.477	1.512.219	1.724	-3.105	-5.363
			-22,482	40,485	69,934			

Sumber : Hasil penelitian, 2011

Catatan : ^a pendapatan by tempat tinggal, status kawin, pendidikan, kualitas pekerja, lapangan usaha, umur, jam kerja, tanggungan with jenis kelamin

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Laki-Laki dan Perempuan dalam Kegiatan Ekonomi di Provinsi Aceh
(Abubakar Hamzah, Susanti, dan Sofyan Syahnur)

Hasil penghitungan dengan model *Multiple Classification Analysis* ditunjukkan pada Tabel 5 yang menggambarkan pengaruh dan pola hubungan rata-rata upah dengan masing-masing variabel bebas. Besarnya pengaruh setiap variabel bebas yang dipengaruhi oleh variabel bebas lain dan kovariat ditunjukkan oleh nilai eta (η), sedangkan pengaruh setiap variabel bebas terhadap rata-rata upah pekerja tanpa dipengaruhi oleh variabel bebas lain dan variabel kovariat yakni jenis kelamin ditunjukkan oleh nilai beta (β). Variabel bebas yang menunjukkan nilai beta (β) yang paling besar dapat dikatakan sebagai variabel yang memiliki pengaruh yang paling besar terhadap rata-rata upah pekerja bila dibandingkan dengan variabel bebas lainnya. Untuk mengetahui rata-rata upah yang dapat diterangkan oleh semua variabel bebas dan kovariatnya bisa dilihat dari nilai R^2 dalam kolom *Factors and Covariates* pada tabel *Model Goodness of Fit*.

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu tempat tinggal, status kawin, pendidikan, kualitas pekerja, lapangan usaha, umur, jam kerja, dan tanggungan, serta jenis kelamin sebagai kovariat secara bersama-sama ternyata mampu menerangkan rata-rata pendapatan pekerja di Provinsi Aceh sebesar 44,07 persen, sedangkan variasi yang bisa dijelaskan oleh variabel bebas itu sendiri sebesar 41,88 persen. Besarnya perbedaan nilai keragaman pendapatan yang dapat diterangkan oleh variabel bebas dan kovariat dengan nilai keragaman pendapatan yang dapat diterangkan oleh variabel bebas saja terjadi karena pengaruh variabel kontrol atau kovariat jenis kelamin signifikan. Selanjutnya akan dibahas masing-masing pengaruh variabel bebas terhadap rata-rata upah pekerja baik secara bersama-sama dengan variabel lainnya dan variabel kontrol (η), tanpa variabel bebas lainnya namun dengan variabel kontrol (β adjusted for factors), ataupun tanpa variabel bebas lainnya dan tanpa variabel kontrol (β adjusted for factors and covariates).

Ilustrasi hubungan beberapa variabel bebas setelah variabel bebas lainnya dan variabel kontrol dibebaskan pengaruhnya (*Adjusted for Factors and Covariates*) terhadap pendapatan pekerja dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Hasil MCA Beberapa Variabel Bebas Terhadap Pendapatan Pekerja

PENDAPATAN RATA-RATA PEKERJA 1.517.581		
Perkotaan 139.654	TEMPAT TINGGAL	Perdesaan (107.594)
Belum Kawin (375.086)	STATUS PERKAWINAN	Pernah Kawin 188.524
< SLTP (282.650)	PENDIDIKAN	\geq SLTP 61.618
Terampil 299.810	JENIS PEKERJA	Tidak Terampil (277.201)
Primer (119.584)	LAPANGAN USAHA	Tersier 41.209
	Sekunder (65.885)	
<35 (231.448)	JAM KERJA	35+ 123.24
< 25 TAHUN (260.924)	USIA	\geq 55 TAHUN 147.142
	25-54 Tahun 51.077	
< 2,5 64.570	JUMLAH TANGGUNGAN	\geq 2,5 (5.363)

Sumber : Hasil penelitian, 2011

Model aditif upah atau pendapatan yang diterima pekerja per bulan di Provinsi Aceh Tahun 2010 adalah $Y = 1.517.581 + X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7 + X8$. Dari model tersebut di atas seseorang pekerja akan memperoleh pendapatan tertinggi jika mempunyai karakteristik (1) Pekerja tersebut berada di wilayah perkotaan; (2) Mereka sudah pernah kawin (berstatus kawin/cerai); (3) Mereka berpendidikan minimal setingkat SLTP; (4) Mereka adalah pekerja terampil; (5) Mereka bekerja pada sektor tersier (jasa); (6) Mereka berusia > 4 tahun; (7) Mereka bekerja minimal 35 jam per minggu, dan (8) Mempunyai tanggungan kurang dari 2,5 orang. Seseorang pekerja dengan karakteristik di atas akan memperoleh pendapatan sebesar Rp 2.583.349.

Sedangkan untuk kondisi sebaliknya, seseorang pekerja akan mendapatkan upah atau pendapatan yang terendah jika (1) Pekerja tersebut berada di wilayah perdesaan; (2) Mereka belum kawin; (3) Mereka berpendidikan kurang dari SLTP; (4) Mereka pekerja tidak terampil; (5) Mereka bekerja di sektor primer; (6) Mereka berusia muda (< 25 tahun); (6) Mereka bekerja kurang dari 35 jam per minggu; dan (7) Mereka mempunyai tanggungan minimal 2,5 orang. Seseorang pekerja dengan karakteristik tersebut akan memperoleh pendapatan sebesar Rp (142,269), dengan demikian ia akan berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

5. PENUTUP

Pendapatan yang diterima pekerja/karyawan/buruh dibayar di Provinsi Aceh dapat disimpulkan adalah (1) Delapan variabel bebas yaitu tempat tinggal, status kawin, pendidikan, kualitas pekerja, lapangan usaha, umur, jam kerja, dan jumlah tanggungan secara signifikan mempengaruhi pendapatan pekerja; (2) Seseorang pekerja akan memperoleh pendapatan tertinggi jika mempunyai karakteristik; berada di wilayah perkotaan, sudah pernah kawin (berstatus kawin/cerai), berpendidikan minimal setingkat SLTP, terampil, bekerja pada sektor tersier (jasa), berusia > 54 tahun, bekerja minimal 35 jam per minggu, tanggungan kurang dari 2,5 orang. Sedangkan seseorang dengan karakteristik pekerja yang sebaliknya, ia akan memperoleh upah minimal, bahkan harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; (3) Perbedaan pandangan antara laki-laki dan perempuan (Gender) sebagai variabel kontrol mempengaruhi besarnya pendapatan pekerja secara nyata; dan (4) Rata-rata pendapatan pekerja laki-laki secara umum lebih besar daripada pendapatan pekerja perempuan. Namun demikian perbedaan tersebut tidak terlalu besar, yaitu Rp 147.497,-.

Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah yaitu (1) meskipun perbedaan pendapatan pekerja laki-laki dan perempuan semakin mengecil, namun kesenjangan tersebut masih tetap ada. Oleh sebab itu program-program kesetaraan gender harus tetap dijalankan di semua bidang pembangunan; (2) Bagi pekerja dengan modal individu yang minim, diperlukan campur tangan pihak terkait. Misalnya kegiatan pemberdayaan di wilayah perdesaan, pelatihan bagi pekerja muda serta pekerja tidak terampil. Subsidi atau bantuan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga pekerja juga merupakan tindakan efektif; dan (3) Pendapatan merupakan topik menarik untuk diteliti. Oleh karenanya dapat dilakukan penelitian lebih mendalam dengan menggunakan variabel lain yang belum tercakup dalam penelitian ini. Kemungkinan membandingkan antarwaktu dan penggunaan model analisis lain juga layak dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- ILO. 2007. *Global Employment Trends for Women 2007: ILO Study Warns on The Feminization of Working Poverty*. World of Work Magazine No. 59, April 2007. Geneva.
- Agresti, Alan. 1990. *Catagorical Data Analysis*. Canada: John Wiley & Sons.
- Ananta, Aris. 1988. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Demografi Universitas Indonesia.
- Andrews, F., Morgan, J., and Sonquist, J. 1973. *Multiple Classification Analysis*. Michigan: University of Michigan.
- Anker, R. 1997. *Theories of occupational segregation by sex: An overview*. International Labour Review, 136: 315-339.
- Arango, Luis E. and Carlos E. Posada. 2007. *Labor Participation of Married Women in Colombia*. Carera: Economic Research Unit, Banco de la República.

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Laki-Laki dan Perempuan dalam Kegiatan Ekonomi di Provinsi Aceh
(Abubakar Hamzah, Susanti, dan Sofyan Syahnur)**

- Badan Pusat Statistik. 2009. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia 1991-2009*. Jakarta: BPS.
- _____. 2009. *Survei Angkatan Kerja Nasional 2009, Pedoman Pencacah*. Jakarta: BPS.
- Balakrishnan, R., 2002. *The Hidden Assembly Line: Gender Dynamics of Subcontracted Work in a Global Economy*. Bloomfield, CN: Kumarian Press.
- Bellante, D. and Jackson, M. 1983. *Labor Economics: Choice in Labor Markets*. Singapore: McGraw-Hill.
- Bowles, Samuel and Yongjin Park. 2004. *Emulation, Inequality, and Work Hours: Was Thorsten Veblen Right?* Massachusetts: University of Massachusetts Amherst.
- DeWeever, Avis Jones. 2002. *Marriage Promotion and Low-Income Communities: An Examination of Real Needs and Real Solutions*. The Institute for Women's Policy Research (IWPR). <http://www.iwpr.org>
- Fakolade, Olufemi Aremu and Samuel Olufemi Adeniyi. 2010. *Efficacy of Enrichment Triad and Self-direct Models on Academic Achievement of Gifted Students in Selected Secondary Schools in Nigeria*. International Journal of Special Education. Vol 25 No. 1 2010
- Fallick, Bruce and Jonathan Pingle. 2006. A Cohort-Based Model of Labor Force Participation. Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board, Washington, D.C.
- Friendly, M. 1995. *Categorical Data*, Part 6: Logistic Regression.
- Glendoh, Sentot Harman. 2000. *Budaya Organisasi Unjuk Rasa di Perusahaan*. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* Vol. 2, No. 2, September 2000: 44 – 58. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Gupta, Manash Ranjan. 2002. *Trade Sanctions, Adult Unemployment and the Supply of Child Labour: a Theoretical Analysis*. *Development Policy Review* 20 (2002):317–32.
- Hayghe, Howard V. 2007 "Working Wives' Contribution to Family Incomes," *Monthly Labor Review*.
- Hertweck, Matthias Sebastian. 2006. *Strategic Wage Bargaining*, *Labor Market Economics Working Papers* with number ECO2006/42. European University Institute.
- Hore, John. 2005. Three Essays on the Labor Supply of Married Women. (Dissertation). Madison: University of Wisconsin.
- Howell, David C. 2001. *Advance Statistical Method*.
- Jaumotte, Florence. 2003. Labour Force Participation Of Women: Empirical Evidence on The Role of Policy and Other Determinants in OECD Countries. *OECD Economic Studies*.
- Johnston, Richard A. and Dean W. Wichern. 1992. *Applied Multivariate Statistical Analysis*. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Kementerian Negara PP. 2000. *Glossary*. Jakarta: Kemenneg PP. <http://www.menegpp.go.id/>
- Kipkorir, Lea I. and Anne W. Njenga. 1993. *A case study of early childhood care and education in Kenya*. Kenya Institute of Education.
- Leppel, Karen. 2005. Labor Force Plans and Labor Force Status: U.S. Women of The College Class of 1957. Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research.
- Lolle, Henrik. 2007. *Multiple Classification Analysis (MCA). An, unfortunately, nearly forgotten method for doing linear regression with catagorical variables*. ECPR Conference Paper. Pisa, September 2007. Department of Economics, Politics and Public Administration Aalborg University. Denmark
- Martin, Bill. 2005. *Determinants of Labour Supply Amongst Aged Care Workers: A Multivariate Analysis*. Adelaide, Australia: Department of Health and Ageing National Institute of Labour Studies.
- Myers, R. 1992. *Towards an Analysis of the Cost and Effectiveness of Community-based Early Childhood Education in Kenya: The Kilifi District*. Aga Khan Foundation.
- Neter, John, William Wasserman, Michael H. Kutner. 1985. *Applied Linear Regression Model*. Boston: Irwin Richard D. Inc.
- Ntuli, Miracle. 2007. Determinants of South African Women's Labour Force Participation, 1995–2004. Bonn: University of Cape Town and IZA

- Ondimu, Kennedy Nyabuti. 2003. Prevalence, Determinants, and Consequences of Domestic Labor Migration in Kenya: A Case Study of Household Workers in Nairobi City. Njoro: Egerton University.
- Pissarides, Christopher (2000). *Human capital and growth: a synthesis report*. OECD, Paris, France.
- Robinson, John P. 1987. *Multiple Classification Analysis (MCA): Purpose and An Example*. University of Maryland.
- Robinson, John P., Alan Neustadtl, and Meyer Kestnbaum. 2001. *American Behavioral Scientist*. An Online Data Web Site for Internet Research: Some Features and an Example. Maryland: University of Maryland.
- Ruhyat, Cecep. 2000. *Diskriminasi upah pekerja menurut jenis kelamin: analisis data Sakernas 1998*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ruwanpura, Kanchana N. 2004. *Quality of women's employment: a focus on the South*. Volumes 151-2004 of Discussion papers. International Institute for Labour Studies.
- Santoso, Singgih. 2001. *SPSS versi 10: Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Samuelson, Paul A dan William D. Nordhaus. 1987. *Mikro Ekonomi. (edisi keempat belas)* Jakarta: Gelora Aksara Pratama
- Todaro, Michael P, Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. (Jilid 1 dan 2, Terjemahan Haris Munandar)*. Jakarta: Erlangga.
- UNDP. 2007. Human Development Report 2007. New York: United Nations Development Programme.
- _____. 2009. Human Development Report 2009. New York: United Nations Development Programme.
- Unesco. 2000. *Multiple Classification Analysis (Chapter 5.3)*. <http://www.unesco.org>

CORPORATE GOVERNANCE DAN MANAJEMEN LABA: PENGARUH PRESIDEN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT INDEPENDEN

Surifah
Universitas Negeri Surakarta
Email: surifahganis@yahoo.com

Abstract

The objective of the research is find empirical evidence of the effect of independent board of directors and independent audit committee on earning management. The samples of the research are 55 companies beyond bank, insurance and non-bank finance companies which were listed in Indonesian Stock Exchange in 2006-2009 with random sampling technique. The unusable data was deleted and the final samples are 192 observation. The result of the research shows that independent audit committee has significantly negative effect on earning management and that independent board of directors has insignificantly negative effect on earning management.

Keywords: *corporate governance, independent board of directors, independent audit committee, earnings management.*

1. PENDAHULUAN

Isu mengenai *corporate governance* (CG) sampai saat ini masih banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah, swasta, praktisi maupun akademisi. Sejak ditandatangani *letter of intent* (LoI) pada 31 Oktober 1997 oleh Pemerintah Indonesia dengan *International Monetary Fund* (IMF) yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan, Pemerintah Indonesia secara bertahap terus melakukan upaya perbaikan pengelolaan perusahaan melalui berbagai regulasi tentang CG.

Berbagai regulasi tersebut antara lain: peraturan menteri BUMN No 5 tahun 2006 tentang komite audit bagi badan usaha milik negara, peraturan Bank Indonesia No8/14/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bagi bank umum, pedoman umum GCG Indonesia oleh KNKG tahun 2001 dan direvisi pada Oktober 2006, pedoman GCG perasuransian Indonesia tahun 2006, pedoman GCG bagi dana pensiun tahun 2006, pedoman komisaris independen dan pedoman pembentukan komite audit yang efektif oleh KNKG tahun 2004, pedoman GCG perbankan Indonesia tahun 2004, keputusan menteri BUMN No 117 tahun 2002 tentang penerapan praktek GCG pada badan usaha milik negara, peraturan Bapepam No.VIII.G.11 tahun 2003 tentang tanggungjawab direksi atas laporan keuangan, dan peraturan Bapepam No. Kep-29/pm/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit.

Berdasar pada berbagai peraturan di atas, diharapkan perusahaan yang telah menerapkan GCG akan memberikan informasi termasuk informasi keuangan secara benar dan bertanggungjawab jauh dari keinginan untuk memanipulasi dan menyesatkan para pemakai informasi tersebut. Oleh karena itu implementasi GCG yang antara lain dapat diwujudkan dengan menerapkan mekanisme CG melalui pembentukan dewan komisaris dan komite audit akan dapat membatasi perilaku manajemen untuk melakukan manajemen laba. Dengan kata lain, GCG akan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian, antara lain yang dilakukan oleh Xie *et al.*, (2002) yang menyebutkan bahwa aktivitas dewan komisaris dan komite audit sebagai mekanisme CG serta pengalaman tentang finansial anggotanya merupakan faktor penting dalam membatasi

kecenderungan manajemen laba. Temuan Xie *et al.* ini, mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Chtourou *et al.*, (2001) yang membuktikan bahwa efektivitas dewan komisaris dan komite audit sebagai proksi CG membatasi aktivitas manajemen dalam melakukan manajemen laba. Penelitian Cahan *et al.*, (2008) juga membuktikan bahwa perlindungan terhadap investor akan membatasi sikap oportunistik manajemen dalam melakukan manajemen laba.

Penelitian ini akan menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan presiden komisaris independen dan komite audit independen terhadap manajemen laba. Nuryaman (2008) menggunakan komisaris independen dan kemampuan akuntansi dan keuangan anggotanya sebagai proksi *corporate governance*. Hasilnya tidak berpengaruh signifikan meskipun manajemen laba pada perusahaan yang anggota dewan komisarisnya mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman dibidang akuntansi dan keuangan lebih kecil dibandingkan manajemen laba pada perusahaan yang dewan komisarisnya tidak berpengalaman dan berpendidikan dibidang akuntansi dan keuangan. Penelitian ini melanjutkan hasil penelitian Nuryaman (2008), namun lebih mengfokuskan pada pengaruh presiden komisaris independen terhadap manajemen laba. Hal ini dimotivasi karena presiden komisaris yang memimpin rapat dewan mestinya memegang peranan penting dalam pembuatan keputusan. Selain itu keberadaan komisaris independen setidaknya 30% dari jumlah dewan komisaris sudah merupakan kewajiban di Indonesia, dan sebagian besar perusahaan telah mentaati peraturan tersebut. Nuryaman (2008) menemukan bahwa rata-rata komposisi dewan komisaris independen di Indonesia sebesar 35,88%. Oleh karena itu presiden komisaris yang dipegang oleh komisaris independen barangkali bisa mempengaruhi pembuatan keputusan yang berbeda dengan apabila presiden komisarisnya dipegang oleh komisaris yang tidak independen.

Hasil penelitian Wardhani dan Joseph (2010) tentang pengaruh karakteristik komite audit terhadap manajemen laba menunjukkan bahwa pengalaman finansial anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba sedangkan pengalaman kerja komite audit pada kantor akuntan publik justru berhubungan positif signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian ini juga melanjutkan penelitian Wardhani dan Joseph (2010) tentang karakteristik komite audit, namun dilihat dari sisi yang berbeda yaitu independensi komite audit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Indonesia adalah terletak pada proksi yang digunakan dalam menilai CG, yaitu dengan menggunakan presiden komisaris independen dan komite audit independen. Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris tentang peranan CG yang diproksi dengan presiden komisaris independen dan komite audit independen mampu mempengaruhi perilaku oportunistik manajemen dalam bentuk manajemen laba.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam (1) menambah literatur tentang CG dan manajemen laba. (2) selanjutnya kalau memang terbukti bahwa CG berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, maka berarti bahwa implementasi CG dalam bentuk presiden komisaris independen dan komite audit independen dapat digunakan untuk memperkirakan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan apakah terdapat indikasi manajemen laba atau tidak. Sedangkan bagi Regulator (Pemerintah, BAPEPAM, IAI) hasil penelitian ini semoga bermanfaat sebagai masukan dalam membuat kebijakan baru atau mengevaluasi kebijakan yang sudah ada mengenai implementasi *corporate governance*.

2. LANDASAN TEORI DAN STUDI TERKAIT SEBELUMNYA

Penelitian ini didasarkan pada *agency theory* (teori keagenan) yang menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang melakukan kontrak yaitu *agen* dan *principal*, dimana masing-masing pihak akan selalu mengoptimalkan kepentingannya. Hubungan keagenan ini didefinisikan oleh Jensen dan Meckling (1976) sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) menggunakan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian wewenang kepada agen untuk pengambilan keputusan. Jika kedua pihak yang berhubungan ingin memaksimalkan utilitas mereka, maka sangat beralasan jika agen tidak selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Sementara itu hubungan agen dan prinsipal berada pada situasi ketidakseimbangan informasi, karena agen sangat memahami informasi tentang perusahaan yang dia kelola sedangkan prinsipal tidak sepenuhnya mempunyai informasi seperti yang dimiliki agen. Situasi semacam

ini memungkinkan agen untuk menyembunyikan informasi-informasi untuk kepentingan dirinya sendiri termasuk melakukan manajemen laba.

Untuk mengatasi masalah keagenan tersebut perlu dilakukan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dalam rangka mewujudkan *good corporate governance*, berbagai peraturan pemerintah telah dikeluarkan antara lain keputusan BAPEPAM nomor: 29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Dalam peraturan tersebut komisaris independen didefinisikan sebagai anggota komisaris yang : (1) berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, (2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung emiten atau perusahaan publik, (3) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, dan (4) tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. Sedangkan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit bertanggungjawab kepada dewan komisaris. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Salah seorang anggota komite audit harus memiliki latar belakang bidang akuntansi atau keuangan.

Peraturan pemerintah tentang pembentukan dewan komisaris dan komite audit selain untuk mewujudkan *good corporate governance* juga dalam rangka melindungi kepentingan para *stakeholder*. Salah satu prinsip *corporate governance* adalah melindungi kepentingan para *stakeholder* termasuk didalamnya perlindungan terhadap investor. Penelitian Cahan *et al.*, (2008) membuktikan bahwa perlindungan terhadap investor akan membatasi sikap oportunistik manajemen. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa para manajer di negara yang perlindungan terhadap investornya rendah lebih suka menggunakan *income smoothing* (IS) untuk alasan oportunistik sedangkan pada negara yang perlindungan terhadap investornya tinggi, manajer lebih suka menggunakan IS untuk menyampaikan informasi private mereka tentang laba masa mendatang. Hasilnya sangat kuat melalui berbagai analisis tambahan. Lebih lanjut, hasil penelitiannya menyatakan bahwa peranan kebijaksanaan akuntansi dipengaruhi oleh infrastruktur institusi negara, khususnya kemampuannya untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham asing.

Masih berkaitan dengan perlindungan terhadap investor, Wright *et al.*, (2006) juga mengkaitkan perlindungan terhadap investor dan manajemen laba. Wright *et al.*, (2006) dalam penelitiannya yang berjudul *Corporate Governance and Investor Protection: Earnings Management in the U.K and U.S.* meneliti tentang manajemen laba yang dilakukan oleh manajer U.S. dan U.K sebelum melakukan *management buy Out* (MBO). MBO merupakan pembelian saham oleh manajemen perusahaan. MBO ini merupakan *arm's length transaction* yang dapat menimbulkan harga yang tidak wajar. Manajemen terdorong untuk menurunkan angka laba agar harga saham perusahaan turun dan mereka dapat membeli saham dengan harga lebih murah. Digunakan negara U.S dan U.K. karena tingkat perlindungan terhadap investor pada kedua negara tersebut cukup tinggi. Wright *et al.*, (2006) menggunakan perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan MBO sebagai variabel kontrol.

Sampel yang digunakan oleh Wright *et al.*, (2006) dipilih dari perusahaan-perusahaan yang melakukan MBO di US dan UK. Sampel awal di UK terdiri dari 142 perusahaan yang melakukan MBO dari tahun 1997-2002. Tetapi 50 perusahaan tidak dipakai karena data tidak lengkap sehingga sampel final 92 perusahaan. Sampel di US terdiri dari 118 perusahaan dan 55 perusahaan tidak digunakan karena data tidak tersedia. Dengan menggunakan model modifikasi Jones (1991) dan metode estimasi *cross sectional* untuk mengukur *discretionary accruals*, hasilnya menunjukkan bahwa manajer di U.K. dan U.S. menurunkan angka laba pada tahun sebelum MBO, penurunan laba manajer US lebih agresif dan signifikan dari pada manajer U.K.

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas Givoly *et al.*, (2010) menyoroti tentang pengaruh kepemilikan publik (pemerintah) terhadap kualitas laba. salah satu ukuran kualitas laba adalah ketiadaan manajemen laba. Faktor kepemilikan merupakan salah satu proksi yang sering digunakan dalam literatur penelitian CG. Mereka membandingkan angka akuntansi yang dihasilkan oleh dua jenis perusahaan, yang satu milik publik (pemerintah) dan yang satu milik swasta. Hasil penelitian Givoly *et al.*, konsisten dengan hipotesis "perilaku oportunistik" bahwa

perusahaan yang dimiliki oleh swasta mempunyai kualitas akrual yang lebih tinggi dan kecenderungan mengatur laba yang lebih rendah dari pada perusahaan yang dimiliki oleh publik. Selanjutnya ditemukan juga bahwa perusahaan yang dimiliki publik melaporkan lebih konservatif dalam hal lebih besar risiko litigasinya dan *agency costs* nya juga lebih besar.

Pengaruh regulasi CG *The Mexican Corporate Governance Code* terhadap kualitas laba diteliti oleh Machuga dan Teitel (2007). *The Mexican Corporate Governance Code*, ditetapkan di Meksiko pada Januari 2000. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas laba meningkat setelah implementasi CG Code. Hal ini berarti bahwa CG dapat membatasi perilaku manajemen laba sehingga kualitas laba menjadi meningkat.

2.1. Dewan Komisaris dan Manajemen Laba

Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh dewan komisaris dan manajemen laba antara lain dilakukan oleh Xie *et al.*, (2002). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa aktivitas dewan komisaris merupakan faktor penting dalam membatasi kecenderungan manajemen laba. Temuan Xie *et al.* ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Chtourou *et al.*, (2001) yang membuktikan bahwa efektivitas dewan komisaris membatasi aktivitas manajemen laba.

Pengaruh independensi dewan komisaris, kualitas audit dan struktur kepemilikan terhadap manajemen laba juga dilakukan oleh Benkreim (2009). Manajemen laba diukur dengan menggunakan *working capital discretionary accruals* (WCDAC). Dia menganalisis 4 periode dari tahun 2001 sampai 2004 dengan jumlah sampel 239 perusahaan di Prancis yang terdaftar pada *Paris Stock Exchange*. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa auditor *the big 4* dapat membatasi penyesuaian *diskresionary*. Tidak ada hubungan yang signifikan antara struktur kepemilikan terkonsentrasi maupun menyebar terhadap WCDAC. Peranan komisaris independen lebih efektif ketika jumlah anggota dewan komisaris independen setidaknya sepertiga dari jumlah dewan komisaris seperti yang direkomendasikan oleh *The Vienot 1999 report*.

Hasil penelitian tentang pengaruh dewan komisaris terhadap manajemen laba tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang sama. Penelitian Huang *et al.*, (2008) tentang manajemen etis, *corporate governance* dan *abnormal accruals* (yang merupakan proksi dari manajemen laba) membuktikan bahwa dewan komisaris yang kuat dan independen hanya sebagai sinyal bahwa laba perusahaan berkualitas.

Sementara itu hasil penelitian Zhao dan Chen (2008) sangat berbeda dengan beberapa hasil penelitian di atas. Hasil penelitian Zhao dan Chen (2008) tentang dewan komisaris yang lemah dan manajemen laba, membuktikan bahwa dewan komisaris yang lemah memungkinkan manajer menikmati ketenangan hidup dan menyurutkan motivasi manajer untuk meningkatkan nilai perusahaan, sebagai konsekwensinya manajer tidak termotivasi untuk mengatur laba. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kualitas laba perusahaan yang mempunyai dewan komisaris yang lemah malah lebih baik karena manajemen tidak termotivasi untuk mengatur laba.

Sivaramakrishnan dan Yu (2008) meneliti tentang hubungan antara CG dan kualitas laba. Penelitian ini bertujuan mengembangkan suatu kerangka yang membedakan antara kekuatan CG dan kecukupan CG yang merupakan cerminan tingkat CG. Mekanisme CG tercermin dari : (1) jumlah anggota komisaris independen, (2) keberadaan pemegang saham institusi yang besar, dan (3) tidak adanya dualitas CEO. Sebuah perusahaan yang memiliki lebih banyak anggota komisaris independen, pemegang saham institusional yang besar, dan tidak adanya dualitas CEO dipandang sebagai memiliki CG yang kuat. Sebaliknya, CG dipandang cukup meskipun tidak mempunyai ketiga mekanisme CG di atas, jika efektif dalam mengurangi biaya keagenan. CG lemah tetapi memadai jika masalah keagenan rendah. Diharapkan kualitas laba dapat mengurangi masalah keagenan. *Corporate governance* bisa kuat tapi tidak cukup, kalau kualitas labanya masih menjadi masalah. Kualitas laba kemungkinan juga akan menjadi masalah bagi perusahaan yang CG nya lemah dan tidak memadai.

Hasil penelitian Sivaramakrishnan dan Yu (2008) menunjukkan bahwa : (1) Suatu perusahaan yang CG nya cukup memadai, tanpa harus memiliki kekuatan dalam CG, kualitas labanya tinggi, (2) Perusahaan yang CG nya cukup memadai cenderung mempunyai kualitas akrual yang tinggi, persistensi laba yang tinggi dan kemampuan

prediksi laba yang tinggi pada tingkat CG yang sama. Jadi, hasil menyarankan kecukupan CG merupakan penentu signifikan kualitas laba.

Penelitian Sivaramakrishnan dan Yu mempunyai implikasi yang berguna terutama bagi pembuat kebijakan, bahwa agar kualitas laba meningkat dan biaya keagenan dapat berkurang, maka yang dibutuhkan adalah CG yang cukup memadai, dan tidak harus CG yang kuat (karena kekuatan CG juga harus dibayar mahal oleh pemegang saham dan perusahaan).

Nuryaman (2008) melakukan penelitian tentang CG dan manajemen laba pada laporan keuangan 2005 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan sebanyak 101 perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa : (1) konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, ini mengindikasikan bahwa konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme *corporate governance* bagi perusahaan, sehingga mampu membatasi manajemen laba di perusahaan. (2) ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar kecenderungan melakukan tindakan manajemen labanya lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang ukurannya lebih kecil. (3) komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dapat disebabkan oleh : (a) masih rendahnya komposisi dewan komisaris, sehingga secara kolektif komisaris independen tidak memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi berbagai keputusan dewan komisaris, dan (b) masih banyak emiten menempatkan komisaris independen yang tidak memiliki kompetensi pada bidang akuntansi dan atau keuangan. (4) temuan ikutan menunjukkan, manajemen laba perusahaan yang menempatkan komisaris independen yang kompeten pada bidang akuntansi dan atau keuangan lebih kecil dibandingkan dengan manajemen laba perusahaan yang menempatkan komisaris independen yang tidak memiliki kompetensi pada bidang akuntansi dan atau keuangan. (5) kualitas audit dengan proksi spesialisasi Industri Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba. Ini bermakna bahwa audit oleh KAP besar yaitu KAP yang memiliki pangsa pasar besar, ternyata tidak menjadikan jaminan memberikan audit yang kualitasnya lebih tinggi. Dalam konteks hubungan kualitas audit dengan manajemen laba, kualitas audit yang diproksi dengan menggunakan spesialisasi industri KAP mungkin bukan merupakan proksi yang baik untuk kualitas audit di Indonesia.

Berdasar pada penelitian terdahulu tentang pengaruh dewan komisaris terhadap manajemen laba yang hasilnya menunjukkan ketidakkonsistenan pengaruh negatif atau positif, signifikan atau tidak signifikan, maka penelitian ini mencoba memandang sisi dewan komisaris dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu kepemimpinannya. Penelitian ini didasarkan pada dugaan sementara bahwa ketidakkonsistenan hasil tersebut disebabkan karena komisaris utama atau presiden komisaris mempunyai peran penting dalam membuat keputusan, sehingga hasil keputusan presiden komisaris yang independen akan berbeda dengan keputusan presiden komisaris yang tidak independen. Oleh karena itu hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H1 : Presiden komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

2.2. Komite Audit Independen dan Manajemen Laba

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa komite audit independen berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Penelitian-penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Xie *et al.*, (2002). Mereka meneliti tentang "manajemen laba dan *corporate governance*: peranan dewan dan komite audit", yang membuktikan bahwa komite audit serta pengalaman tentang finansial anggotanya merupakan faktor penting dalam membatasi kecenderungan manajemen laba. Temuan Xie *et al.* ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Chtourou *et al.*, (2001) yang membuktikan bahwa komite audit membatasi aktivitas manajemen laba.

Hubungan antara karakteristik komite audit dan manajemen laba diteliti oleh Bedard *et al.*, (2004). Karakteristik komite audit diukur dengan keahlian finansial, independensi dan aktivitas komite audit, sedangkan manajemen laba diukur dengan *abnormal accruals*. Menggunakan dua kelompok perusahaan di U.S. yang mempunyai tingkat akrual yang relatif tinggi dan tingkat akrual yang relatif rendah pada tahun 1996 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara manajemen laba dan komite audit, terutama pada keahlian finansial dan independensi anggota komite audit.

Wardhani dan Joseph (2010) meneliti hubungan antara karakteristik ketua komite audit dengan praktik manajemen laba pada suatu perusahaan. Karakteristik ketua komite audit di investigasi dengan umur, latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan, pengalaman menjadi patner dalam kantor akuntan, pengalaman menjadi bagian dari manajemen, dan tingkat pendidikan ketua komite audit. Sedangkan manajemen laba dihitung dengan menggunakan akrual diskresionari model kaznik. Hasilnya menunjukkan bahwa latarbelakang akuntansi dan keuangan berhubungan negatif terhadap manajemen laba. Pengalaman sebagai patner kantor akuntan berhubungan positif signifikan terhadap manajemen laba. Variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh positif dan kesempatan bertumbuh berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

Bukit dan Iskandar (2009) menemukan bahwa surplus *free cash flow* berhubungan positif terhadap manajemen laba dan komite audit independen memoderasi hubungan tersebut sehingga secara efektif menekan atau mengurangi praktik manajemen laba. Penelitiannya menggunakan sampel 155 perusahaan yang terdaftar di bursa Malaysia pada tahun 2001. Carcella (2006) membuktikan bahwa komite audit independen berhubungan negatif non linear terhadap manajemen laba.

Tugas dan tanggungjawab Komite Audit sesuai dengan lampiran keputusan ketua BAPEPAM no. Kep-29/PM/2004 adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan. Dalam aktifitasnya Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penyajian laporan keuangan dan kinerja perseroan secara menyeluruh, serta membahas temuan-temuan audit dengan Manajemen dan memberikan masukan kepada Manajemen dan Dewan Komisaris. Komite Audit juga melakukan interaksi yang intensif dengan Manajemen, Auditor Internal dan Auditor Eksternal, dimana Komite Audit mengandalkan sepenuhnya informasi dari pihak pihak tersebut. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut : (1) memastikan bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan telah memenuhi ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku. (2) memeriksa bahwa risiko-risiko telah dikelola dengan baik dan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan secara memadai. (3) memastikan bahwa aktivitas usaha telah dilaksanakan sesuai dengan etika dan ketentuan yang berlaku. (4) membahas dan memberikan masukan kepada Auditor Internal dalam penyusunan program dan perencanaan audit. (5) membahas temuan-temuan audit Auditor Internal dengan Manajemen.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dan berdasarkan pada tugas dan tanggungjawab komite audit tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa peranan komite audit berkaitan erat dengan kualitas informasi keuangan yang akan disajikan kepada publik. Oleh karena itu sangat beralasan apabila komite audit berpengaruh signifikan dalam membatasi praktik manajemen laba. Penelitian ini akan memperdalam lagi mengenai pengaruh komite audit terhadap manajemen laba, dilihat dari sisi independensi komite audit, dengan demikian hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H2 : komite audit independen berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada industri selain bank, asuransi dan keuangan non bank. Teknik pengambilan sample menggunakan *random sampling*. Sampel penelitian di ambil dari laporan tahunan 2006 sampai 2009, sebanyak 55 perusahaan. Jadi jumlah sampel seluruhnya $55 \times 4 = 220$. Namun setelah dilakukan penghilangan data yang tidak lengkap dan tidak normal sampel seluruhnya menjadi 192 observasi. Daftar sampel dapat dilihat pada lampiran 1.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data skunder, yaitu data yang diperoleh melalui media perantara yang telah dipublikasikan. Data berupa *annual report* dikumpulkan dari Bursa efek Indonesia www.idx.co.id Data pendukung lainnya diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai buku, jurnal ilmiah, mass media, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

3.2. Model Penelitian

Model penelitian ini dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$ML = \alpha + \beta_1 PKI + \beta_2 KAI + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

- ML = Manajemen laba
- PKI = Presiden Komisaris Independen
- KAI = Komite audit independen

3.3. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu CG yang diproksi dengan presiden komisaris independen dan komite audit independen. Sedangkan variabel dependennya adalah manajemen laba yang diproksi dengan *discretionary accruals*.

Untuk mengetahui besarnya *discretionary accruals* perlu diketahui terlebih dahulu berapa besarnya total akrual dan *non-discretionary accruals*. Total akrual dapat diukur dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan arus kas (Shah *et al.*, 2009). Menurut Shah *et al.*, (2009) yang mengutip pendapat Healey (1985) dan Jones (1991), total akrual pada pendekatan neraca dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$TA = \Delta CA - \Delta Cash - \Delta CL + \Delta DCL - DEP \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan :

- TA : adalah total akrual
- ΔCA_t : adalah perubahan aktiva lancar pada tahun t
- $\Delta Cash_t$: adalah perubahan dalam kas dan ekuivalen kas pada tahun t.
- ΔCL_t : adalah perubahan hutang lancar pada tahun t
- ΔDCL_t : adalah hutang termasuk hutang lancar pada tahun t
- DEP_t : adalah biaya depresiasi dan amortisasi dalam tahun t

Total akrual dengan pendekatan laporan arus kas dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$TA_t = N.It - CFO_t \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

- TA_t : adalah total akrual pada tahun t
- N.It : adalah laba bersih pada tahun t
- CFO_t : adalah arus kas dari aktifitas operasi pada tahun t

Shah *et al.*, (2009) menyatakan bahwa para peneliti lebih mengutamakan pendekatan arus kas daripada pendekatan neraca. Pendekatan neraca lebih rendah mutunya daripada pendekatan arus kas, namun beberapa peneliti menggunakan pendekatan neraca karena pendekatan arus kas belum tersedia pada periode pengamatan mereka. Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan arus kas dalam menghitung total akrual.

Total akrual (TACC) terdiri dari *discretionary accruals* (akrual kelolaan) dan *nondiscretionary accruals*. Untuk memperoleh besarnya *discretionary accruals* (DA), maka harus mengurangkan total akrual dengan *non-discretionary accruals* (NDA).

Berdasar pada *Modified Cross Sectional Jones Model* (Shah *et al.* 2009), *discretionary accruals* dapat dihitung dengan mengurangkan *nondiscretionary accruals* dari *total accruals*. *Non discretionary accruals* (NDA) dapat dihitung sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1/TA_{i,t-1}) + \alpha_2 ((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{i,t-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/TA_{i,t-1}) \dots\dots\dots(4)$$

Selanjutnya dilakukan regresi terhadap total akrual dan variabel-variabel lainnya dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$TAC_{it} / TA_{i,t-1} = \alpha_1 (1/TA_{i,t-1}) + \alpha_2 ((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{i,t-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/TA_{i,t-1}) + \epsilon_t \dots\dots\dots(5)$$

Keterangan:

- TAC_{it} = Total Accruals perusahaan i pada periode t
- TA_{i,t-1} = Total aktiva perusahaan i pada periode t-1
- ΔREV_{it} = Pendapatan perusahaan i pada periode t dikurangi pendapatan pada periode t-1
- ΔREC_{it} = Piutang bersih perusahaan i pada periode t dikurangi piutang bersih pada periode t-1
- PPE_{it} = Property plant and equipment perusahaan i pada akhir tahun t.

Setelah dilakukan regresi maka diketahui koefisien α₁, α₂, dan α₃. Selanjutnya nilai koefisien tersebut digunakan untuk menghitung nilai NDA seperti dalam persamaan *modified Jones model di atas*. Setelah diperoleh nilai NDA masing-masing perusahaan maka *discretionary accruals* (DA) dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$DA_{it} = TAC_{it} - NDA_{it} \dots\dots\dots(6)$$

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data menggunakan *multiple regression*. Namun sebelum melakukan uji regresi perlu disampaikan terlebih dahulu hasil statistik deskriptif dan uji asumsi klasik.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Berdasar hasil statistik deskriptif diketahui bahwa sampel yang diamati (N) ada 192, dengan minimum *discretionary accrual* -0,52, dan maksimum 0,71, serta standar deviasi 0,15. Presiden komisaris independen menggunakan variabel *dummy* (independen=1, tidak independen = 0). Sampel yang mempunyai presiden komisaris independen sebanyak 21% dari 192 sampel yang diamati. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai presiden komisaris independen sekitar 41 perusahaan. Statistik deskriptif variabel komite audit independen (KOM-DIT-IND) menunjukkan minimal 0, hal ini berarti bahwa meskipun peraturan BAPEPAM nomor: 29/PM/2004 mensyaratkan sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen menjadi anggota komite (independen), namun sebagian perusahaan belum melaksanakan hal tersebut. Statistik deskriptif komite audit independen menunjukkan angka 1, berarti bahwa meskipun tidak dipersyaratkan oleh peraturan namun seluruh anggota komite auditnya independen, hal ini menunjukkan suatu etiket yang lebih baik dilihat dari sisi pengendalian.

Tabel 1.
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA	192	-.517315589	.713921783	-6.87659773646E-2	.154974187087
PRESKOMIND	192	0	1	.21	.411
KOM-DIT-IND	192	.000	1.000	.38346	.240005
Valid N (listwise)	192				

4.2. Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan hasil regresi yang efisien dan akurat, data harus terbebas dari pelanggaran asumsi klasik. Oleh karena itu berikut ini akan disajikan hasil uji asumsi klasik.

4.2.1. Hasil Uji Normalitas Data Dengan Kolmogorov-Smirnov Test

Berdasarkan pada tabel 2. dapat diketahui bahwa nilai K-S residual dari model regresi sebesar 1,185 dengan probabilitas signifikansi 0,121 dan nilainya di atas 0,05. Hal ini berarti bahwa residual terdistribusi secara normal dan independen.

Tabel 2.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		192
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0255758
	Std. Deviation	.15984073
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.075
	Negative	-.086
Kolmogorov-Smirnov Z		1.185
Asymp. Sig. (2-tailed)		.121

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

4.2.2. Hasil Uji Linearitas Dan Autokorelasi

Berdasar hasil out put SPSS di bawah ini diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,093 berada di atas $dl = 1,75$ (lihat tabel statistik *Durbin-watson*) maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi positif pada model dan tidak terdapat salah spesifikasi.

Tabel 3.
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.101 ^a	.010	.000	.154995519004	2.093

a. Predictors: (Constant), KOM-DIT-IND, PRESKOMIND

4.2.3. Uji Multikolinearitas

Hasil perhitungan nilai *tolerance* dalam tabel 4 dan 5 menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai variance inflation factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Korelasi antar variabel independen juga dibawah 95% oleh karena itu tidak ada multikolinearitas antar variabel independen.

Tabel 4.
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,047	,041		1,165	,246		
PRESKOMIND	-,010	,053	-,014	-,190	,850	,989	1,011
KOM-DIT-IND	-,231	,089	-,184	-2,581	,011	,989	1,011

Tabel 5.
Coefficient Correlations^a

Model		KOM-DIT-IND	PRESKOMIND
1	Correlations	KOM-DIT-IND	1.000
		PRESKOMIND	-.103
Covariances	KOM-DIT-IND	.008	.000
	PRESKOMIND	.000	.003

a. *Dependent Variable: DA*

4.2.4. Uji Heteroskedastisitas Dengan Uji Glejser

Berdasar output SPSS diketahui bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut Ut (AbsUt). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Tabel 6.
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.127	.015		8.396	.000
PRESKOMIND	-.029	.019	-.108	-1.492	.137
KOM-DIT-IND	-.033	.033	-.072	-.998	.319

a. *Dependent Variable: AbsUt*

4.3. Pengujian Hipotesis

Berdasar hasil output SPSS besarnya *adjusted R²* adalah 0.025 hal ini berarti bahwa 2,5% variabel *discretionary accruals* sebagai proksi dari manajemen laba dapat dijelaskan oleh variabel presiden komisaris independen dan komite audit independen. Sedangkan sisanya sebesar 97,5 dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Dari uji anova atau *F test* didapat nilai *F* hitung sebesar 3,432 dengan probabilitas signifikansi 0,034. Oleh karena probabilitas lebih kecil dari pada 0.05 maka variabel presiden komisaris independen dan komite audit independen dapat digunakan untuk memprediksi manajemen laba, meskipun harus dilihat lagi signifikansi masing-masing variabel seperti akan dijelaskan di bawah ini.

Tabel 7.
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.187 ^a	.035	.025	.300380821752

a. Predictors: (Constant), PRESKOMIND, KOM-DIT-IND

Tabel 8.
Anova^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1					
Regression	.619	2	.310	3.432	.034 ^a
Residual	17.053	189	.090		
Total	17.673	191			

4.3.1. Pengaruh Presiden Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba

Variabel presiden komisaris independen merupakan variabel dummy dengan nilai 1 untuk perusahaan yang presiden komisarisnya independen dan 0 jika presiden komisarisnya tidak independen. Berdasar pada tabel 4.9 tentang uji signifikansi parameter individual (uji statistik *t*) menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel presiden komisaris independen menunjukkan arah negatif (-0,009), hal ini berarti bahwa perusahaan yang presiden komisarisnya independen, diskresionari akrualnya lebih rendah 0,009 dibandingkan dengan diskresionari akruaal perusahaan yang presiden komisarisnya tidak independen. Arah negatif ini sesuai dengan teori yang dihipotesiskan bahwa presiden komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Namun dilihat dari signifikansinya, variabel presiden komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba (0,864) oleh karena itu hasil penelitian ini tidak mampu mendukung hipotesis.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan teori yang dihipotesiskan barangkali karena peran dari presiden komisaris independen tidak seefektif dengan yang diharapkan. Ketidakefektifan ini bisa disebabkan banyak hal, misalnya karena: (1) Presiden komisaris dipilih bukan karena kompetensinya dalam melakukan pengendalian terhadap perusahaan, namun misalnya karena ketokohnya di masyarakat, dekat dengan kekuasaan, dekat dengan pemegang saham mayoritas dan sebagainya. (2) Presiden komisaris mempunyai banyak jabatan lain, sehingga tidak mempunyai cukup waktu untuk menjalankan tugasnya dengan lebih detail sampai pada mendeteksi kemungkinan adanya manajemen laba yang menguntungkan sebagian kecil *stakeholder* dan merugikan lainnya. (3) Presiden komisaris tidak mempunyai keahlian dibidang akuntansi dan keuangan, sehingga tidak cukup kompeten untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan terdapatnya manajemen laba.

Tabel 9.
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.047	.041		1.154	.250
Kom-Dit-Ind	-.233	.090	-.186	-2.582	.011
Preskomind	-.009	.053	-.012	-.171	.864

a. Dependent Variable: DA

4.3.2. Pengaruh Komite Audit Independen Terhadap Manajemen Laba

Tabel 9 menunjukkan bahwa koefisien regresi komite audit independen sebesar -0,233 dengan tingkat signifikansi 0,011. Koefisien tersebut bertanda negatif menunjukkan arah hubungan negatif, sesuai dengan teori yang dihipotesiskan. Memperhatikan besarnya tingkat signifikansi 0.011 maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa komite audit independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dapat diterima, artinya hasil penelitian ini mendukung hipotesis. Hasil penelitian ini bermakna bahwa komite audit independen dapat menjadi mekanisme *corporate governance* dalam rangka pengendalian terhadap tindakan manajemen laba di perusahaan. Keberadaan komite audit independen dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen dalam bentuk manajemen laba.

Hasil temuan ini juga sesuai dengan peran komite audit yang cukup penting berkaitan dengan laporan keuangan, yaitu melakukan evaluasi terhadap penyajian laporan keuangan, membahas temuan-temuan audit dengan manajemen dan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan peran yang diembannya tersebut komite audit yang independen dapat lebih berfungsi dalam membatasi perilaku oportunistik manajemen daripada komite audit yang tidak independen.

4.3.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba

Penelitian ini juga menguji variabel lain yang tidak masuk dalam hipotesis sebagai variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan. Nuryaman (2008) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan nilai log total aktiva pada akhir tahun pengamatan. Hal ini tidak sama dengan yang digunakan oleh Nuryaman (2008), yang menggunakan nilai log total penjualan perusahaan pada akhir tahun.

Berdasar pada tabel 10, 11, dan 12, menunjukkan bahwa Adjusted R Square negatif, nilai F = 0.296 dengan signifikansi 0,587, hal ini berarti bahwa variabel ukuran perusahaan tidak dapat digunakan sebagai mekanisme pengendalian manajemen laba. Berdasar pada koefisien regresi menunjukkan arah negatif yang berarti semakin besar perusahaan semakin rendah tingkat manajemen labanya, arah ini sesuai dengan teori yang dihipotesiskan. Namun tingkat signifikansi yang menunjukkan angka 0,587 berarti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya (Nuryaman, 2008), barangkali karena proksi yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan berbeda.

Tabel 10.
Model summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.040 ^a	.002	-.004	.303912141189

a. Predictors: (Constant), LOGTA

Tabel 11.
ANOVA^b

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.027	1	.027	.296	.587 ^a
	Residual	17.457	189	.092		
	Total	17.484	190			

a. Predictors: (Constant), LOGTA

b. Dependent Variable: DA

Tabel 12.
Coefficients^a

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.151	.358		.423	.673
	LOGTA	-.016	.029	-.040	-.544	.587

a. Dependent Variable: DA

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit independen berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan presiden komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan pada manajemen laba. Diketahui pula bahwa pada perusahaan yang presiden komisarisnya independen diskresionari akrualnya lebih rendah 0,009 dibandingkan dengan diskresionary akrual pada perusahaan yang presiden komisarisnya tidak independen. Variabel kontrol ukuran perusahaan menggunakan log total aktiva tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

5.2. Keterbatasan dan saran penelitian lanjutan

- 1) Penelitian ini menggunakan sampel 55 perusahaan selain bank, asuransi dan keuangan non bank, yang diambil secara acak, dengan tahun pengamatan dari tahun 2006 sampai dengan 2009. Hal ini merupakan keterbatasan karena jenis industri tertentu biasanya mempunyai karakteristik tertentu, sedangkan dalam penelitian ini perusahaan dagang dianalisis bersamaan dengan perusahaan real estate, perusahaan pertambangan maupun pada perusahaan industri makanan. Penelitian selanjutnya bisa menguji dengan memilah-milah jenis sampel berdasarkan pada industri tertentu.
- 2) Melihat *adjusted R square* yang sangat rendah baik pada penelitian ini yaitu sebesar 0,025 maupun pada penelitian sebelumnya (Nuryaman, 2008 dan Wardhani dan Joseph, 2010) berarti bahwa terdapat faktor-faktor lain yang lebih dapat digunakan sebagai faktor penjelas terdapatnya manajemen laba. Oleh karena itu penelitian selanjutnya sebaiknya menggali faktor-faktor lain tersebut.

5.3. Implikasi Penelitian

- 1) Implikasi pada praktik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit yang independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sementara itu pada *annual reports* 2009 masih banyak perusahaan yang belum mengungkapkan tentang independensi komite audit, meskipun sudah ada peraturan tentang hal tersebut. Oleh karena itu kepada yang mempunyai otoritas pasar modal BAPEPAM pelaksanaan peraturan tentang komite audit independen ini masih harus terus dipantau dan ditingkatkan.

2) Implikasi teoritis.

Hasil penelitian ini dapat menambah literatur tentang mekanisme *corporate governance* sebagai salah satu alat kontrol perusahaan. Hasil penelitian ini menambah literatur tentang tidak berpengaruhnya dewan komisaris terhadap manajemen laba, dilihat dari sisi presiden komisaris. Seperti disampaikan di atas, penelitian Nuryaman (2008) menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris juga tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian di luar Indonesia dan tidak sesuai dengan teori yang digunakan. Oleh karena itu riset selanjutnya bisa dilakukan lebih konsentrasi pada siapa sebenarnya dewan komisaris, apa tanggungjawab, tugas, dan wewenang sebenarnya dewan komisaris di Indonesia. Apakah terdapat perbedaan peran, tanggungjawab, tugas dan wewenang dewan komisaris di Indonesia dengan di negara lain, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin bisa dijawab kalau dilakukan riset yang mendapam tentang dewan komisaris di Indonesia?.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Pasar Modal, (2004), "Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit".
- Badan Pengawas Pasar Modal, (2003), "Peraturan nomor VIII.G.11, Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-40/PM/2004 tentang tanggungjawab direksi atas laporan keuangan".
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, (2006), "Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep- 136/BI/2006 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun".
- Bank Indonesia, (2006), Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/Pbi/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/Pbi/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum".
- Bedard, J., S.M. Chtourou dan L. Courteau., (2004), "The Effect of Audit Committee Expertise, Independence, and Activity on Aggressive Earnings Management", *Auditing: A Journal of practice & theory* 23 (2), pp. 13-35.
- Benkraiem, R., (2009), "Does The Presence of Independent Directors Influence Accruals Management?". *Journals of Applied Business Research* 25(6). pp. 77-86.
- Bursa Efek Indonesia, (2010), Annual Report", www.idx.co.id
- Bukit, R.BR., T.M. Iskandar, (2009), . Surplus Free Cash Flow, Earnings Management and Audit Committee. *Int. Journal of Economic and Management* 3(1), pp. 204-223.
- Cahan, S.F., (1992)., "The Effect of antitrust investigations on discretionary accruals, A refined test of the political - cost hypothesis", *The Accounting Review*, 67 (1), pp. 77-99.
- Chalevas dan Tzovas, (2010), "The effect of the mandatory adoption of corporate governance mechanisms on earnings manipulation, management effectiveness and firm financing evidence from greece", *Managerial Finance* 36 (3), pp.257-277.
- Chtourou SM., J. Bédard, dan L. Courteau, (2001), "Corporate governance and earnings management", *available at SSRN-1d275053*.
- Cornett M.M., A.J. Marcus, A.Saunders, dan H. Tehranian, (2006), "Earnings management, corporate governance, and true financial performance", *Ssrn-id886142*
- Ghozali, I., (2005), "Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS, *Badan Penerbit UNDIP*.
- Givoly, D., C.K. Hayn, dan S.P. Katz, (2010), Does public ownership of equity improve earnings quality?, *The Accounting Review* 85 (1), pp. 195–225.
- Huang P., T.J. Louwers., J.S. Moffitt, dan Y. Zhang, (2008). Ethical management, corporate governance, and abnormal accruals, *Journal of Business Ethics* 83, pp. 469–487.
- Jensen M.C. dan W.H. Meckling, (1976), "Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure", *Journal of Financial Economics*, 3 (4), pp. 305-360. *Ssrn id-94043*.

- Carcello, J.V., C.W. Hollingsworth, A.Klein, dan T.L. Neal, (2006), "Audit Committee Financial Expertise, Competing Corporate Governance Mechanisms, and Earnings Management". Available at SSRN-id887512
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG), (2004), "*Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*".
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), (2006), "*Pedoman Umum GCG Indonesia*".
- Menteri BUMN, (2002), "Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN".
- Machuga, S. Dan Teitel, K., (2007), "The Effects of The Mexican Corporate Governance Code on Quality of Earnings and its Components". *Journal of International Accounting Research*. 6(1), pp. 37-55
- Nuryaman, (2008), "Pengaruh konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba", *Simposium Nasional Akuntan 11*, Pontianak.
- Peraturan Menteri Negara BUMN, (2006), Nomor: PER-05/MBU/2006 tentang komite audit bagi BUMN.
- Shah, S.Z.A, S.A. Butt, dan A. Hasan, (2009), Corporate governance and earnings management an empirical evidence form pakistani listed companies, *European Journal of Scientific Research*, 26 (4), pp. 624-638. <http://www.eurojournals.com/ejsr.htm>.
- Sivaramakrishnan K. dan S.C. Yu, (2008), "On the association between corporate governance and earnings quality", *available at: <http://ssrn.com/abstract=1014243>*
- Wardhani, R. dan H. Joseph, (2010), "Karakteristik Pribadi Komite Audit Dan Praktik Manajemen Laba". Simposium Nasional Akuntan XIII Purwokerto.
- Wright, C.J., J.R. Shaw dan L.Guan, (2006), "Corporate Governance and Investor Protection: Earnings Management in The U.K. and U.S". *Journal of International Accounting Research* 5 (1), pp. 25-40.
- Xie B., W.N. Davidson, dan P.J. DaDalt, (2002), "Earnings management and corporate governance: the roles of the Board and the Audit Committee", *Journal of Corporate Finance, Forthcoming* <http://ssrn.com/abstract=309639>
- Zhao, Y., dan K. H. Chen, (2008), "Staggered Boards dan earnings management", *The Accounting Review* 83 (5): 1347-1381.

ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI, SANKSI DAN FAKTOR-FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB DI SURAKARTA

Amalia Kurniati
Universitas Kristen Satya Wacana
Email: ama_leya@yahoo.co.id

Sotya Fevriera
Universitas Kristen Satya Wacana
Email: sotya.fevriera@staff.uksw.edu

Abstract

Land and building tax is one of tax types in Indonesia. The purpose of this research is to determine whether tax socialization, tax penalty and demography factors affect taxpayer's obedience in paying tax on land and buildings in Surakarta. Sample size in each main district in Surakarta was determined by stratified random sampling method while in each district sample was collected by convenience sampling method.

Based on logistic regression analysis, it can be concluded that level of taxpayer's understanding about land and building tax penalty, taxpayer's age and education level have positive influences while taxpayer's income have negative influence on the possibility that the taxpayers will be obedience in paying land and building tax. This research also found that taxpayer's living district could have influence on the differences of possibility that the taxpayers will be obedience in paying land and building tax according to taxpayer's living district.

Keywords: *taxpayer's obedience, land and building tax socialization, land and building tax penalty, demography factors*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai pihak yang menjalankan penyelenggaraan Negara membutuhkan dana untuk membiayai semua pengeluaran Negara. Dana yang diperlukan oleh pemerintah salah satunya bersumber dari rakyat dalam bentuk pajak. Pajak memiliki dua fungsi yang sangat penting dalam pembangunan nasional yaitu fungsi mengatur dan fungsi pendanaan. Salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menyadari bahwa penerimaan negara yang terbesar berasal dari pajak, pemerintah melakukan berbagai upaya agar masyarakat patuh dalam membayar pajak, antara lain dalam bentuk pemberian sanksi bagi Wajib Pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PBB. Mardiasmo (2009) mengatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Jadi sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah dimaksudkan agar yang menjadi Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak (membayar sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran PBB atau mencegah Wajib Pajak PBB yang mempunyai niat untuk tidak membayar PBB).

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar PBB itu amat diperlukan. Karena itu, upaya lain yang dilakukan pemerintah agar Wajib Pajak memiliki kepatuhan dalam membayar PBB adalah melalui sosialisasi.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta selalu berupaya memaksimalkan penerimaan pajak setiap tahunnya dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah (pemda) berupa penagihan aktif seperti memberikan surat paksa kepada Wajib Pajak yang tidak membayar PBB, kegiatan penyitaan terhadap barang Wajib Pajak yang tidak membayar PBB serta kegiatan pelelangan apabila Wajib Pajak dalam batas yang ditentukan belum juga membayar PBB. Pemerintah kota Surakarta juga telah melakukan berbagai upaya agar penerimaan PBB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seperti melakukan sosialisasi mengenai PBB melalui kelurahan, pemasangan spanduk agar Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB tepat waktu serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pembayaran PBB (Harian Seputar Indonesia, 9 Nopember 2009)¹.

Meskipun ada Wajib Pajak yang menjadi patuh dalam membayar PBB karena tidak ingin dikenai sanksi seperti telah diatur dalam Undang – Undang No. 12 tahun 1994 mengenai PBB ataupun karena telah memperoleh sosialisasi mengenai PBB, tetapi pada tahun 2007 realisasi PBB belum mencapai 100% (92,8%). Menurut Untara (Koran Tempo, 17 Desember 2008)² setiap tahun rata-rata tunggakan PBB mencapai Rp 2 miliar.

Dari hasil kajian pustaka yang dapat dibaca pada bagian tinjauan literatur, diketahui faktor-faktor demografi dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Peneliti juga menemukan masih ada Wajib Pajak yang menyatakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai PBB dari pemerintah kota Surakarta dan ada Wajib Pajak yang tidak mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai sanksi yang akan diperoleh ketika mereka tidak membayar PBB tepat waktu. Dengan latar belakang fenomena tersebut, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah apakah sosialisasi, pemahaman sanksi dan faktor-faktor demografi mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di kota Surakarta? Melalui penelitian ini akan diidentifikasi manakah dari faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di kota Surakarta.

2. STUDI TERKAIT/SEBELUMNYA

2.1. Pajak Bumi dan Bangunan

Devano dan Rahayu (2006) mengatakan sejarah PBB di Indonesia dimulai dari pengenaan pajak tanah (*land rent*) oleh pemerintah kolonial Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stanford Raffles pada abad XIX, tepatnya tahun 1813 di pulau Jawa. Dalam perkembangan telah dibuatkan peraturan perundang–undangan yang mengenai PBB. Pemerintah juga telah banyak mengadakan pembaruan dan penggantian atas peraturan perundang–undangan yang mengatur PBB.

Menurut Mardiasmo (2009), dasar hukum PBB adalah Undang – Undang No. 12 tahun 1985³ sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 12 tahun 1994⁴. Berdasarkan undang-undang tersebut, PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan, di mana pengertian bumi dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Subyek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian subyek PBB adalah menurut Waluyo (2007) adalah Wajib Pajak PBB. Sedangkan yang menjadi obyek PBB adalah bumi dan bangunan. Adapun yang tidak termasuk dalam obyek PBB sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 pasal 3 adalah obyek pajak yang: (1) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; (2) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; (3) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum di bebani suatu hak; (4) digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan (5) digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

1 di-download dari www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=7628&q=&hlm=1# tahun 2010

2 di-download dari www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=4219, 2010

3 di-download dari www.pajak.go.id/index.php?option=com_peraturan&Itemid=205&lgkp=1&idp=13, 2010

4 di-download dari www.pajak.go.id/index.php?option=com_peraturan&Itemid=205&lgkp=1&idp=18, 2010

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Menurut Devano dan Rahayu (2006), dalam bidang perpajakan istilah kepatuhan memiliki arti ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan peraturan perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada sehingga mereka mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Sementara Safri Nurmantu (Devano dan Rahayu, 2006) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu⁵ sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000⁶ yaitu:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
- 4) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Dari 4 kriteria di atas, hanya 3 kriteria pertama yang digunakan untuk mengidentifikasi kepatuhan Wajib Pajak yang dalam penelitian ini bersifat perorangan. Apabila salah satu dari kriteria di atas ada yang tidak terpenuhi, maka Wajib Pajak akan dikategorikan ke dalam kelompok Wajib Pajak yang tidak patuh.

Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak terhadap PBB akan berdampak pada peningkatan penerimaan Negara. Apabila penerimaan Negara meningkat maka pemerintah dapat melakukan pembangunan nasional secara baik tanpa harus terganggu dengan masalah biaya yang harus dikeluarkannya dalam melakukan program pembangunan nasional.

2.3. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Waluya (2007) mengatakan sosialisasi adalah suatu proses bagaimana seorang individu belajar menghayati berbagai macam nilai, sikap, dan pola-pola perilaku dalam masyarakatnya sehingga ia dapat menjadi anggota masyarakat yang berpartisipasi. Sementara menurut Murdiyatomoko (2007), sosialisasi merupakan proses yang menjadikan seseorang mempelajari cara hidup masyarakat untuk mengembangkan potensinya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok, sesuai dengan nilai, norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Pemerintah kota Surakarta, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, dan KPP Pratama Surakarta telah melakukan sosialisasi mengenai PBB dalam berbagai bentuk, yaitu: (1) safari kelurahan; (2) pengadaan *mobile tax unit* (mobil pajak berwarna biru yang bergerak) kecamatan; (3) pemasangan spanduk/baliho dan sejenisnya mengenai PBB di tempat-tempat yang strategis seperti di kantor kecamatan, di kantor kelurahan, dan lain-lain; (4) penayangan informasi yang berkaitan dengan PBB melalui stasiun televisi lokal (TATV); (5) pemberitaan mengenai PBB (tanggal jatuh tempo, dll) melalui koran Solopos; (6) siaran radio yang membahas mengenai pajak, termasuk di dalamnya PBB; (7) pembagian majalah pajakita yang dibuat oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II secara gratis; (8) penyelenggaraan seminar-seminar mengenai pajak (termasuk di dalamnya PBB); dan (9) pemberian informasi mengenai pajak (termasuk di dalamnya PBB) melalui internet (www.pajak.go.id).

Melalui safari kelurahan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PBB serta Wajib Pajak bisa mendapatkan penjelasan mengenai PBB seperti tanggal jatuh tempo pembayaran PBB, sanksi PBB, dll yang dapat ditanyakan kepada petugas yang ada. Sementara melalui *mobile tax unit*, tim eksentifikasi dapat memberikan penjelasan

5 di-download dari www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=450&catid=110&Itemid=44, 2010

6 di-download dari www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=270, 2010

mengenai semua jenis pajak namun pada *mobile tax unit* tidak ada kegiatan pembayaran. Berdasarkan hasil wawancara, kecamatan Banjarsari yang paling banyak dikunjungi oleh *mobile tax unit*.

Kurniawan (2006)⁷ dalam penelitiannya menyimpulkan sosialisasi PBB berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya sosialisasi, maka Wajib Pajak yang sebelum ikut sosialisasi tidak menyadari pentingnya membayar PBB dapat mengerti pentingnya membayar PBB serta diharapkan menjadi patuh dalam melakukan pembayaran PBB, sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis:

Jumlah sosialisasi PBB yang pernah didapatkan oleh Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB.

2.4. Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi menurut Waluya (2007) adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang diberikan terhadap seseorang atas perilakunya. Dengan demikian, sanksi dapat berupa hadiah (*reward*) atau berupa hukuman (*punishment*). Menurut Undang – Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 pasal 24 sampai dengan pasal 27 sanksi PBB dapat berupa:

- 1) Pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali pajak yang terhutang apabila karena kealpaannya (menurut pasal 27 ayat 1 tindakan ini termasuk pelanggaran), Wajib Pajak: (a) tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak atau (b) menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar; sehingga menimbulkan kerugian pada Negara (pasal 24).
- 2) Pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 kali pajak yang terhutang apabila Wajib Pajak dengan sengaja (menurut pasal 27 ayat 2 tindakan ini termasuk kejahatan): (a) tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak, (b) menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar, (c) memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, (d) tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya atau (e) tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan; sehingga menimbulkan kerugian pada Negara (pasal 25 ayat 1).
- 3) Pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000 terhadap bukan Wajib Pajak yang bersangkutan, yang tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya serta tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan (menurut pasal 27 ayat 1 tindakan ini termasuk pelanggaran).
- 4) Ancaman pidana seperti disebut dalam butir 2) dapat dilipatkan dua apabila Wajib Pajak melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarkan denda (pasal 25 ayat 3).

Setelah lebih dari 10 tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25 tidak dapat dituntut (pasal 26). Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 disebutkan pula apabila Wajib Pajak tidak atau kurang membayar PBB pada saat jatuh tempo pembayaran, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan (pasal 11 ayat 3). Bida (2001) menyatakan adanya sanksi administratif yang akan merugikan Wajib Pajak secara keuangan menyebabkan Wajib Pajak tergugah untuk membayar pajak. Dalam penelitian ini, setiap indikator sanksi di atas diukur dengan skala likert yang terdiri dari 5 skala, yaitu: (1) sama sekali tidak paham, (2) kurang paham, (3) ragu-ragu, (4) paham dan (5) sangat paham.

⁷ di-download dari www.pustakaskripsi.com/pengaruh-sosialisasi-pajak-bumi-dan-bangunan-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak-di-kabupaten-kudus-3310.html, 26 Agustus 2011

Feriyani (2007) dalam penelitiannya menemukan persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak PBB. Hal itu berbeda dengan temuan Subianto (2006) di mana pemahaman Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesanggupan pembayaran PBB. Hal serupa ditemukan oleh Bida (2001) yang dalam penelitiannya menyimpulkan pemahaman tentang sanksi denda berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di kota Salatiga serta Wibowo (2005) yang menyimpulkan persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi denda PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran perpajakan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Menurut Winkel (1991), pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Karena itu, pemahaman Wajib Pajak terhadap sanksi PBB diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB sehingga sejalan dengan mayoritas temuan hasil penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis:

Tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai sanksi PBB berpengaruh positif terhadap peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB.

2.5. Faktor-Faktor Demografi

Jackson dan Milliron (Richardson, 2006⁸; Roshidi bin Ahmad, *et al.*, 2007⁹; James dan Edwards, 2008¹⁰) mengidentifikasi ada 14 faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, tingkat pendapatan, sumber pendapatan, pekerjaan, pengaruh relasi, etika atau moral, persepsi terhadap keadilan sistem pajak, kompleksitas (sistem pajak), hubungan dengan pihak yang berwenang menerima pajak, peluang pendeteksian (kemungkinan diaudit), sanksi hukum dan tingkat pajak. Beberapa faktor yang disebutkan Jackson dan Milliron merupakan faktor demografi, yaitu faktor yang terkait dengan struktur penduduk dan faktor yang dapat menyebabkan perubahan struktur penduduk. Kornhauser (2007)¹¹ menemukan hal serupa. Menurutnya berbagai faktor demografi seperti usia, jenis kelamin dan religiusitas juga berkorelasi dengan perilaku kepatuhan pajak. Dalam penelitian ini, faktor-faktor demografi yang diselidiki meliputi pendidikan, usia, pendapatan, jenis kelamin, kecamatan tempat tinggal, dan pekerjaan Wajib Pajak.

2.5.1. Pendidikan Wajib Pajak

Arbi dan Syahrin (1991) dalam buku Dasar-Dasar Kependidikan mengatakan pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Menurut Bida (2001), pendidikan Wajib Pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan Wajib Pajak dalam membangun sikap dan tatalaku, pengetahuan dan keterampilan melalui pengajaran dan latihan yang berguna bagi perkembangannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan terakhir Wajib Pajak dibedakan menjadi 6 tingkatan yaitu: (1) tidak sekolah/tidak tamat SD, (2) SD, (3) SMP/SLTP/ yang sederajat, (4) SMA/SLTA/ yang sederajat, (5) Akademi (D_1, D_2, D_3), dan (6) Perguruan Tinggi (S_1, S_2, S_3).

Wibowo (2005) dalam penelitiannya menemukan pendidikan Wajib Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran perpajakan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Bida (2001) yang menyimpulkan pendidikan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Salatiga. Menurutnya, perbedaan tingkat pendidikan dalam suatu masyarakat dapat menyebabkan perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat, begitu juga pengetahuan dan sikap terhadap peraturan perpajakan. Apabila Wajib Pajak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka Wajib Pajak tersebut akan memiliki kemampuan yang lebih tinggi pula dalam mengetahui informasi yang berkaitan dengan pajak sehingga mereka akan patuh dalam membayar PBB karena mereka mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran PBB, sanksi yang akan mereka dapatkan jika mereka tidak membayar PBB tepat pada waktunya. Merujuk pada penelitian Bida, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis:

Pendidikan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB.

8 di-download dari acctlib.ui.ac.id/file?file=digital/3783-Richardson.pdf, 25 Agustus 2011

9 di-download dari ibacnet.org/bai2007/proceedings/Papers/2007bai7357.doc, 25 Agustus 2001

10 di-download dari www.eap-journal.com/download.php?file=659, 25 Agustus 2011

11 di-download dari www.irs.gov/pub/irs-utl/arc_2007_vol_2.pdf, 28 Juli 2011

2.5.2. Usia Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa usia berarti lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan). Usia dapat digolongkan ke dalam usia produktif dan usia yang tidak produktif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia seseorang dikatakan pada usia produktif ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Dalam penelitian ini, usia responden dikelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu: (1) < 17 tahun, (2) 17 tahun – < 34 tahun, (3) 34 tahun – < 51 tahun, (4) 51 tahun – < 68 tahun dan (5) ≥ 68 Tahun.

Usia merupakan salah satu faktor demografi yang menurut Kornhauser (2007) serta Jackson dan Milliron (Richardson, 2006; Roshidi bin Ahmad, *et al.*, 2007; James dan Edwards, 2008) biasanya mempunyai korelasi atau berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pembayar pajak. Perbedaan usia antara Wajib Pajak satu dengan yang lain diduga membuat perbedaan pula dalam cara mereka berfikir dan bertindak mengenai PBB sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis:

Usia Wajib Pajak berpengaruh terhadap peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB.

2.5.3. Pendapatan Wajib Pajak

Penghasilan menurut Mardiasmo (2009) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Karena kuesioner penelitian ini disusun pada akhir tahun 2010, maka dalam penelitian ini besarnya pendapatan dikelompokkan dengan mempertimbangkan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) di kota Surakarta tahun 2010 yaitu: (1) < Rp 785.000, (2) Rp 785.000 – < Rp 1.570.000, (3) Rp 1.570.000 – < Rp 2.355.000, (4) Rp 2.355.000 – < Rp 3.140.000, dan (5) Rp ≥ 3.140.000.

Bida (2001) dalam penelitiannya menemukan pendapatan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Salatiga. Hasil serupa ditemukan Feriyani (2007) dalam penelitiannya yang menyimpulkan penghasilan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban PBB sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis:

Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB di Kota Surakarta.

2.5.4. Jenis Kelamin Wajib Pajak

Dalam bahasa Inggris, jenis kelamin disebut dengan *gender*. Menurut Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (Natalia, 2009), *gender* diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kasipillai dan Jabbar (2006)¹² dengan menggunakan analisis regresi menunjukkan jenis kelamin secara statistik signifikan mempengaruhi sikap ketidakpatuhan pajak. Menurut Kasipillai dan Jabbar (2006), Jackson dan Milliron juga menemukan gender merupakan salah satu faktor signifikan yang mempengaruhi sikap kepatuhan pajak dan perilaku pembayar pajak. Sour (2009)¹³ mengatakan jenis kelamin adalah variabel *sociodemographic* yang paling signifikan dalam menjelaskan pemenuhan pajak penghasilan perorangan di Meksiko. Menurut Kornhauser (2007), pada umumnya bukti menunjukkan bahwa perempuan lebih patuh membayar pajak daripada laki-laki. Berdasarkan penjabaran di atas, maka diduga perbedaan jenis kelamin juga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis:

Peluang Wajib Pajak wanita untuk patuh dalam membayar PBB berbeda dengan Wajib Pajak pria.

2.5.5. Kecamatan Tempat Tinggal Wajib Pajak

Perbedaan tempat tinggal Wajib Pajak dapat membuat perbedaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Hal ini dapat terlihat dari adanya perbedaan besarnya tunggakan PBB antar kecamatan

12 di-download dari web.usm.my/aamj/11.2.2006/AAMJ%2011-2-5.pdf, 28 Juli 2011

13 di-download dari www.cide.edu/publicaciones/status/dts/DTAP%20239.pdf, 28 Juli 2011

yang ada di kota Sukoharjo (Harian Seputar Indonesia, 17 Oktober 2010)¹⁴. Kota Surakarta memiliki 5 kecamatan, yaitu Banjarsari, Jebres, Laweyan, Pasar Kliwon dan Serengan. Dalam penelitian kecamatan Laweyan dipilih untuk menjadi pembanding bagi kecamatan lainnya sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis:

Peluang Wajib Pajak di kecamatan Laweyan untuk patuh dalam membayar PBB berbeda dengan Wajib Pajak yang tinggal di wilayah kecamatan lain.

2.5.6. Pekerjaan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), salah satu definisi pekerjaan adalah pencaharian, yang dijadikan pokok penghidupan atau sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah. Dalam penelitian ini pekerjaan Wajib Pajak dikelompokkan menjadi 5 kategori yaitu pegawai negeri, pegawai swasta, wirausahawan, pensiunan dan kelompok pekerjaan lainnya yang belum termasuk ke dalam 4 kategori pekerjaan sebelumnya.

Hasil studi literatur Jackson dan Milliron (Richardson, 2006; Roshidi bin Ahmad, *et al.*, 2007; James dan Edwards, 2008) menunjukkan pekerjaan merupakan salah satu variabel yang paling sering menjadi fokus penelitian dan ditemukan mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak. Dalam penelitian ini, pegawai negeri yang merupakan jenis pekerjaan yang paling dekat dengan pemerintah daerah dipilih untuk menjadi pembanding bagi jenis pekerjaan lainnya dan dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis:

Peluang Wajib Pajak yang bekerja sebagai pegawai negeri untuk patuh dalam membayar PBB berbeda dengan Wajib Pajak untuk jenis pekerjaan lainnya.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer, dengan sumber data atau populasi berupa subyek atau Wajib PBB yang berada di kota Surakarta. Karena peneliti tidak dapat memperoleh data Wajib Pajak, maka sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan jumlah obyek PBB. Adapun ukuran sampel dalam penelitian ini ditentukan

dengan formula Yamane (Supramono, 2003): $n = \frac{N}{N \cdot d + 1}$, di mana: n = jumlah sampel yang akan diteliti, N =

jumlah populasi obyek PBB, dan d = persentase kelonggaran penelitian karena pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir. Dengan jumlah obyek PBB tahun 2010 yang tercatat pada aplikasi SISMIOP (Sistem Informasi Obyek Pajak) KPP Pratama Surakarta sebanyak 133.219 dan persentase kelonggaran yang ditetapkan peneliti

sebesar 0,1 (10%), maka ukuran sampel dalam penelitian ini adalah $n = \frac{133.219}{133.219 \times (0,1)^2 + 1} = 99,924992 \approx 100$.

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode *stratified random sampling* di mana dari masing – masing kecamatan diambil sampel proporsional terhadap jumlah obyek PBB di tiap kecamatan yang dapat dilihat dalam tabel 1. Selanjutnya di setiap kecamatan, sampel diambil dengan metode *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel di mana peneliti memilih sampel dari anggota populasi yang bersedia menjadi responden (Supramono, 2003). Dalam pelaksanaan, data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada pembayar PBB karena Wajib Pajak belum tentu orang yang membayar.

Tabel 1.
Jumlah Sampel Per Kecamatan di kota Surakarta

No	Kecamatan	Ukuran Populasi ⁽¹⁾	Ukuran Sampel ⁽²⁾
1	Banjarsari	44.138	33
2	Jebres	35.556	26

14 di-download dari www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=10320&q=sindo&hlm=8, 2010

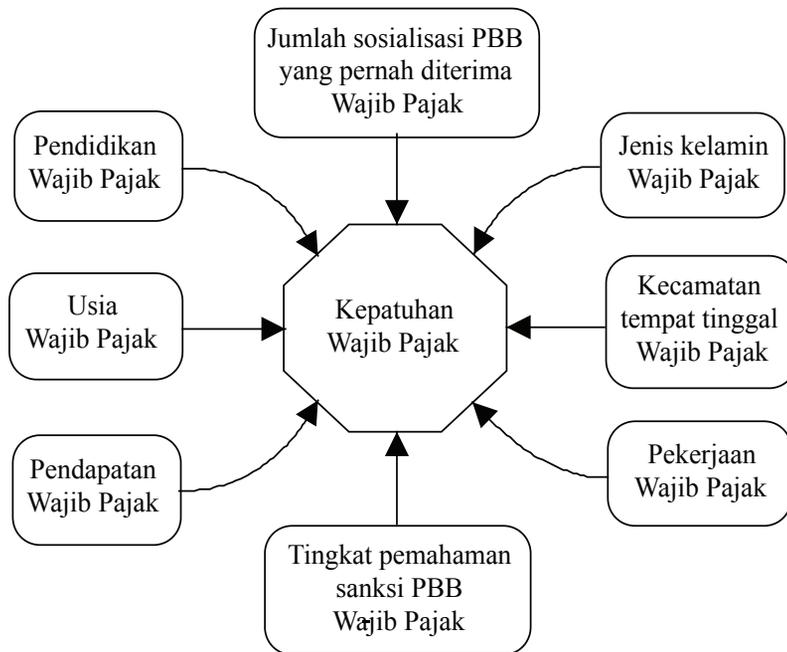
3	Laweyan	21.004	16
4	Pasar Kliwon	20.883	16
5	Serengan	11.638	9
	Total	133.219	100

Sumber: 1) KPP Pratama Surakarta

2) $n_i = \frac{N_i}{N} \times n$, dengan: n = ukuran sampel, N = ukuran populasi, i = kecamatan

3.2. Model Penelitian

3.2.1. Model Teoritis



Gambar 1.
Model Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka di atas disusun model penelitian yang dapat dilihat dalam gambar 1. Karena menurut Ghozali (2006) setiap variabel *dummy* hanya dapat menyatakan 1 kategori variabel independen non-metrik dan setiap variabel non-metrik dengan k kategori diwakili oleh k-1 variabel *dummy*, maka dalam penelitian ini model disusun model regresi logistik (model logit) sebagai berikut:

$$Ln \frac{p}{1-p} \ln \frac{P(X_1, \dots, X_4)}{1 - P(X_1, \dots, X_4)} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9 + \beta_{10} X_{10} + \beta_{11} X_{11} + \beta_{12} X_{12} + \beta_{13} X_{13} + \beta_{14} X_{14} + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

di mana:

$P(X_1, \dots, X_{14})$	=	peluang Wajib Pajak patuh dalam membayar PBB
$1 - P(X_1, \dots, X_{14})$	=	peluang Wajib Pajak tidak patuh dalam membayar PBB
X_1	=	jumlah sosialisasi PBB yang pernah didapatkan oleh Wajib Pajak
X_2	=	rata-rata tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai sanksi PBB
X_3	=	pendidikan Wajib Pajak
X_4	=	kelompok usia Wajib Pajak
X_5	=	kelompok pendapatan Wajib Pajak per bulan
X_6	=	jenis kelamin Wajib Pajak
X_7	=	Wajib Pajak yang tinggal di kecamatan Banjarsari
X_8	=	Wajib Pajak yang tinggal di kecamatan Jebres
X_9	=	Wajib Pajak yang tinggal di kecamatan Pasar Kliwon
X_{10}	=	Wajib Pajak yang tinggal di kecamatan Serengan
X_{11}	=	Wajib Pajak yang bekerja sebagai pegawai swasta
X_{12}	=	Wajib Pajak yang bekerja sebagai wirausahawan
X_{13}	=	Wajib Pajak yang merupakan pensiun
X_{14}	=	Wajib Pajak yang pekerjaannya termasuk kategori lainnya
β_0	=	konstanta dari model regresi logistik
β_i	=	koefisien regresi dari variabel bebas ke- i untuk $i = 1, 2, \dots, 14$
ε	=	<i>error</i> model.

3.2.2. Tahapan Pengujian

3.2.2.1. Menilai/Menguji Ketepatan Model

3.2.2.1.1. Analisis Terhadap Nilai Pseudo R^2

Dalam penelitian ini akan digunakan nilai R^2 *Nagelkerke* yang menunjukkan persentase variasi nilai variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas melalui model yang disusun (Hair, 2006).

3.2.2.1.2. Uji *Hosmer* dan *Lemeshow*

Uji *Hosmer* dan *Lemeshow* digunakan untuk mengetahui apakah model yang dibangun mampu mewakili data observasi dengan baik (Hair, 2006). Jika nilai signifikansi (*p-value*) statistik uji *Hosmer* dan *Lemeshow* $< \alpha = 0,1$, artinya model yang dibangun tidak mampu mewakili data observasi dengan baik.

3.2.2.1.3. Analisis Terhadap Tabel Klasifikasi

Tabel klasifikasi menunjukkan perbandingan antara nilai variabel tak bebas yang diperoleh dari hasil observasi dengan variabel tak bebas yang diperoleh dari hasil prediksi model. Semakin banyak persentase nilai variabel tak bebas dari hasil observasi yang dapat diprediksi dengan tepat, artinya model yang dibangun semakin baik (Hair, 2006).

3.2.2.2. Uji *Omnibus*

Uji *Omnibus* digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen dalam model (Bowerman, *et al.*, 2007). Seluruh variabel bebas tepat dimasukkan ke dalam model apabila nilai signifikansi statistik ujinya kurang dari $\alpha = 0,1$.

3.2.2.3. Uji Wald

Uji Wald digunakan untuk menguji pengaruh dari setiap variabel bebas secara individual terhadap variabel independen dalam model (Hair, 2006). Nilai signifikansi statistik uji Wald yang kurang dari $\alpha = 0,1$ menunjukkan variabel bebas mempunyai pengaruh, pengaruh positif atau pengaruh negatif

3.2.3. Metode Analisis Data

3.2.3.1. Analisis Statistika Deskriptif

Dalam penelitian ini analisis statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik Wajib Pajak, rangking media sosialisasi yang pernah diterima Wajib Pajak, rata-rata jumlah media sosialisasi yang pernah diterima Wajib Pajak, rata-rata tingkat pemahaman sanksi Wajib Pajak dan proporsi Wajib Pajak yang patuh dalam membayar PBB.

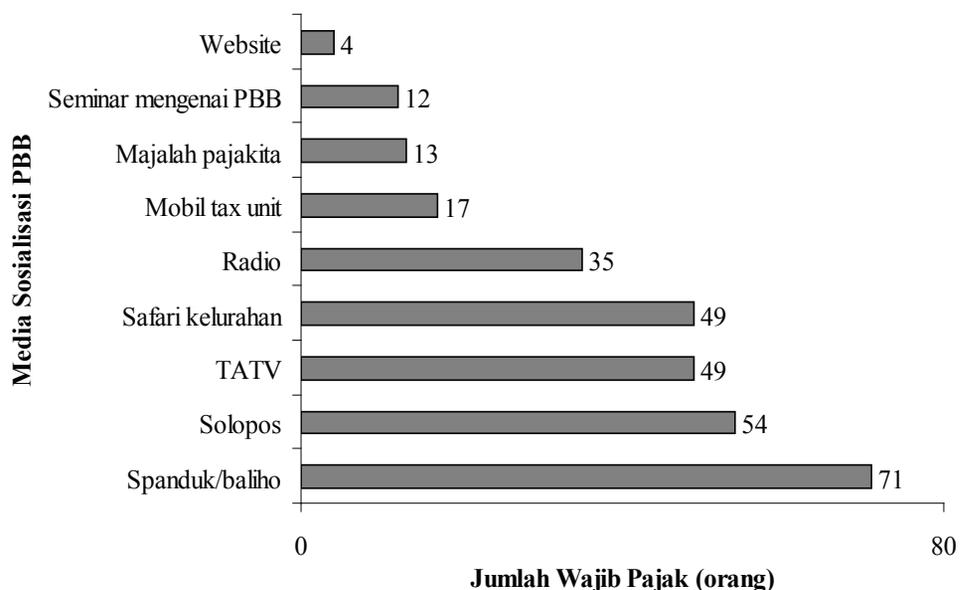
3.2.3.2. Analisis Regresi Logistik (*Logistic Regression*)

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan analisis regresi biasa, penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik untuk membangun model yang dapat digunakan untuk mengestimasi peluang Wajib Pajak patuh dalam membayar PBB. Proses analisis regresi logistik diwakili oleh tahapan pengujian 3.2.2.1 sampai 3.2.2.3.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis Statistika Deskriptif

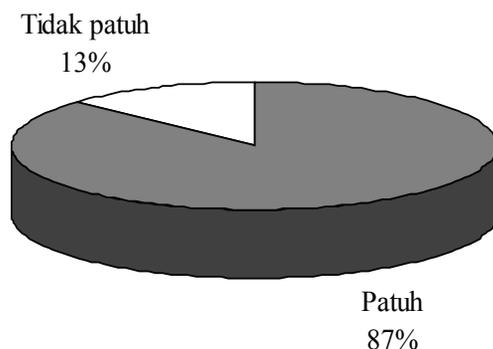
Sebanyak 58% responden dalam penelitian ini adalah pria dengan kelompok usia terbanyak 34 - < 51 tahun (42%) dan mayoritas bekerja sebagai wirausahawan (61%). Mayoritas responden berpendidikan SMA (65%). Bahkan ada 23% responden yang memiliki tingkat pendidikan tinggi (diploma dan sarjana). Meskipun demikian, masih ada 4% responden yang tidak mengenyam pendidikan formal atau tidak tamat SD. Mayoritas responden memiliki pendapatan antara Rp 785.000 - < Rp 1.570.000 per bulan (40%). Bahkan, 73% responden sudah memperoleh upah sama atau di atas UMR.



Gambar 2.
Sosialisasi PBB Menurut Wajib Pajak yang Pernah Menerimanya

Sumber: data primer yang diolah, 2011

Seorang Wajib Pajak bisa mempunyai pengalaman menerima lebih dari satu media sosialisasi PBB. Rata-rata seorang Wajib Pajak pernah menerima sekitar 3 bentuk sosialisasi. Media sosialisasi yang paling banyak diakses adalah spanduk/baliho karena mungkin paling sering dijumpai di jalan-jalan yang dilewati oleh Wajib Pajak dan yang paling sedikit diakses Wajib Pajak adalah *website*. Hal ini kemungkinan dipicu karena *website* tersebut kurang dikenal masyarakat.



Sumber: data primer yang diolah, 2011

Gambar 3.
Distribusi Wajib Pajak Menurut Kepatuhan dalam Membayar PBB

Rata-rata Wajib Pajak masih merasa ragu-ragu (3,034) dengan pemahamannya mengenai sanksi PBB. Meskipun demikian 87% Wajib Pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat digolongkan ke dalam Wajib Pajak yang patuh.

4.2. Hasil Analisis Regresi Logistik

4.2.1. Menilai/Menguji Ketepatan Model

4.2.1.1. Analisis Terhadap Nilai *Pseudo R*²

Model logit yang dibangun dalam penelitian ini mampu menjelaskan 44,7% (*R*² *Nagelkerke*) kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB dan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang belum tercakup dalam penelitian ini.

4.2.1.2. Uji *Hosmer* dan *Lemeshow*

Nilai signifikansi statistik uji *Hosmer* dan *Lemeshow* untuk model logit yang dibangun, yaitu 0,975, lebih dari 0,1 (α), menunjukkan model di atas juga mampu mewakili dengan baik data hasil penelitian.

4.2.1.3. Analisis Terhadap Tabel Klasifikasi

Secara keseluruhan, model logit yang dibangun mampu memprediksi 90% nilai peluang kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Hal ini mendukung hasil uji *Hosmer* dan *Lemeshow* di atas.

4.2.2. Uji *Omnibus*

Secara bersama-sama seluruh variabel bebas dalam penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap peluang kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB sehingga dapat dimasukkan ke dalam model. Hal itu terlihat dari nilai signifikansi uji *Omnibus* penelitian ini yang nilainya kurang dari 0,1 (α), yaitu sebesar 0,016.

4.2.3. Uji Wald

Sedangkan untuk menguji ada tidaknya pengaruh setiap variabel bebas secara individual terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB dideteksi dengan nilai signifikansi uji *Wald* yang dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2.
Koefisien Regresi dan Nilai Signifikansi Uji Wald Model Logit

Variabel	B	e ^B	Sig.
Konstanta	11,22	74877,64	0,9995
Jumlah sosialisasi PBB yang pernah didapat Wajib Pajak	-0,15	0,86	0,2589
Tingkat pemahaman sanksi PBB Wajib Pajak	1,13	3,11	0,0273*
Pendidikan Wajib Pajak	0,70	2,01	0,0831*
Usia Wajib Pajak	1,17	3,22	0,0630*
Pendapatan Wajib Pajak	-1,39	0,25	0,0032*
Wajib Pajak berjenis kelamin wanita	1,19	3,29	0,2234
Wajib Pajak tinggal di kecamatan Banjarsari	1,90	6,66	0,0882*
Wajib Pajak tinggal di kecamatan Jebres	2,72	15,14	0,0218*
Wajib Pajak tinggal di kecamatan Pasar Kliwon	22,45	5,65 × 10 ⁹	0,9979
Wajib Pajak tinggal di kecamatan Serengan	3,61	36,88	0,0746*
Wajib Pajak yang bekerja sebagai pegawai swasta	-17,31	3,06 × 10 ⁻⁸	0,9992
Wajib Pajak yang merupakan wirausahawan	-17,80	1,87 × 10 ⁻⁸	0,9991
Wajib Pajak yang merupakan pensiunan	-18,07	1,41 × 10 ⁻⁸	0,9991
Wajib Pajak yang pekerjaannya termasuk kategori lainnya	-20,34	1,47 × 10 ⁻⁹	0,9990

Catatan: 1) * = signifikan pada $\alpha = 10\% = 0,1$
 2) e = natural exponential base = 2,71828...
 3) Sumber: data primer yang diolah, 2011

Nilai signifikansi uji *Wald* untuk jumlah sosialisasi yang pernah didapat Wajib Pajak adalah 0,259, lebih dari 0,1 (α). Ini berarti, jumlah sosialisasi yang pernah didapat Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB. Untuk tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap sanksi PBB, nilai signifikansi uji *Wald*-nya adalah 0,0275, kurang dari 0,1 (α), sehingga tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap sanksi PBB berpengaruh positif terhadap peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB. Adapun nilai pangkat koefisien regresinya terhadap *natural exponential base*, yaitu 3,11, menunjukkan setiap rata-rata pemahaman Wajib Pajak terhadap sanksi PBB naik 1 tingkat lebih tinggi, maka akan meningkatkan rasio *odds* sebesar 211% (= 3,11 – 1). Rasio *odds* adalah rasio antara peluang Wajib Pajak patuh terhadap peluang Wajib Pajak tidak patuh dalam membayar PBB sehingga semakin besar nilai rasio *odds* mengindikasikan semakin besar peluang Wajib Pajak akan patuh dalam membayar PBB.

Dengan nilai signifikansi uji *Wald* sebesar 0,083 yang kurang dari 0,1 (α), maka pendidikan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB. Nilai pangkat koefisien regresinya terhadap *natural exponential base*, yaitu 2,01, menunjukkan setiap tingkat pendidikan Wajib Pajak menjadi 1 tingkat lebih tinggi, maka akan meningkatkan rasio *odds* sebesar 101% (= 2,01 – 1).

Sedangkan nilai signifikansi uji *Wald* untuk usia Wajib Pajak sebesar 0,063, kurang dari 0,1 (α), sehingga usia Wajib Pajak berpengaruh terhadap peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB. Nilai pangkat koefisien regresinya terhadap *natural exponential base*, yaitu 3,22, menunjukkan setiap kenaikan usia Wajib Pajak 1 tingkat ke kelompok usia yang lebih tinggi akan meningkatkan rasio *odds* sebesar 222% (= 3,22 – 1).

Pendapatan Wajib Pajak juga berpengaruh terhadap peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB. Hal itu terlihat dari signifikansi uji *Wald*-nya yang kurang dari 0,1 (α), yaitu sebesar 0,003. Nilai pangkat koefisien regresinya terhadap *natural exponential base*, yaitu 0,25, menunjukkan setiap peningkatan kelompok pendapatan Wajib Pajak 1 tingkat lebih tinggi akan mengurangi rasio *odds* sebesar 75% (= 1 – 0,25).

Nilai signifikansi uji *Wald* untuk Wajib Pajak wanita adalah 0,223, lebih dari 0,1 (α). Hal ini menunjukkan peluang Wajib Pajak wanita untuk patuh dalam membayar PBB tidak berbeda dengan Wajib Pajak pria. Sedangkan dari empat kecamatan tempat tinggal Wajib Pajak yang dimasukkan ke dalam model regresi logistik, semuanya memiliki nilai koefisien regresi bernilai positif, yang menunjukkan peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB di kecamatan tersebut lebih besar daripada peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB di kecamatan Laweyan yang dalam penelitian ini dipilih untuk menjadi pembanding. Meskipun demikian nilai signifikansi uji *Wald* untuk kecamatan Pasar Kliwon lebih dari 0,1 yang menunjukkan perbedaan peluang Wajib Pajak untuk patuh antara Wajib Pajak yang berdomisili di kecamatan Pasar Kliwon dengan Wajib Pajak yang berdomisili di kecamatan Laweyan tidak signifikan. Sementara untuk pekerjaan, semua nilai koefisien regresinya bernilai negatif yang menunjukkan peluang Wajib Pajak yang bekerja sebagai pegawai negeri, yang dalam penelitian ini dijadikan pembanding, untuk patuh dalam membayar PBB lebih besar daripada peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB untuk jenis pekerjaan lainnya. Meskipun demikian, nilai signifikansi uji *Wald* untuk semua jenis pekerjaan lebih besar dari 0,1 yang menunjukkan peluang kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB tidak berbeda secara signifikan antara jenis pekerjaan satu dengan yang lainnya.

4.3. Pembahasan

Temuan penelitian ini bahwa jumlah sosialisasi yang pernah didapat Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB tidak mendukung hasil penelitian Kurniawan (2006). Sedangkan temuan bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap sanksi PBB berpengaruh positif terhadap peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB menunjukkan semakin paham Wajib Pajak tentang sanksi PBB, maka semakin besar peluang mereka akan patuh dalam membayar PBB. Temuan ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Feriyani (2007), tetapi mendukung temuan Bida (2001), Wibowo (2005), Subiyanto (2006) serta Jackson dan Milliron (Richardson, 2006; Roshidi bin Ahmad, *et al.*, 2007; James dan Edwards, 2008). Hal ini kemungkinan disebabkan karena pemahaman sanksi PBB yang baik akan membuat Wajib Pajak memahami risiko pidana dan kerugian finansial yang harus ditanggungnya apabila tidak membayar PBB tepat waktu sehingga mereka akan terdorong untuk patuh dalam membayar PBB.

Temuan penelitian ini bahwa pendidikan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan Wajib Pajak, maka peluang mereka patuh dalam membayar PBB akan semakin besar. Temuan ini tidak mendukung temuan Wibowo (2005) tetapi memperkuat hasil penelitian Bida (2001), serta Jackson dan Milliron (Richardson, 2006; Roshidi bin Ahmad, *et al.*, 2007; James dan Edwards, 2008). Hal ini kemungkinan disebabkan karena tingkat pendidikan akan mempengaruhi kemampuan Wajib Pajak di dalam memahami sanksi PBB sehingga akan berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini juga menemukan usia Wajib Pajak berpengaruh terhadap peluang Wajib Pajak dalam membayar PBB. Dari interpretasi atas nilai koefisien regresi variabel usia Wajib Pajak yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan usia berpengaruh positif terhadap peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB. Dengan kata lain, semakin tua usia Wajib Pajak, semakin besar peluang mereka akan patuh dalam membayar PBB. Temuan ini mendukung hasil penelitian Kornhauser (2007) serta Jackson dan Milliron (Richardson, 2006; Roshidi bin Ahmad, *et al.*, 2007; James dan Edwards, 2008).

Dalam penelitian ini diperoleh pula kesimpulan bahwa pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB. Interpretasi atas nilai koefisien regresi variabel pendapatan Wajib Pajak yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya menunjukkan pendapatan Wajib Pajak, berbeda dengan variabel-variabel sebelumnya, berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Artinya, semakin tinggi pendapatan Wajib Pajak, maka akan semakin kecil peluang mereka akan patuh dalam membayar PBB. Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya ancaman sanksi finansial akan dirasa lebih memberatkan bagi kelompok Wajib Pajak berpendapatan rendah sehingga mereka akan lebih terdorong untuk patuh dalam membayar PBB. Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Bida (2001), Wibowo (2005) serta Jackson dan Milliron (Richardson, 2006; Roshidi bin Ahmad, *et al.*, 2007; James dan Edwards, 2008) tetapi tidak mendukung hasil penelitian Feriyani (2007).

Temuan dalam penelitian ini bahwa peluang Wajib Pajak wanita untuk patuh dalam membayar PBB tidak berbeda dengan Wajib Pajak pria menunjukkan jenis kelamin wanita tidak menjamin Wajib Pajak akan lebih patuh dalam membayar PBB. Kesimpulan ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Kornhauser (2007) serta Jackson dan Milliron (Richardson, 2006; Roshidi bin Ahmad, *et al.*, 2007; James dan Edwards, 2008).

Temuan penelitian ini bahwa peluang Wajib Pajak yang berdomisili di kecamatan Banjarsari, Jebres dan Serengan akan lebih patuh dalam membayar PBB dibandingkan Wajib Pajak yang berdomisili di kecamatan Laweyan menunjukkan kecamatan tempat tinggal Wajib Pajak dapat mempengaruhi perbedaan peluang kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Hal ini merupakan temuan baru yang belum muncul dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Sementara temuan bahwa peluang kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB tidak berbeda secara signifikan antara jenis pekerjaan satu dengan yang lainnya menunjukkan jenis pekerjaan Wajib Pajak tidak menyebabkan perbedaan terhadap peluang kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Hasil penelitian ini tidak mendukung pernyataan Jackson dan Milliron (Richardson, 2006; Roshidi bin Ahmad, *et al.*, 2007; James dan Edwards, 2008).

5. PENUTUP

KPP Pratama Surakarta, Pemerintah kota Surakarta beserta instansi yang terkait perlu melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai sanksi PBB karena pemahaman terhadap sanksi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB. Apalagi, hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata responden masih ragu-ragu dalam hal pemahamannya terhadap sanksi PBB. Meskipun dalam penelitian ini sosialisasi tidak terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB, namun sosialisasi tetap merupakan suatu media yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai sanksi PBB. KPP Pratama Surakarta, Pemerintah kota Surakarta beserta instansi yang terkait perlu memperbaiki sosialisasi yang selama ini diselenggarakan. Dari hasil wawancara dengan petugas di kantor pajak dan para responden diketahui informasi mengenai PBB yang biasanya disosialisasikan adalah informasi mengenai penerbitan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB. Sebaiknya dalam sosialisasi informasi mengenai PBB yang disampaikan lebih ditekankan untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai sanksi PBB. Apalagi, sanksi PBB yang di undang-undang dinyatakan dalam bahasa hukum, mungkin sulit dipahami oleh orang awam.

Bahwa usia dan tingkat pendidikan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB, pendapatan berpengaruh negatif terhadap peluang Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar PBB serta kecamatan tempat tinggal Wajib Pajak dapat mempengaruhi perbedaan peluang kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB, menunjukkan sosialisasi perlu diadakan di wilayah-wilayah atau kelompok-kelompok dalam masyarakat yang banyak memiliki Wajib Pajak yang berusia muda, berpendidikan rendah dan berpendapatan tinggi.

Dalam penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB dapat digunakan kriteria kepatuhan Wajib Pajak yang mengacu pada peraturan yang lebih baru (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 235/KMK.03/2003). Selain itu dapat ditambahkan pula variabel-variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB tetapi belum diselidiki dalam penelitian ini, seperti sistem administrasi PBB, persepsi Wajib Pajak mengenai sistem PBB, pelayanan kantor pajak dalam menangani PBB dan besarnya tarif PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi S. dan Syahrin S., 1991, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bida, Y., (2001), "Pengaruh Faktor-Faktor yang Melekat pada Wajib Pajak (WP) terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Survei terhadap Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Salatiga)", *Skripsi*, Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana (tidak dipublikasikan).

- Bowerman, BL., et al., 2007, *Business Statistics in Practice*, Fourth Edition, McGraw-Hill International Edition.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Devano, S. dan Rahayu, SK., 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Kencana.
- Feriyani, A., (2007), "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PBB dalam Memenuhi Kewajiban Pajak", *Skripsi*, Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (tidak dipublikasikan).
- Ghozali, HI., 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, Jr., JF., et al., 2006, *Multivariate Data Analysis*, Sixth Edition, Pearson International Edition.
- James, S. and Edwards, A., (2008), "Developing Tax Policy in a Complex and Changing World", *Economy Analysis & Policy*, Vol. 38, No. 1, March, p. 35–53.
- Kasipilla, J. and Jabbar, HA., (2006), "Gender and Ethnicity Differences in Tax Compliance", *Asian Academy of Management Journal*, Vol. 11, No. 2, 73–88, July, 2006, p. 73–88.
- Kornhauser, ME., (2007), "Normative and Cognitive Aspects of Tax Compliance: Literature Review and Recommendations for the IRS Regarding Individual Taxpayers", *2007 Annual Report to Congress*, Volume Two, *Taxpayers Advocate Service Research Studies and Reports*, p. 138–180
- Kurniawan, D. (2006), "Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Mantra, IB., 2000, *Demografi Umum*, Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Cetakan 1, Andi Offset.
- Murdiyatomoko, J., 2007, *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah*, Grafindo Media Pratama.
- Natalia, A., (2009), "Pengaruh Gender, Pengalaman dalam Menemukan Kecurangan dan Independensi Terhadap Skeptisme Profesional Auditor", *Skripsi*, Program S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana (tidak dipublikasikan).
- Richardson, G., (2006), "Determinants of Tax Evasions: A Cross-Country Investigation", *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 15, Elsevier Inc., p. 150–169.
- Roshidi bin Ahmand, MA., et al., (2007), "The Effects of Knowledge on Tax Compliance Behaviours Among Malaysian Taxpayers", *Makalah dalam Business and Information 2007*, Tokyo, 11st July 2007, dipublikasikan dalam *Academy of Taiwan Business Management Review 12/2007*, Taiwan Institute of Business Administration, p.1–15.
- Sour, L., (2009), "Gender Equity, Enforcement Spending and Tax Compliance in Mexico", *Número 239*, Diciembre 2009, p. 1–18.
- Subianto, A., (2006), "Pengaruh Pemahaman WP Mengenai PBB, Sanksi Perpajakan, Peraturan/UU Perpajakan terhadap Kesanggupan Pembayaran PBB", *Skripsi*, Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana (tidak dipublikasikan).
- Supramono dan Utami, I.. 2004, *Desain proposal Penelitian*, FE-UKSW, Salatiga.
- Waluya, B., 2007, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah*, PT. Setia Purna Inves.
- Waluyo, 2007, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat.
- Wibowo, HS., (2005), "Pengaruh Faktor-Faktor yang Melekat pada Wajib Pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB (Kecamatan Selomerto Wonosobo)", *Skripsi*, Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana (tidak dipublikasikan).
- Winkel, WS., 1991, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, Grasindo.

PENGARUH KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP HUBUNGAN ANTARA CASH FLOW RIGHT LEVERAGE DAN MANAJEMEN LABA: OPORTUNISTIK ATAU EFISIEN

I Putu Sugiarta Sanjaya¹
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

The objective of this research is to investigate whether financial condition influences relation between cash flow right leverage and earnings management. Cash flow right leverage is the differences between control rights and cash flow rights of controlling shareholder. The higher cash flow right leverage indicates the higher agency conflict between controlling shareholder and non controlling shareholder. This research is a testing on bad side or good side of earnings management in concentrated ownership contexts as Indonesia. Bad side is opportunistic earnings management. Good side is efficient earning management. Good earnings management is based on the blocked communication concept. From agency problem perspective, bad earnings management can result from opportunistic controlling shareholder behavior. Sample of this study is manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange 2001-2007. The results of this study are financial condition negatively influencing relation between cash flow right leverage and earnings management. The results indicate that, as bad financial condition, controlling shareholder manages earnings by increased earnings. It shows that controlling shareholder manages earnings opportunistically. It is bad side of earnings management.

Keywords: *Financial Condition, Controlling Shareholder, Cash Flow Right Leverage, Opportunistic Earnings Management, Efficient Earnings Management.*

1. PENDAHULUAN

Studi ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2011b). Sanjaya (2011b) membukukan bahwa *cash flow right leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. *Cash flow right leverage* adalah perbedaan antara hak kontrol dan hak aliran kas. Hak kontrol adalah hak pemegang saham biasa untuk memilih dewan direktur dan kebijakan-kebijakan perusahaan lainnya seperti penerbitan sekuritas, pemecahan saham, dan perubahan-perubahan substansial dalam operasi perusahaan (Du dan Dai, 2005). Hak aliran kas adalah klaim keuangan pemegang saham terhadap perusahaan (La Porta *et al.*, 1999).

Sanjaya (2011b) tidak menguji secara empiris apakah pemegang saham pengendali melakukan manajemen laba dengan maksud buruk (oportunistik) atau baik (efisien). Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menginvestigasi apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap hubungan antara *cash flow right leverage* pemegang saham pengendali dan manajemen laba. Pemegang saham pengendali disebut juga sebagai pemilik ultimatum terbesar. Pemegang saham pengendali adalah pengendali perusahaan pada pisah batas hak suara atau hak kontrol tertentu.

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam hal ini Bapepam-LK untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan publik di Indonesia untuk mengungkapkan pemilik ultimatum. Karena Rancangan Undang-Undang Pasar Modal yang disusun oleh Bapepam-LK belum mengatur pengungkapan pemilik ultimatum. Kebijakan ini seharusnya dilakukan oleh Bapepam-LK untuk memberi perlindungan yang lebih besar kepada ma-

¹ Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ford Foundation dan the Indonesian International Education Foundation (IIEF) yang mendanai penelitian ini.

sayarakat dan pemegang saham non pengendali. Dampak positif kebijakan ini adalah, pertama, dapat memacu masyarakat dan investor potensial untuk berinvestasi di pasar modal. Kedua, kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan Pasar Modal Indonesia dalam usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena, pasar modal akan memberi kontribusi sebagai salah satu sumber pendanaan untuk kegiatan ekonomi riil yang selama ini didanai oleh sektor perbankan. Ketiga, kebijakan ini juga berdampak positif bagi para pelaku pasar karena mereka dapat mempertimbangkan risiko-risiko yang akan terjadi seperti risiko ekspropriasi oleh pemegang saham pengendali. Bapepam-LK seharusnya dapat belajar dari kasus PT Bank Century Tbk yang menyeret Robert Tantular sebagai pemegang saham pengendali menjadi terpidana. Padahal, nama Robert Tantular tidak ada dalam kepemilikan langsung PT Bank Century.

Kepemilikan langsung ini dapat ditemukan secara mudah dalam pelaporan keuangan. Sementara, kepemilikan tidak langsung sampai sekarang tidak dapat ditemukan secara mudah oleh masyarakat. Menurut ViVAnews-Bisnis (2008), Robert menjadi pemegang saham Century melalui PT Century Mega Investindo dengan kepemilikan 9,00%, PT Century Superinvestindo 5,64% dan PT Antaboga Delta Sekuritas 7,44%. Robert disebut-sebut sebagai menantu pemilik Great River, Sunjoto Tanudjaja. Sebanyak 82,18% saham Antaboga dimiliki PT Aditya Rekautama dan sisanya 17,82% dimiliki PT Mitrasejati Makmurabadi. PT Aditya Rekautama sendiri sebanyak 12,5% sahamnya dimiliki Robert, Hartawan Aluwi dan Budi PV Tanudjaja. Robert dan Hartawan merupakan menantu Sukanta Tanudjaja, mantan pemilik Great River, sedangkan Budi merupakan kerabat Sukanta. Sedangkan PT Mitrasejati Makmurabadi dimiliki Harry Sutomo Raharjo dan Hendro Wiyanto. Hendro kini menjabat sebagai direktur utama Antaboga.

Studi ini penting untuk dilakukan karena fenomena perusahaan-perusahaan publik di Indonesia terkonsentrasi. Sanjaya (2011a) membukukan bahwa 99,51% perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimiliki secara terkonsentrasi pada pisah batas hak kontrol 10%. Sanjaya (2011a) juga membukukan bahwa masalah keagenan di Indonesia adalah serius. Ini ditunjukkan oleh *cash flow right leverage* secara signifikan berbeda dari nol. Dominasi hak kontrol atas hak aliran kas akan memotivasi pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi. Ekspropriasi adalah suatu proses penggunaan hak kontrol atau kendali seseorang untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain (Claessens *et al.*, 1999). Menurut Fan dan Wong (2002), ekspropriasi terjadi karena tindakan pemegang saham pengendali dilindungi oleh hak kontrolnya. Ini terjadi karena ada perbedaan yang besar antara hak kontrol dan hak aliran kas. Pemegang saham pengendali menggunakan strategi struktur piramida untuk melindungi hak kontrolnya (Claessens *et al.*, 2000).

Untuk konteks Indonesia, indikasi pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi telah dibukukan oleh Siregar (2006) seperti penurunan nilai perusahaan dan pembayaran dividen. Fakta ekspropriasi di Indonesia ditunjukkan oleh Solomon (2010; 222) seperti kasus Bank Bali di mana manajer salah menggunakan dana perusahaan untuk membiayai suatu partai politik antara tahun 1997 dan 1998. Fakta yang lain adalah kasus Bank Century yang mengucurkan dana kredit kepada dua perusahaan yang masih berafiliasi dengan Robert Tantular sebagai pemegang saham pengendali Bank Century (Kontan, 2009).

Untuk menyembunyikan ekspropriasi, pemegang saham pengendali bisa jadi melakukan manajemen laba. Fenomena ini tercermin dalam ungkapan Prajoto bahwa dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen lama banyak kredit-kredit yang sebenarnya telah masuk dalam kolektabilitas 5 (macet) namun dianggap lancar. Manipulasi yang dilakukan tersebut berpengaruh terhadap posisi modal perseroan di mana manajemen tidak perlu melakukan pencadangan untuk kredit macet. Dengan demikian, pencadangannya menjadi berkurang sehingga seolah-olah ekuitas atau modalnya masih banyak. Padahal ekuitas seharusnya sudah merosot jauh dengan kondisi yang dilaporkan (Suara Karya, 2009).

Fenomena berikutnya adalah Negara Indonesia menganut sistem *civil law* yang memberi peluang pemegang saham pengendali untuk mencari keuntungan di atas kerugian pihak lain. Menurut Ball *et al.*, (2000), standar akuntansi di *civil law* memberikan diskresi yang lebih besar bagi manajer untuk memutuskan kapan untung dan rugi secara ekonomis diperhitungkan dalam laba akuntansi. Hal seperti ini bisa jadi sebagai penyebab mengapa manajemen laba lebih tinggi terjadi di negara-negara yang menganut sistem *civil law* dibanding *common law*.

Hal ini didukung oleh Leuz *et al.*, (2003) yang menyatakan manajemen laba meningkat atau menurun sangat tergantung pada penegakan hukum dan perlindungan pemegang saham nonpengendali serta manfaat privat yang diperoleh oleh pemegang saham pengendali. Manajemen laba menurun ketika perlindungan hak pemegang saham nonpengendali dan penegakan hukum meningkat di negara-negara *common law*. Sebaliknya, manajemen laba meningkat ketika perlindungan hak pemegang saham nonpengendali dan penegakan hukum menurun di negara-negara *civil law*. Manfaat privat juga menyebabkan manajemen laba naik.

Pendapat Leuz *et al.*, (2003) didukung oleh beberapa penelitian empiris yang dilakukan di Asia seperti Haw *et al.*, (2004), Kim dan Yi (2006), Ding *et al.*, (2007), dan Sanjaya (2011b). Akan tetapi, para peneliti ini tidak mempertimbangkan apakah manajemen laba dilakukan dengan tujuan oportunistik atau efisien. Hal ini juga memotivasi penulis untuk menginvestigasi manajemen laba yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali dengan maksud oportunistik atau efisien. Menurut Scott (2006), manajemen laba dengan maksud oportunistik merupakan manajemen laba yang buruk karena ini hanya menguntungkan diri sendiri. Akan tetapi, manajemen laba juga dapat dilakukan oleh pemegang saham pengendali dengan maksud efisien atau pensinyalan.

Dalam bagian berikutnya, studi ini menjelaskan tentang kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Pada bagian tiga, studi ini membahas tentang desain riset dan pada bagian empat studi ini menjelaskan tentang hasil penelitian. Simpulan, keterbatasan, dan saran dijelaskan dalam bagian lima dari tulisan ini.

2. TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan adalah teori utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali. Shleifer dan Vishny (1997) menjelaskan bahwa pemegang saham mengelompokkan diri menjadi pemegang saham pengendali untuk mengawasi manajer agar manajer menjalankan perusahaan demi kepentingan terbaik para pemegang saham. Akan tetapi, pemegang saham pengendali meminta manajer untuk membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri seperti pembagian dividen khusus. Hal seperti ini merugikan pemegang saham nonpengendali. Dalam hal demikian, konflik keagenan yang terjadi adalah antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali. Ini yang melandasi studi ini menggunakan teori keagenan sebagai teori utama.

Leuz *et al.*, (2003) menjelaskan bahwa insentif salah menyajikan kinerja perusahaan melalui manajemen laba muncul dari konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali. Pemegang saham pengendali dapat menggunakan kontrolnya atas perusahaan untuk menguntungkan diri sendiri yang membebani pemegang saham nonpengendali. Leuz *et al.*, (2003) menegaskan bahwa pemegang saham pengendali memiliki insentif untuk mengatur laba dalam usaha untuk menyembunyikan manfaat privatnya dari pemegang saham nonpengendali. Menurut Ding *et al.*, (2007), konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali menjadi akar penyebab manajemen laba.

2.2. Manajemen Laba

Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan dengan tujuan menghasilkan beberapa keuntungan pribadi. Menurut Healy dan Wahlen (1999), manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan *judgment* dalam pelaporan keuangan dan pengaturan transaksi-transaksi untuk mengubah laporan-laporan keuangan untuk menyesatkan beberapa *stakeholder* tentang kinerja keuangan utama perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang tergantung pada angka-angka laporan akuntansi. Manajemen laba didefinisikan oleh Scott (2006) sebagai pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk mencapai beberapa tujuan tertentu.

2.3. Kepemilikan Terkonsentrasi dan Manajemen Laba

Haw *et al.*, (2004) menginvestigasi secara empiris perembesan manajemen laba yang disebabkan oleh perbedaan antara hak aliran kas dan hak kontrol. Perbedaan ini menjadi insentif bagi pemegang saham pengendali

untuk mendapat manfaat pribadi. Manajemen laba banyak dipilih oleh pemegang saham pengendali karena *stakeholder* tidak mudah mendeteksi tindakan ini. Akrual diskresioner menjadi sarana yang atraktif bagi pemegang saham pengendali untuk mengatur laba. Sampel dalam penelitian Haw *et al.*, (2004) adalah perusahaan industrial dari 22 negara : 9 di Asia Timur dan 13 di Eropa Barat. Haw *et al.*, (2004) membukukan perbedaan antara hak kontrol dan hak aliran kas secara positif dan signifikan mempengaruhi absolut akrual diskresioner. Ini berarti semakin besar perbedaan antara hak kontrol dan hak aliran kas, pemegang saham pengendali semakin kuat untuk melakukan manajemen laba.

Kim dan Yi (2006) bertujuan untuk menyediakan bukti apakah deviasi antara hak kontrol dan hak aliran kas mempengaruhi manajemen laba. Isu ini muncul karena struktur kepemilikan perusahaan di Korea dengan deviasi yang besar antara hak kontrol dan hak aliran kas. Kondisi ini menjadi sumber utama masalah keagenan. Deviasi ini menciptakan insentif bagi pemegang saham pengendali untuk menggelapkan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi. Perusahaan dengan deviasi antara hak kontrol dan hak aliran kas menjadi insentif yang kuat bagi pengendali untuk melakukan manajemen laba. Sampel diperoleh dari KIS-DATA. Periset memperoleh total observasi 15.159 tahun perusahaan selama 9 tahun yaitu 1992-2000. Kim dan Yi (2006) membukukan deviasi ini secara positif dan signifikan mempengaruhi manajemen laba. Hasil ini mengindikasikan kenaikan deviasi menyebabkan manajemen laba naik karena ini bertujuan untuk menyembunyikan tindakan ekspropriasi.

Ding *et al.*, (2007) bertujuan untuk menyediakan bukti secara empiris hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dan perilaku manajemen laba. Kenaikan kontrol pemegang saham pengendali akan menyebabkan ekspropriasi. Dalam situasi ini, ekspropriasi oleh pemegang saham pengendali akan menyebabkan laba aktual menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, pemegang saham pengendali akan menaikkan laba untuk menghindari kebocoran informasi tentang ekspropriasi. Konsentrasi kepemilikan yang tinggi akan mengurangi biaya-biaya keagenan karena terjadi alignment kepentingan antara pemegang saham pengendali dan perusahaan. Ding *et al.* (2007) membukukan kenaikan kontrol oleh pemegang saham pengendali menyebabkan manajemen laba naik. Ding *et al.* (2007) juga membukukan kenaikan kepemilikan saham oleh pemegang saham pengendali menyebabkan manajemen laba turun.

Sanjaya (2011b) melakukan penelitian di Indonesia. Sanjaya (2011b) menguji secara empiris apakah *cash flow right leverage* berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian ini dilakukan dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2001-2007. Sanjaya (2011b) membukukan bahwa *cash flow right leverage* secara positif dan signifikan mempengaruhi manajemen laba.

2.4. Hipotesis

Insentif dan kesempatan untuk ekspropriasi semakin besar ketika *cash flow right leverage* semakin meningkat (Gugler dan Yurtoglu, 2003). Ini dilandasi oleh argumen *negative entrenchment effect* (Yeh, 2005). Efek ini menegaskan bahwa semakin besar perbedaan antara hak kontrol dan hak aliran kas, semakin besar kesempatan pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi. Semakin meningkat ekspropriasi, manajemen laba yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali juga semakin meningkat. Menurut Kim dan Yi (2006), *wedge* sebagai perbedaan antara hak kontrol dan hak aliran kas pemegang saham pengendali. *Wedge* yang besar antara hak kontrol dan hak aliran kas menciptakan insentif bagi pemegang saham pengendali untuk mengeduk aset perusahaan untuk manfaat privatnya. Manfaat ini menyebabkan kerugian bagi pemegang saham nonpengendali. Semakin besar *wedge* antara hak kontrol dan hak aliran kas, semakin besar kecenderungan pemegang saham pengendali mengatur laba secara agresif untuk menyembunyikan perilaku *self-serving*-nya dan menghindari konsekuensi-konsekuensi seperti tindakan disiplin. Kenaikkan *wedge* sebesar 1% menyebabkan kenaikan akrual diskresioner sebesar 1,3%.

Kim dan Yi (2006) juga membukukan absolut akrual diskresioner perusahaan-perusahaan untuk *wedge* positif yaitu 0,089 dan perusahaan-perusahaan untuk *wedge* sama dengan nol yaitu 0,081. Hasil ini menegaskan bahwa pemegang saham pengendali memiliki insentif yang lebih kuat untuk memanipulasi laba untuk menyembunyikan keuntungan privatnya.

Semakin meningkat *cash flow right leverage*, ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali juga meningkat. Ekspropriasi ini akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Untuk menyembunyikan ekspropriasi, pemegang saham pengendali bisa jadi melakukan manajemen laba yang oportunistik. Ini dilandasi oleh argumen *negative entrenchment effect*. Pemegang saham pengendali mencatat *positive abnormal accruals* untuk menaikkan laba ketika kondisi keuangan perusahaan bermasalah. Ini menggambarkan bahwa pemegang saham pengendali melakukan manajemen laba bukan dengan tujuan untuk mensinyalkan kondisi keuangan perusahaan. Dalam hal demikian, studi ini menduga bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap hubungan antara *cash flow right leverage* dan manajemen laba. Untuk menguji dugaan ini, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

H_1 : *Kondisi keuangan perusahaan secara negatif mempengaruhi hubungan antara cash flow right leverage dan manajemen laba.*

3. METODA PENELITIAN

3.1. Sampel

Sampel penelitian ini adalah perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2000 sampai 2007. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* karena penulis menginginkan informasi dari target yang spesifik. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada empat kriteria perusahaan sebagai berikut.

- 1) Sampel merupakan kelompok industri manufaktur yang terdaftar sejak tahun 2000.
- 2) Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama tahun 2000 sampai 2007.
- 3) Sampel mempunyai akhir periode akuntansi pada tanggal 31 Desember.
- 4) Variabel-variabel yang akan diteliti tersedia lengkap dalam laporan keuangan dari tahun 2000 sampai dengan 2007.

3.2. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data studi ini adalah teknik pengumpulan data arsip. Salah satu bentuk pengumpulan data arsip adalah data sekunder. Data sekunder dalam studi ini adalah sebagai berikut.

- 1) Laporan keuangan auditan yaitu laporan tahunan meliputi laporan rugi laba, neraca, dan arus kas pada tahun 2000 sampai dengan 2007.
- 2) Data struktur kepemilikan ultimat meliputi kepemilikan langsung dan tidak langsung dari pemegang saham pengendali.
- 3) Data sekunder ini diperoleh dari beberapa sumber adalah sebagai berikut.
- 4) Bursa Efek Indonesia untuk laporan keuangan auditan.
- 5) Database OSIRIS untuk kepemilikan ultimat.
- 6) Pusat Data Bisnis Indonesia untuk kepemilikan ultimat.

3.3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini mencakup variabel independen, variabel dependen, variabel moderasi, dan variabel kontrol. Variabel independen adalah *cash flow right leverage*. Kondisi keuangan perusahaan merupakan variabel moderasi. Variabel dependen adalah manajemen laba. Variabel kontrol adalah laba non diskresioner, *size*, dan *leverage*.

3.4. Pengukuran Variabel

3.4.1. Variabel Independen

Cash flow right leverage pemegang saham pengendali merupakan selisih antara hak kontrol dengan hak aliran kas. Secara sederhana *cash flow right leverage* adalah nilai yang diperoleh dari hak kontrol pemegang

saham pengendali dikurangi dengan hak aliran kas pemegang saham pengendali. Semakin besar selisih antara hak aliran kas dan hak kontrol menunjukkan semakin tinggi peningkatan kontrol pemegang saham pengendali melebihi hak aliran kasnya. Ada beberapa periset menyebut *leverage* ini sebagai rasio antara hak aliran kas terhadap hak kontrol (Faccio *et al.*, 2001; Lemmon dan Lins, 2003).

3. 4. 2. Variabel Dependen

Manajemen laba merupakan variabel dependen yang diprosikan dengan akrual diskresioner. Model yang digunakan untuk mengestimasi akrual diskresioner adalah Model Kang dan Sivaramakrishnan (1995) sebagai berikut.

$$Ak_{i,t}/A_{i,t-1} = \phi_0 + \phi_1(\delta_1 REV_{it}/A_{i,t-1}) + \phi_2(\delta_2 EXP_{it}/A_{i,t-1}) + \phi_3(\delta_3 GPPE_{it}/A_{i,t-1}) u_{it} \dots\dots\dots(1)$$

dengan:

$$\delta_1 = AR_{i,t-1}/REV_{i,t-1}; \delta_2 = APB_{i,t-1}/EXP_{i,t-1}; \delta_3 = DEP_{i,t-1}/GPPE_{i,t-1} \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- TA_{it} : $LB_{it} - AKO_{it}$
- TA_{it} : Total akrual perusahaan i pada periode t.
- LB_{it} : Laba bersih sebelum ekstraordinari item, penghentian operasi, dan perubahan kebijakan akuntansi perusahaan i periode t.
- AKO_{it} : Aliran kas operasi perusahaan i periode t.
- $A_{i,t-1}$: total aset perusahaan i pada periode t-1.
- $DEP_{i,t-1}$: biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan i pada periode t-1.
- $AR_{i,t-1}$: piutang dagang perusahaan i pada periode t-1.
- REV_{it} : pendapatan perusahaan i pada periode t.
- $APB_{i,t-1}$: aset lancar – piutang dagang – kas – utang lancar perusahaan i pada periode t-1.
- EXP_{it} : penjualan bersih – laba operasi – biaya depresiasi perusahaan i pada periode t.
- $GPPE_{it}$: aset tetap bruto perusahaan i pada periode t.

Nilai akrual non diskresioner perusahaan i pada periode t ($AND_{i,t}$) diperoleh dari persamaan berikut ini.

$$AND_{i,t} = \phi_0 + \phi_1(\delta_1 REV_{it}/A_{i,t-1}) + \phi_2(\delta_2 EXP_{it}/A_{i,t-1}) + \phi_3(\delta_3 GPPE_{it}/A_{i,t-1}) \dots\dots\dots(2)$$

Nilai akrual diskresioner perusahaan i pada periode t ($AD_{i,t}$) diperoleh dari selisih antara saldo akrual dikurangi dengan akrual non diskresioner. Nilai akrual diskresioner juga dapat diperoleh dari residual dari persamaan 1. Persamaan untuk mendapat nilai akrual diskresioner adalah sebagai berikut.

$$AD_{i,t} = TA_{i,t}/A_{i,t-1} - [\phi_0 + \phi_1(\delta_1 REV_{it}/A_{i,t-1}) + \phi_2(\delta_2 EXP_{it}/A_{i,t-1}) + \phi_3(\delta_3 GPPE_{it}/A_{i,t-1})] \dots\dots\dots(3)$$

Dalam studi ini, manajemen laba diukur dengan menggunakan skala nominal yaitu 1 untuk akrual diskresioner positif (manajemen laba yang menaikkan laba). Nilai 0 untuk akrual diskresioner negatif (manajemen laba yang menurunkan laba).

3. 4. 3. Variabel Moderasi

Doumpos dan Zopounidis (1999) menjelaskan istilah kesulitan keuangan secara umum yang menunjukkan situasi perusahaan tidak dapat membayar kreditor, pemegang saham prioritas, pemasok, atau perusahaan menuju kebangkrutan menurut hukum. Studi ini mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan karena kondisi

keuangan perusahaan mempengaruhi manajemen laba (Lo, 2005). Lo (2005) menggunakan model Preve (2003) yang menyatakan bahwa perusahaan bermasalah keuangan cenderung mempunyai lebih banyak kredit dari pemasok (utang kepada pemasok) dan memberi lebih sedikit kredit kepada pelanggan (piutang kepada pelanggan). Kelebihan utang dagang di atas piutang dagang yang dibagi dengan total aset di awal tahun merupakan proksi kondisi keuangan perusahaan yang bermasalah. Jika jumlah piutang usaha lebih besar dibanding utang usaha maka perusahaan ini diindikasikan tidak bermasalah. Studi ini mengukur kondisi keuangan sama dengan piutang usaha - utang usaha/total aset tahun sebelumnya.

3. 4. 4. Variabel Kontrol

Manajemen laba dilakukan karena motivasi bonus (Healy, 1985; Gaver *et al.*, 1995; Holthausen *et al.*, 1995; dan Guidry *et al.*, 1999). Menurut Yang dan Krishnan (2005), bonus dapat diprosikan dengan laba non diskresioner. Laba ini diperoleh dari laba akuntansi dikurangi dengan akrual diskresioner. Oleh karena itu, studi ini memasukkan variabel laba non diskresioner sebagai kontrol untuk bonus (*bonus plan hypothesis*).

Leverage merupakan nilai yang diperoleh dari total utang dibagi dengan total aset. *Leverage* dimasukkan dalam studi ini karena manajemen laba bisa jadi dilakukan untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang. Menurut Sweeney (1994), perusahaan dengan *leverage* yang besar cenderung melakukan manajemen laba. Sebaliknya, perusahaan yang *leverage*-nya kecil cenderung tidak melakukan manajemen laba.

DeFond dan Jiambalvo (1994) juga membuktikan secara empiris bahwa perusahaan yang *leverage*-nya tinggi cenderung melakukan manajemen laba dibanding perusahaan dengan *leverage* yang rendah. Semakin tinggi proporsi *leverage* yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin besar kecenderungan manajer melakukan manajemen laba. *Leverage* sebagai kontrol untuk pelanggaran perjanjian utang (*debt covenant hypothesis*).

Manajer perusahaan yang sensitif terhadap masalah politik mungkin melakukan manajemen laba untuk menurunkan biaya politik (Jones, 1991; Cahan, 1992). Ukuran perusahaan (*Size*) akan diukur dengan ln-aset perusahaan. Menurut Johnson dan Ramanan (1988) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. *Size* sebagai kontrol untuk biaya politik (*political cost hypothesis*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4. 1. Statistik Deskriptif

Pada Tabel berikut ini disajikan deskripsi data penelitian yang meliputi variabel-variabel penelitian.

Tabel 1.
Statistik Deskriptif

	N=786				N=739	N=640
	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev.	Mean	Mean
Cash Flow Right Leverage	0.037650	0.425100	0.000000	0.078687	0.039680	0.042916
Laba Non Diskresioner	0.087880	0.749693	-0.346875	0.145705	0.060945	0.093242
Leverage	0.575501	2.982316	0.017031	0.336470	0.578154	0.586002
Size	27.298080	31.782370	24.215830	1.494679	27.291290	27.356190
Akrual Diskresioner	0.455471	1.000000	0.000000	0.498330	0.457375	0.456250
Kondisi Keuangan	0.065317	0.693241	-0.887505	0.137883	0.064004	0.064680
Cash Flow Right Leverage*Kondisi Keuangan	0.003053	0.092750	-0.055558	0.011740	0.003239	0.003573

Variabel *cash flow right leverage* merupakan selisih antara hak kontrol dan hak aliran kas. Nilai rata-rata *cash flow right leverage* adalah sebesar 3,76%. Variabel kondisi keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Besarnya nilai rata-rata kondisi keuangan adalah 0.065317 pada pisah batas 10%. Nilai ini mengindikasikan

bahwa secara rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak mengalami masalah keuangan. Nilai maksimal variabel kondisi keuangan adalah 0,693241 dan nilai minimal variabel kondisi keuangan adalah -0,887505. Nilai maksimal ini menjelaskan bahwa jumlah piutang usaha perusahaan masih lebih besar dibanding utang usaha. Nilai minimal kondisi keuangan ini menunjukkan bahwa piutang usaha perusahaan lebih rendah dibanding utang usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perusahaan yang secara keuangan masih memiliki masalah keuangan.

4. 2. Pengujian Hipotesis

Hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut.

Tabel 2.
Hasil Pengujian Hipotesis

$$Akru\alpha l\ Diskresioner_{it} = \alpha + \beta_1 Cash\ Flow\ Right\ Leverage_{it} + \beta_2 Kondisi\ Keuangan_{it} + \beta_3 Cash\ Flow\ Right\ Leverage_{it} * Kondisi\ Keuangan_{it} + \beta_4 Laba\ Non\ Diskresioner_{it} + \beta_5 Leverage_{it} + \beta_6 Size_{it} + \epsilon_{it}$$

Variabel	Koefisien	z-Statistik
Panel A		
Konstanta	-1,550	-1,057
Cash Flow Right Leverage	1,454	1,119
Kondisi Keauangan	1,827	2,599***
Cash Flow Right Leverage*Kondisi Keuangan Leverage	-24,226	-2.417**
Laba Non Diskresoner	-1,109	-4,038***
Size	-7,870	-10,045***
	0,092	1,703*
Panel B		
Konstanta	-1,274	-0,850
Cash Flow Right Leverage	1,807	1,358
Kondisi Keauangan	2,533	3,298***
Cash Flow Right Leverage*Kondisi Keuangan Leverage	-29,700	-2.864***
Laba Non Diskresoner	-1,146	-3,998***
Size	-8,258	-10,027***
	0,083	1,504
Panel C		
Konstanta	-0,938	-0,593
Cash Flow Right Leverage	1,733	1,280
Kondisi Keauangan	2,322	2,976***
Cash Flow Right Leverage*Kondisi Keuangan Leverage	-26,484	-2.560***
Laba Non Diskresoner	-1,141	-3,751***
Size	-8,138	-9,289***
	0,072	1,238

Keterangan : ***, ** dan * mengindikasikan signifikan pada alfa 1, 5 dan 10 persen.

Tabel ini menunjukkan pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap hubungan antara *cash flow right leverage* dan manajemen laba. Dalam Panel A, jumlah observasi adalah 786 tahun perusahaan pada pisah batas hak kontrol 10%. Panel B menunjukkan jumlah observasi sebanyak 739 tahun perusahaan pada pisah batas hak kontrol 20%. Panel C menunjukkan jumlah observasi sebanyak 640 tahun perusahaan pada pisah batas hak kontrol 30%.

Hasil analisis di Tabel 2 menunjukkan bahwa koefisien β_3 (*cash flow right leverage* x kondisi keuangan) adalah negatif dan signifikan secara statistik baik pada pisah batas hak kontrol 10%, 20%, maupun 30%. Berdasarkan hasil analisis ini, hipotesis penelitian (H_1) terdukung. Hasil analisis ini mengindikasikan bahwa ketika kondisi keuangan perusahaan bermasalah, pemegang saham pengendali menaikkan laba.

Hasil ini menunjukkan bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali adalah secara oportunistik. Manajemen laba yang oportunistik akan mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan. Karena informasi laporan keuangan tidak *representational faithfulness*. Informasi laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan cenderung menyesatkan bagi para pembacanya termasuk pemegang saham nonpengendali. Jika informasi ini digunakan untuk membuat keputusan maka keputusan yang diambil bisa jadi salah karena informasi yang ada adalah menyesatkan.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Fan dan Wong (2002). Fan dan Wong (2002) membukukan bahwa keinformatifan laba menjadi rendah ketika hak kontrol pemegang saham pengendali lebih besar daripada hak aliran kas. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kontrol yang kuat akibat hak kontrol lebih besar dari hak aliran kas memberi peluang kepada pemegang saham pengendali untuk mengatur perusahaan dan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri.

5. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap hubungan antara *cash flow right leverage* dan manajemen laba. Hasil ini menegaskan bahwa pemegang saham pengendali melakukan manajemen laba dengan cara menaikkan laba ketika kondisi keuangan perusahaan bermasalah. Manajemen laba yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali adalah manajemen laba yang oportunistik. Manajemen laba yang seperti ini adalah sisi buruk penggunaan kebijakan akuntansi untuk menyembunyikan informasi yang sebenarnya terjadi di perusahaan.

Keterbatasan penelitian adalah kesulitan penelusuran kepemilikan ultimat pada pemilik asing pada beberapa perusahaan publik di Indonesia. Beberapa data kepemilikan asing pada perusahaan privat tidak mampu penulis telusuri karena datanya tidak ada meskipun penelusuran ini dibantu oleh keberadaan database OSIRIS. Keterbatasan yang lain dalam penelitian ini adalah penggunaan kondisi keuangan yang diprosikan oleh perbedaan antara piutang dagang dan utang dagang. Kondisi keuangan digunakan dalam studi ini untuk bisa menilai manajemen laba yang dilakukan dengan maksud baik atau buruk.

Studi yang akan datang dapat mengembangkan studi ini dengan menginvestigasi pengaruh pemegang saham pengendali terhadap manajemen laba pada industri perbankan dan keuangan. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan hasil yang lebih komprehensif khususnya bagi pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan hasil studi ini untuk membuat kebijakan yang dapat memberi perlindungan yang lebih besar kepada pemegang saham nonpengendali dari risiko ekspropriasi. Studi yang akan datang dapat mencari kejadian-kejadian dalam perusahaan publik yang dapat memicu terjadi manajemen laba seperti penerbitan saham berikutnya. Studi ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hak kontrol dan hak aliran kas pemegang saham pengendali atau pemilik ultimat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahan, S.F, (1992), "The Effect of Antitrust Investigations on Discretionary Accruals: A Refined Test of the Political-Cost Hypothesis", *The Accounting Review*, Vol. 67, pp. 7-95.
- Claessens, S., S. Djankov, J. P. H. Fan, dan L. H. P. Lang, (1999), "Expropriation of Minority Shareholders: Evidence from East Asia", *Working Paper*. World Bank.
- Claessens, S., S. Djankov, dan L. H. P. Lang, (2000), "The Separation of Ownership and Control in East Asia Corporations", *Journal of Financial Economics*, Vol. 58, pp. 81-112.
- DeFond, M. L. dan J. Jiambalvo, (1994), "Debt Covenant Violation and Manipulation of Accruals", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 17, pp. 145-176.

- Doumpou, M., dan C. Zopounidis, (1999), "A Multicriteria Discrimination Method for The Prediction of Financial Distress: The Case of Greece", *Multinational Finance Journal*, Vol. 3 (2), pp. 71-101.
- Ding, Y., H. Zhang, dan J. Zhang, (2007), "Private vs. State Ownership and Earnings Management: Evidence from Chinese Listed Companies", *Corporate Governance*, Vol. 15 (2), pp. 223-238.
- Du, J. dan Y. Dai, (2005), "Ultimate Corporate Ownership Structures and Capital Structures: Evidence from East Asian Economies", *Corporate Governance*, Vol. 13 (1), pp. 60-71.
- Faccio, M., L. H. P. Lang, dan L. Young, (2001), "Dividends and Expropriation", *The American Economic Review*, Vol. 91 (1), pp. 54-78.
- Fan, J. P. H. dan T. J. Wong, (2002), "Corporate Ownership Structure and the Informativeness of Accounting Earnings in East Asia", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 33, pp. 133-152.
- Gaver, J. J., K. M. Gaver, dan J. R. Austin, (1995), "Additional Evidence on Bonus Plans and Income Management", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 19, pp. 3-28.
- Gugler, K. dan B. Yurtoglu, (2003), "Corporate Governance and Dividend Pay Out Policy in Germany", *European Economic Review*, Vol. 47, pp. 731-758.
- Guidry, F., A. J. Leone, dan S. K. Rock, (1999), "Earnings Based Bonus Plans and Earnings Management by Business Unit Managers", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 26, pp. 113-142.
- Haw, I. M., B. Hu, L. S. Hwang, dan W. Wu, (2004), "Ultimate Ownership, Income Management, and Legal and Extra-Legal Institutions", *Journal of Accounting Research*, Vol. 42 (2), pp. 423-462.
- Healy, P. M., (1985), "The Effect of Bonus on Accounting Decisions", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 7, pp. 85-107.
- Healy, P. M. dan J. M. Wahlen, (1999), "A Review of The Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting", *Accounting Horizon*, Vol. 13 (December), pp. 365-383.
- Holthausen, R. W., David F. L., dan Richard G. S, (1995), "Annual Bonus Schemes and the Manipulation of Earnings", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 19, pp. 29-74.
- Johnson, W. B. dan R. Ramanen, (1988), "Discretionary Accounting Changes from Successful Effort to Full Cost Methods: 1970-1976", *The Accounting Review*, Vol. LXIII (1), pp. 96-110.
- Jones, J. J., (1991), "Earnings Managements During Import Relief Investigations", *Journal of Accounting Research*, Vol. 29 (Autumn), pp. 193-228.
- Kang, S. dan K. Sivaramakrishnan, (1995), "Issues in Testing Earnings Management and an Instrumental Variable Approach", *Journal of Accounting Research*, Vol. 33 (2), pp. 353-367.
- Kim, N. B. dan C. H. Yi, (2006), "Ownership Structure, Business Group Affiliation, Listing Status, and Earnings Management: Evidence from Korea", *Contemporary Accounting Research*, Vol. 23 (2), pp. 427-464.
- Kontan, (2009), "Kasus Bank Century: Peran Robert Dalam Pengucuran Kredit Bank Century Kian Terkuak", <http://nasional.kontan.co.id/v2/read/nasional>.
- La Porta, R., F. Lopez-De-Silanes, dan A. Shleifer, (1999), "Corporate Ownership Around the World", *The Journal of Finance*, Vol. LIV (2), pp. 471-516.
- Lemmon, M. L. dan K. V. Lins, (2003), "Ownership Structure, Corporate Governance, and Firm Value: Evidence from the East Asian Financial Crisis", *The Journal of Finance*, Vol. LVIII (4), pp. 1445-1468.
- Leuz, C., D. Nanda, dan P. D. Wysocki, (2003), "Earnings Management and Investor Protection: An International Comparison", *Journal of Financial Economic*, Vol. 69, pp. 505-527.
- Lo, E. W., (2005), "Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan terhadap Konservatisme Akuntansi dan Manajemen Laba", *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada.
- Preve, A., (2003), "Financial Distress and Trade Credit: An Empirical Analysis", *Working Paper*, University of Texas at Austin.
- Sanjaya, I. P. S., (2011a), "Agency Problem in Indonesia: the Case of Firms in Manufacturing Industry in Indonesia Stock Exchange", *Journal of International Business and Economics*, Vol. 11 (1), pp. 94-103.
- Sanjaya, I. P. S., (2011b), "The Influence of Ultimate Ownership on Earnings Management", *Global Journal of Business Research*, Vol. 5 (5), pp. 61-70.

**Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan Terhadap Hubungan Antara Cash Flow Right Leverage dan Manajemen Laba:
(I Putu Sugiarta Sanjaya)**

- Schipper, K., (1989), "Earnings Management", *Accounting Horizons*, Vol. 3, pp. 91-106.
- Scott, W. R., (2006), *Financial Accounting Theory*, 4th ed., Scarborough, Ontario: Prentice Hall Canada, Inc.
- Shleifer, A. dan R. W. Vishny, (1997), "A Survey of Corporate Governance", *The Journal of Finance*, Vol. LII (2), pp. 737-783.
- Siregar, B., (2006), "Pemisahan Hak Aliran Kas dan Hak Kontrol Dalam Struktur Kepemilikan Ultimat", *Disertasi*. (tidak dipublikasikan).
- Solomon, J., (2010), *Corporate governance and accountability*. 3rd ed. West Sussex UK: John Wiley and Sons.
- Suara Karya, (2009), "Kasus Century: Robert Tantular Mempengaruhi Laporan Keuangan", www.SuaraKarya-Online.Com/news.html?id=242080.
- Sweeney, A. P., (1994), "Debt Covenant Violations and Managers' Accounting Responses", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 17, pp. 281-308.
- VIVAnews-Bisnis, (2009), "Robert Tantular, Sang Pengendali Century", http://bisnis.vivanews.com/news/read/12203-robert_tantular__sang_pengendali_century.
- Yang, J. S. dan J. Krishnan, (2005), "Audit Committees and Quarterly Earnings Management", *International Journal of Auditing*, Vol. 9, pp. 201-219.
- Yeh, Y. H., (2005), "Do Controlling Shareholders Enhance Corporate Value?", *Corporate Governance*, Vol. 13 (2), pp. 313-325.

STATUS LIKUIDITAS SAHAM, STRUKTUR ASET, DAN STRUKTUR MODAL

Bambang Sutopo
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email: bbsutopo@yahoo.com

Abstract

This study provides evidence to demonstrate how liquidity status of stock affects the relation between asset structure and capital structure. The liquidity status of stock is predicted to affect the positive association between asset structure and capital structure. Long-term debt to total asset ratio is used to proxy for capital structure, and the ratio of fixed asset to total asset is used to measure asset structure. Dummy variable is used as a measure of the liquidity status of stock. Using 990 observations over 2004-2010 periods from the Indonesia Stock Exchange, empirical results of this study support the hypothesis that liquidity status of stock affects the association between asset structure and capital structure.

Keywords : *capital structure; asset structure; liquidity status of stock.*

1. PENDAHULUAN

Hubungan antara struktur aset dan struktur modal telah banyak dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian-penelitian tersebut pada umumnya menunjukkan bahwa struktur aset berhubungan positif dengan struktur modal yang diukur dengan rasio utang jangka panjang (antara lain, McCue dan Ozcan 1992; Ghosh dkk. 2000; Hall dkk. 2004; Sogorb-Mira 2005; Abor 2007; Bhabra dkk. 2008; Abor dan Biekpe 2009; Odit dan Gobardhun 2011). Hasil studi Sutopo (2011) di Indonesia mengkonfirmasi hasil-hasil penelitian tersebut dan menunjukkan bahwa struktur aset merupakan determinan struktur modal yang paling dominan.

Penelitian ini mengembangkan studi tentang struktur aset sebagai determinan struktur modal di atas dengan menguji peran status likuiditas saham dalam menjelaskan hubungan struktur aset dengan utang jangka panjang. Likuiditas saham dipilih dalam studi ini dengan mempertimbangkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya tentang peran penting likuiditas saham, antara lain, bahwa likuiditas mempengaruhi keputusan investasi (Becker-Blease dan Paul, 2006). Di samping itu, likuiditas berpengaruh pada *trading cost* dan *market impact cost* (Chordia dkk., 2009) serta mempunyai hubungan dengan risiko, yaitu saham yang tidak likuid lebih berisiko dibandingkan saham yang likuid (Uddin, 2009). Likuiditas saham (dan risiko likuiditas) juga berpengaruh pada return, meskipun pada masa krisis risiko likuiditas merupakan pengukuran yang lebih tepat (Lou dan Sadka, 2011). Status likuiditas saham dalam penelitian ini adalah status saham yang termasuk saham dalam Indeks LQ45. Menurut Hrazdil (2010), unsur likuiditas dalam penentuan indeks adalah penting. Indeks LQ45 merupakan indeks yang ditentukan berdasarkan 45 saham yang paling likuid dan dengan kriteria tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Apakah status likuiditas saham mempunyai dampak terhadap hubungan antara struktur aset dan struktur modal? Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada literatur penelitian tentang struktur modal dengan menyediakan bukti empiris tentang peran status likuiditas saham dalam menjelaskan struktur aset sebagai determinan struktur modal. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam analisis pendanaan oleh manajemen dan dalam analisis investasi oleh investor.

Pada Bagian II berikut ini, dibahas tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis. Bagian III menjelaskan metoda penelitian. Bagian IV mendeskripsi data dan menyajikan serta membahas hasil pengujian hipotesis. Pada Bagian V, disajikan simpulan, keterbatasan, dan implikasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Teori Struktur Modal

Teori struktur modal yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller [selanjutnya disingkat dengan MM] (1958), bahwa struktur modal tidak berpengaruh pada nilai perusahaan jika tanpa pajak, dan dilanjutkan dengan teori MM (1963), bahwa penggunaan utang dapat memaksimalkan nilai perusahaan melalui penghematan pajak, merupakan teori-teori yang dikembangkan banyak peneliti-peneliti sesudahnya. Miller (1977) menyatakan bahwa dengan adanya pajak perorangan, manfaat dari penghematan pajak untuk memaksimalkan nilai perusahaan berkurang. Fosberg (2010) yang menguji teori MM menemukan bahwa baik teori MM dengan pajak maupun tanpa pajak bukan merupakan prediktor yang akurat atas nilai perusahaan.

Teori struktur modal sebagai pengembangan teori MM adalah *the static trade-off theory* dan *pecking order theory* yang dikemukakan oleh Myers (1984). Menurut *the static trade-off theory*, penggunaan utang menimbulkan *trade-off* antara manfaat yang diperoleh dan biaya yang ditanggung (*the static trade-off theory*), karena penggunaan utang yang tinggi di samping memberi manfaat berupa penghematan pajak juga mengandung risiko kebangkrutan. Sebagai teori alternatif, *pecking order theory*, yang dikembangkan berdasarkan *agency theory* (Jensen dan Meckling, 1976), *signalling theory* (Ross, 1977), dan *information asymmetry* (Myers dan Majluf, 1984), menyatakan bahwa penentuan struktur modal didasarkan pada urutan preferensi dengan mempertimbangkan risiko atau biaya yang timbul, dengan preferensi pertama adalah sumber dana internal dan kedua adalah sumber dana eksternal dengan urutan: utang, sekuritas *hybrid*, dan ekuitas (Myers, 1984).

The static trade-off theory dan *pecking order theory* banyak dikembangkan atau diuji oleh peneliti-peneliti berikutnya. Helwege dan Liang (1996) menemukan bahwa pemilihan jenis sekuritas yang akan diterbitkan di pasar modal sebagai sumber dana tidak mengikuti *pecking order*. Penggunaan dana eksternal tidak berhubungan dengan keterbatasan dana internal, meskipun perusahaan yang memiliki kelebihan dana cenderung menghindari pasar modal. Shyam-Sunder and Myers (1999) menemukan bahwa *pecking order theory* lebih unggul dibandingkan dengan *static trade-off theory* meskipun hasil tersebut hanya untuk kelompok sampel tertentu. Frank dan Goyal (2003) menemukan hasil yang berbeda dengan Shyam-Sunder and Myers (1999). Hasil studi mereka tidak mendukung *pecking order theory*. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, perusahaan cenderung menggunakan sumber dana ekuitas dan bukan utang.

Sebagai alternatif penjelasan tentang kebijakan struktur modal, Kochhar (1996) menguji peran *agency theory* vs. *transaction cost economics*. Hasil studi tersebut mendukung *transaction cost economics*, yaitu bahwa penentuan pendanaan lebih didasarkan pada pertimbangan efisiensi biaya transaksi.

2.2. Determinan Struktur Modal

Shyam-Sunder and Myers (1999) menyatakan bahwa struktur modal dapat ditentukan oleh berbagai faktor, meskipun menemukan keunggulan *pecking order theory* dibandingkan *static trade-off theory*. Determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal yang pada umumnya diteliti diberbagai negara adalah profitabilitas, pertumbuhan, struktur aset, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan (Hall dkk., 1984).

Struktur modal dapat diukur dengan utang jangka panjang, utang jangka pendek, dan atau total utang. Banyak peneliti mengukur struktur modal dengan utang jangka panjang, di samping pengukuran yang lain, (antara lain, Titman dan Wessels [1998], McCue dan Ozcan [1992], Krishnan dan Moyer [1996], Ghosh dkk. [2000], Al-Sakran [2001], Hall dkk. [2004], Akhtar [2005], Sogorb-Mira [2005], Chevalier dkk. (2006), Abor [2007], Bhabra dkk. [2008], Abor dan Biekpe [2009], Frank dan Goyal [2009], Gurcharan (2010), Odit dan Gobardhun [2011]). Peneliti-peneliti yang tidak menggunakan ukuran utang jangka panjang tetapi menggunakan ukuran utang jangka pendek dan atau total utang antara lain Chen dan Strange (2005), Eriotis dkk. (2007), Heyman dkk.(2008), Bokpin (2009), serta Psillaki dan Daskalakis (2009).

Struktur modal dapat diukur dengan total utang (antara lain, Krishnan dan Moyer [1996], Al-Sakran [2001],

Hall dkk. [2004], Chen dan Strange [2005], Sogorb-Mira [2005], Abor [2007], Heyman dkk. [2008], Bokpin [2009], Psillaki dan Daskalakis [2009], Chevalier dkk. [2006], dengan utang jangka panjang, dan atau utang jangka pendek.

2.3. Struktur Aset sebagai Determinan Struktur Modal

Struktur aset sebagai determinan struktur modal didasarkan pada argumen bahwa jaminan merupakan salah satu faktor penting dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan. Jaminan tersebut pada umumnya disesuaikan dengan jenis pinjaman. Karena dalam penelitian ini struktur modal adalah utang jangka panjang (rasio utang jangka panjang dengan aset tetap), maka jaminan yang relatif relevan adalah aset tetap (atau struktur aset, yaitu rasio aset tetap terhadap total aset). Struktur aset sebagai determinan struktur modal telah banyak diteliti, dan hasil penelitian pada umumnya menunjukkan hubungan positif antara struktur aset dan utang jangka panjang (antara lain, Abor 2007; Eriotis dkk. 2007; Bhabra dkk. 2008; Abor dan Biekpe 2009; Odit dan Gobardhun 2011, dan Sutopo 2011).

2.4. Status Likuiditas Saham, Struktur Aset, dan Struktur Modal

Status likuiditas saham dalam studi ini adalah sebagai variabel pemoderasi hubungan antara struktur aset dan struktur modal. Likuiditas saham dipilih dalam studi ini dengan mempertimbangkan peran penting likuiditas saham, antara lain, dalam keputusan investasi (Becker-Blease dan Paul, 2006), dalam penentuan *trading cost* dan *market impact cost* (Chordia dkk., 2009), dalam hubungannya dengan risiko, yaitu saham yang tidak likuid lebih berisiko dibandingkan saham yang likuid (Uddin, 2009), dan pengaruhnya pada return, meskipun pada masa krisis risiko likuiditas merupakan pengukuran yang lebih tepat (Lou dan Sadka, 2011). Status likuiditas saham dalam penelitian ini adalah status saham yang termasuk saham dalam Indeks LQ45. Unsur likuiditas dalam penentuan indeks adalah penting (Hrazdil, 2010). Indeks LQ45 merupakan indeks yang ditentukan berdasarkan 45 saham yang paling likuid dan dengan kriteria tertentu, antara lain, berdasarkan: nilai transaksi, kapitalisasi pasar, jumlah hari perdagangan, kondisi keuangan, dan prospek pertumbuhan. Oleh sebab itu, status likuiditas saham diprediksi mempunyai dampak positif pada hubungan antara struktur aset dan struktur modal.

2.5. Hipotesis

Berdasarkan pembahasan tentang hubungan struktur aset dengan struktur modal dan tentang peran status likuiditas saham tersebut di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis : Status likuiditas saham memoderasi hubungan positif antara struktur aset dan struktur modal.

3. METODA PENELITIAN

3.1. Metoda Analisis dan Pengukuran Variabel

Untuk pengujian hipotesis digunakan model regresi berikut:

$$\text{Struktur Modal}_{k,t} = \alpha + \beta_1 \text{Struktur Aset}_{k,t} + \beta_2 \text{Status Likuiditas Saham}_{k,t} + \varepsilon_{k,t} \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{Struktur Modal}_{k,t} = \alpha + \beta_1 \text{Struktur Aset}_{k,t} + \beta_2 \text{Status Likuiditas Saham}_{k,t} + \beta_3 \text{Struktur Aset} * \text{Status Likuiditas Saham}_{k,t} + \varepsilon_{k,t} \dots\dots\dots(2)$$

Secara statistis, hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_3 = 0; \text{ dan}$$

$$H_1 : \beta_3 > 0.$$

Pengukuran variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Struktur modal diukur dengan rasio utang jangka panjang, yaitu utang jangka panjang dibagi dengan total aset. Rasio utang jangka panjang dipilih untuk mengukur struktur modal karena ukuran ini relatif lebih erat terkait dengan struktur aset yang juga

bersifat jangka panjang. Struktur aset adalah aset tetap dibagi dengan total aset. Pengukuran struktur modal dan struktur aset ini digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain, Abor dan Biekpe (2009), Psillaki dan Daskalakis (2009), dan Odit dan Gobardhun (2011). Status likuiditas saham diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu sama dengan 1 jika saham perusahaan termasuk dalam Index LQ45 pada periode pertama tahun 2004 atau pada periode ke-dua tahun 2010 dan sama dengan 0 jika tidak.

Untuk mendeteksi apakah terdapat multikolinearitas antar variabel independen, digunakan indikator *variance inflation factor (VIF)*. Sebagai *rule of thumb*, multikolinearitas bermasalah jika *VIF* melebihi 10 (Gujarati, 1995). Uji heteroskedastisitas dan uji normalitas residual menggunakan metoda grafik.

3.2. Sampel Penelitian

Sampel perusahaan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan non - lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan dari tahun 2004-2010. Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel yang memenuhi persyaratan kelengkapan data dan tidak mengandung nilai ekstrim, yaitu: nilai masing-masing rasio berikut utang jangka panjang, utang jangka pendek, total utang, profitabilitas, dan struktur aset adalah lebih dari nol dan kurang dari 1. Data penelitian diambil dari OSIRIS database dan berbagai sumber informasi keuangan yang dipublikasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Sampel

Sampel perusahaan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan non - lembaga keuangan (semua sektor kecuali sektor 9) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data untuk pengukuran variabel-variabel diambil dari laporan keuangan perusahaan tahun 2004-2010. Data yang tidak diperoleh secara lengkap dan mengandung data ekstrim tidak digunakan sebagai sampel penelitian. Pengumpulan data dengan persyaratan tersebut menghasilkan sampel sebanyak 990 observasi dari tahun 2004-2010. Distribusi sampel (observasi) berdasarkan sektor industri disajikan pada Tabel 1. Jumlah sampel terbesar dari 8 sektor adalah dari sektor "*Trade, Services, and Investment*" yaitu sebanyak 326 observasi atau 32,9%, sedangkan jumlah sampel terkecil adalah dari sektor "*Agriculture*" yaitu sebanyak 27 observasi atau 2,7%.

**Tabel 1.
Distribusi Sampel**

No.	Industri	Jumlah Observasi	
1	Agriculture	27	2.7%
2	Mining	49	4.9%
3	Basic Industry and Chemicals	172	17.4%
4	Misellaneous Industry	88	8.9%
5	Consumer Goods Industry	123	12.4%
6	Property, Real Estate, and Building Construction	154	15.6%
7	Infrastructure, Utilities, and Transportation	51	5.2%
8	Finance	0	0.0%
9	Trade, Services, and Investment	326	32.9%
		990	100.0%

Statistik deskriptif variabel dependen (Struktur Modal) dan variabel independen (Struktur Aset) adalah sebagai berikut. Dengan jumlah sampel 990 observasi (N), *mean* struktur modal adalah 0.2041 dan deviasi standar 0.1775, sedangkan *mean* struktur aset adalah 0.5118 dan deviasi standar 0.2305.

4.2. Hasil Analisis dan Pembahasan

Hasil regresi untuk pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 3. Pada Tabel 3 tersebut, nilai F hasil regresi, baik tanpa moderasi maupun dengan moderasi adalah signifikan pada level 0,01, yaitu berturut-turut sebesar

3.5957 dan 103.4259, sedangkan *adjusted R square* dari hasil regresi tanpa moderasi adalah sebesar 0.2293 sedangkan *adjusted R square* dari hasil regresi dengan moderasi adalah sebesar 0.2370.

Hasil uji diagnostik yang telah dilakukan menunjukkan *Variance Inflation Factors* (VIF) yang kurang dari 10 yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam regresi yang bersangkutan. Hasil uji diagnostik yang lain mengindikasikan bahwa hasil regresi memenuhi persyaratan normalitas, dan tidak terjadi masalah serius dengan heteroskedastisitas¹.

Tabel 2.
Hasil Regresi Dampak Status Likuiditas Saham
pada Hubungan antara Struktur Aset dan Struktur Modal

Variabel	Model 1	Model 2
	B (t)	B (t)
Konstanta	0.0105 (0.8854)	0.0277 (2.0872) **
Struktur Aset	0.3598 *** (16.7257)	0.3258 *** (13.7384)
Status Likuiditas Saham	0.0410 *** (3.4865)	-0.0545 (-1.7542)
Struktur Aset * Status Likuiditas Saham		0.1826 *** (3.3178)
Jumlah Observasi	990	990
F	3.5957 ***	103.4259 ***
Adjusted R Square	0.2293	0.2370

** , *** menunjukkan berturut-turut signifikansi pada level 0.05 dan 0.01

Keterangan: Struktur Modal adalah utang jangka panjang dibagi dengan total aset; Struktur Aset adalah aset tetap dibagi dengan total aset; Status Likuiditas Saham merupakan variabel *dummy* dengan nilai 1 jika saham termasuk dalam Indeks LQ45 pada periode pertama 2004 atau pada periode kedua 2010; Struktur Aset * Status Likuiditas Saham adalah struktur aset dikalikan dengan status likuiditas saham.

Hasil regresi tanpa moderasi (Model 1) pada Tabel 4, dengan sampel 990 observasi dari tahun 2004-2010, menunjukkan bahwa koefisien struktur aset dan status likuiditas saham adalah positif signifikan pada level 0.01. Hasil ini menunjukkan peran struktur aset sebagai determinan saham dan menunjukkan perbedaan struktur modal berdasarkan status likuiditas saham, yaitu struktur modal pada saham dengan status likuid lebih besar dibandingkan dengan struktur modal pada saham dengan status yang tidak likuid.

Hasil regresi dengan moderasi (Model 2) menunjukkan bahwa koefisien struktur aset tetap positif dan signifikan pada level 0.01, tetapi koefisien status likuiditas saham menjadi negatif dan tidak signifikan pada level 0.05, dan koefisien interaksi struktur aset dengan status likuiditas saham adalah positif signifikan pada level 0.01. Hasil analisis ini mendukung hipotesis penelitian bahwa status likuiditas saham berpengaruh positif pada hubungan antara struktur aset dan struktur modal.

Hubungan positif struktur aset dan struktur modal menunjukkan peran penting aset tetap dalam pendanaan jangka panjang. Keterjaminan pengembalian pinjaman merupakan faktor penting bagi pemberi pinjaman dalam pemberian pinjaman. Karena struktur modal dalam studi ini adalah utang jangka panjang, maka aset tetap merupakan jaminan yang sesuai ditinjau dari jangka waktu pinjaman.

¹ Grafik histogram menunjukkan bahwa *residual* regresi terdistribusi secara normal dan grafik *scatterplot* menunjukkan titik-titik yang menyebar atau tidak menunjukkan pola tertentu. Grafik-grafik tersebut tidak disajikan dalam artikel ini.

Studi ini menemukan bahwa status likuiditas mempunyai peran penting dalam penentuan struktur modal, dalam hal ini, memoderasi hubungan struktur aset dengan struktur modal. Peran penting struktur aset dalam penentuan utang jangka panjang lebih kuat pada perusahaan dengan status saham yang likuid. Indeks LQ45 sebagai dasar pengukuran status likuiditas saham tidak hanya mencerminkan likuiditas saham tetapi juga mencerminkan kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan saham. Karakteristik saham dalam Indeks LQ45 ini menjadi pertimbangan penting dalam penentuan pendanaan utang jangka panjang yang didasarkan pada struktur aset.

4.3. Analisis Tambahan

Analisis tambahan dalam penelitian ini dilakukan dengan menambahkan beberapa variabel kontrol, yaitu: profitabilitas (Laba Sebelum Pajak / Penjualan), pertumbuhan (Rata-Rata Perubahan Penjualan Bersih Selama 2 Tahun Terakhir), ukuran perusahaan (LN Total Aset), dan umur perusahaan (Tahun Penelitian – Tahun Pendirian Perusahaan). Hasil analisis regresi model 2 setelah menambahkan variabel-variabel kontrol disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.
Hasil Regresi Dampak Status Likuiditas Saham pada Hubungan antara Struktur Aset dan Struktur Modal dengan Variabel Kontrol: Profitabilitas, Pertumbuhan, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan

Variabel	Koefisien	t	Sig.
Konstanta	-0.103	-2.601	0.009 ***
Struktur Aset	0.348	15.557	0.000 ***
Status Likuiditas Saham	-0.023	-1.042	0.298
Struktur Aset * Status Likuiditas Saham	0.125	3.164	0.002 ***
Profitabilitas	-0.111	-3.527	0.000 ***
Pertumbuhan	-0.001	-2.016	0.044 **
Ukuran Perusahaan	0.005	2.770	0.006 ***
Umur Perusahaan	0.001	2.418	0.016 **
Observasi	985		
F	49.147		0.000 ***
Adjusted R Square	0.255		

Keterangan: **, *** menunjukkan berturut-turut signifikansi pada level 0.05 dan 0.01.

Sebagaimana disajikan pada Tabel 3, setelah menambahkan variabel-variabel kontrol ke dalam analisis regresi, jumlah observasi berkurang dari 990 menjadi 985. Selanjutnya, hasil regresi pada Tabel 3 menunjukkan bahwa koefisien interaksi struktur aset dengan status likuiditas saham adalah positif signifikan pada level 0.01. Hasil ini konsisten dengan hasil regresi pada Tabel 2 – Model (2), yaitu mendukung hipotesis penelitian bahwa status likuiditas saham berpengaruh positif pada hubungan antara struktur aset dan struktur modal.

Tabel 3 menunjukkan juga hasil regresi variabel kontrol yang meliputi profitabilitas, pertumbuhan, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Secara umum, hasil analisis regresi tersebut konsisten dengan hasil studi Sutopo (2011). Hasil regresi masing-masing variabel kontrol tersebut dibahas sebagai berikut. Koefisien variabel profitabilitas adalah -0.111 signifikan pada level 0,01. Hasil ini mendukung hipotesis bahwa profitabilitas berhubungan negatif dengan utang jangka panjang. Berdasarkan hasil empiris ini, perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah cenderung menggunakan sumber pendanaan utang jangka panjang. Sebaliknya, perusahaan

dengan profitabilitas tinggi cenderung menggunakan sumber pendanaan dari sumber internal (laba) dibandingkan sumber dana utang jangka panjang. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan beberapa sebelumnya seperti Krishnan dan Moyer (1996), Sogorb-Mira (2005), Abor (2007), Bhabra dkk. (2008), dan Abor dan Biekpe (2009).

Hasil regresi pada Tabel 3 menunjukkan bahwa koefisien variabel pertumbuhan adalah -0.001 dan signifikan pada level 0,05. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Bhabra dkk. (2008) yaitu bahwa pertumbuhan berhubungan negatif dengan utang jangka panjang. Bagi bank, perusahaan yang mempunyai pertumbuhan relatif tinggi mungkin dianggap mempunyai risiko yang relatif lebih besar dibandingkan perusahaan yang mempunyai pertumbuhan relatif rendah. Perusahaan yang mempunyai risiko relatif besar cenderung menghadapi kendala yang relatif lebih besar juga dalam mengakses sumber dana utang jangka panjang.

Koefisien regresi variabel ukuran pada Tabel 3 menunjukkan adalah 0.005 dan signifikan pada level 0,01. Ukuran perusahaan berhubungan positif dengan utang jangka panjang. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar cenderung menggunakan sumber dana utang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Beberapa faktor, seperti kepercayaan bank dan kemampuan manajerial yang relatif lebih tinggi serta risiko relatif kecil pada perusahaan yang relatif lebih besar, mungkin merupakan salah satu penentu penggunaan sumber dana yang lebih besar oleh perusahaan yang relatif besar. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Krishnan dan Moyer (1996), Al-Sakran (2001), Hall dkk. (2004), Akhtar (2005), Sogorb-Mira (2005), Abor (2007), Bhabra dkk. (2008), Abor dan Biekpe (2009), dan Odit dan Gobardhun (2011), serta hasil penelitian di Indonesia oleh Chevalier dkk. (2006) dan Gurcharan (2010).

Hasil regresi pada Tabel 3 juga menunjukkan bahwa koefisien variabel umur perusahaan adalah 0.001 dan signifikan pada level 0,01. Hasil analisis ini mendukung hipotesis bahwa umur perusahaan berhubungan positif dengan utang jangka panjang. Perusahaan yang relatif lama mungkin cenderung lebih dikenal oleh bank dibandingkan dengan perusahaan yang relatif baru, dan sebaliknya perusahaan yang relatif baru cenderung kurang dikenal oleh bank. Oleh sebab itu, perusahaan yang relatif lama cenderung mempunyai akses fasilitas kredit dari bank yang relatif lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan yang relatif baru, dan dengan demikian cenderung menggunakan utang jangka panjang yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan baru.

5. PENUTUP

Penelitian ini memberi bukti empiris awal tentang peran status likuiditas saham sebagai pemoderasi hubungan antara struktur aset dan struktur modal. Status likuiditas saham diprediksi memoderasi hubungan struktur aset dengan struktur modal. Konsisten dengan prediksi tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status likuiditas saham memoderasi memperkuat hubungan positif antara struktur aset dan struktur modal. Peran struktur aset sebagai determinan struktur modal pada perusahaan dengan saham yang berstatus likuid lebih kuat dibandingkan dengan peran struktur aset sebagai determinan struktur modal pada perusahaan dengan saham yang berstatus tidak likuid.

Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel kontrol profitabilitas dan pertumbuhan berhubungan negatif dengan utang jangka panjang, sedang ukuran perusahaan dan umur perusahaan berhubungan positif dengan utang jangka panjang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain, pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*) yang mempunyai implikasi terhadap generalisasi hasil penelitian dan pengukuran variabel status likuiditas saham yang berdasarkan Indeks LQ45 periode tertentu. Dengan memperhatikan keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini memberi kontribusi pada penelitian akademik, dalam bidang manajemen keuangan khususnya tentang determinan struktur modal, dengan menyediakan bukti empiris dari pasar modal di Indonesia bahwa status likuiditas saham mempunyai peran positif dalam menjelaskan struktur aset sebagai determinan dominan struktur modal. Penelitian berikutnya disarankan untuk menggunakan alternatif lain dalam pengukuran status likuiditas saham dan atau menggunakan variabel lain sebagai pemoderasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abor, J., (2007), "Industry Classification and the Capital Structure of Ghanaian SMEs, *Studies in Economics and Finance*, 24 (3), pp. 207-219
- _____, dan Biekpe, N., (2009), "How Do We Explain the Capital Structure of SMEs in Sub-Saharan Africa? Evidence from Ghana, *Journal of Economic Studies*, 36 (1), pp. 83-97
- Akhtar, S., (2005), "The Determinants of Capital Structure for Australian Multinational and Domestic Corporations", *Australian Journal of Management*, 30 (2), pp. 321-341
- Al-Sakran, S. A., (2001), "Leverage Determinants in the Absence of Corporate Tax System: The Case of Non-Financial Publicly Traded Corporations in Saudi Arabia", *Managerial Finance*, 27 (10/11), pp. 58-87
- Becker-Blease, J. R., dan Paul, D. L., (2006), "Stock Liquidity and Investment Opportunities: Evidence from Index Additions", *Financial Management*, 35 (3), pp. 35-51
- Bhabra, H. S, Liu, T., dan Tirtiroglu, D., (2008), "Capital Structure Choice in a Nascent Market Evidence from Listed Firms in China", *Financial Management*, 37 (2), pp. 341-364
- Bokpin, G. A., (2009), "Macroeconomic Development and Capital Structure Decisions of Firms: Evidence from Emerging Market Economies", *Studies in Economics and Finance*, 26 (2), pp. 129-142
- Chen, J., dan Strange, R., (2005), "The Determinants of Capital Structure: Evidence from Chinese Listed Companies", *Economics of Planning*, 38 (1), pp. 11-135
- Chevalier, A., Prasetyantoko, A., dan Rokhim, R., (2006), "Foreign Ownership and Corporate Governance Practices in Indonesia, This paper is submitted on the conference "Mondialisation et recomposition des gouvernances – à la recherche d'une approche commune", Université Paris-Dauphine, 21 – 22 September 2006
- Chordia, T., Goyal, A., Sadka, G., Sadka, R., and Shivakumar, L., (2009), "Liquidity and the Post-Earnings-Announcement Drift", *Financial Analysts Journal*, 65 (4), pp. 18-32
- Eriotis, N., Vasilioi, D., Ventoura-Neokosmidi, Z., (2007), "How Firm Characteristics Affect Capital Structure an Empirical Study", *Managerial Finance*, 33 (5), pp. 321-331
- Fosberg, R. H., (2010), "A Test of the M&M Capital Structure Theories", *Journal of Business & Economics Research*, 8 (4), pp. 23-28
- Frank, M. Z., dan Goyal, V. K., (2003) "Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure", *Journal of Financial Economics*, 67 (2), pp. 217-248
- _____, dan _____, (2009), "Capital Structure Decisions: Which Factors are Reliably Important?", *Financial Management*, 38 (1), pp. 1-37
- Ghosh, A., Cai, F., dan Li, W., (2000), "The Determinants of Capital Structure", *American Business Review*, 18 (2), pp. 129-132
- Gujarati, D., (1995), *Basic Econometrics, Third Edition*, New York: McGraw-Hill, Inc.
- Gurcharan S., (2010), "A Review of Optimal Capital Structure Determinant of Selected ASEAN Countries", *International Research Journal of Finance and Economics*, 47, pp. 30-41
- Hall, G. C., Hutchinson, P. J., dan Michaelas, N., (2004) "Determinants of Capital Structures of European SMEs", *Journal of Business Finance & Accounting*, 31 (5) & (6), June/July, pp. 711-728
- Hrazdil, K., (2010), "S&P 500 Index Inclusion Announcements: Does the S&P Committee Tell Us Something New?", *Managerial Finance*, 36 (5), pp. 368-393
- Helwege, J., dan Liang, N., (1996), "Is There a Pecking Order? Evidence from a Panel of IPO Firms", *Journal of Financial Economics*, 40, pp. 429-458
- Heyman, D., Deloof, M., dan Ooghe, H., (2008), "The Financial Structure of Private Held Belgian Firms", *Small Business Economics*, 30, pp. 301-313
- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H., (1976), "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure", *Journal of Financial Economics*, 3 (4), pp. 305-360

- Kochhar, R., (1996), "Explaining Firm Capital Structure: The Role of Agency Theory vs. Transaction Cost Economics", *Strategic Management Journal*, 17 (9), pp. 713-728
- Krishnan, V S., dan Moyer, R C., (1996), "Determinants of Capital Structure: An Empirical Analysis of Firms in Industrialized Countries", *Managerial Finance*, 22 (2), pp. 39-55
- Lou, X., and Sadka, R., (2011), "Liquidity Level or Liquidity Risk?: Evidence from the Financial Crisis", *Financial Analysts Journal*, 67 (3), pp. 51-62
- McCue, M. J., dan Ozcan, Y. A., (1992), "Determinants of Capital Structure", *Hospital & Health Services Administration*, 37 (3), pp. 333-146
- Modigliani, F., dan Miller, M. H., (1958), "The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment", *American Economic Review*, 48 (3), pp. 261-297
- _____, (1963), "Corporate Income Taxes and the Cost of Capital - A Correction", *American Economic Review*, 53 (3), pp. 433-443
- Miller, M. H., (1977), "Debt and Taxes", *Journal of Finance*, 32 (2), pp. 261-275
- Myers, S. C., (1984), "The Capital Structure Puzzle", *Journal of Finance*, 39 (3), pp. 575-592
- _____, dan Majluf, N. S., (1984), "Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do Not Have", *Journal of Financial Economics*, 13 (2), pp. 187-221
- Odit, M. P, dan Gobardhun, Y. D., (2011), "The Determinants of Financial Leverage of SME's in Mauritius", *The International Business & Economics Research Journal*, 10 (3), pp. 113-125
- Psillaki, M., dan Daskalakis, N., (2009), "Are the Determinants of Capital Structure Country or Firm Specific?", *Small Business Economics*, 33, pp. 319-333
- Ross, S. A., (1977), "The Determination of Financial Structure: the Incentive-Signalling Approach", *Bell Journal of Economics*, 8 (1), 23-40
- Shyam-Sunder, L., dan Myers, S. C., (1999), "Testing Static Tradeoff against Pecking Order Models of Capital Structure", *Journal of Financial Economics* 51, pp. 219-244
- Sogorb-Mira, F., (2005), "How SME Uniqueness Affects Capital Structure: Evidence from a 1994-1998 Spanish Data Panel", *Small Business Economics*, 25 (5), pp. 447-457
- Sutopo, B., (2011), "Determinan Struktur Modal Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", Penelitian tidak dipublikasi. Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.
- Titman, S., dan Wessels, R., (1988), "The Determinants of Capital Structure Choice", *The Journal of Finance*, 43 (1), pp. 1-19
- Uddin, M. H., (2009), "Reexamination of Stock Liquidity Risk with a Relative Measure", *Studies in Economics and Finance*, 26 (1), pp. 24-35.

INDEKS

JURNAL KINERJA, Volume 14, No. 2, Agustus Tahun 2010

No.	Judul	Penulis	Halaman
1	Effects Of Relationship Marketing Upon Nz Micro-Enterprise Internationals Within The Asian Marketplace	Paul Pickering dan Russel P J Kingshott	109-117
2	Service Recovery Strategy and Customer Satisfaction:Evidence From Hotel Industry In Yogyakarta-Indonesia	Budi Suprpto dan Galang Yunanto Hashym	118-130
3	Investor Overconfident Dalam Penilaian Saham: Perspektif Gender Dalam Eksperimen Pasar	Mahatma Kufepaksi	131-150
4	Pengaruh Corporate Governance, Etnis, dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Environmental Disclosure: Studi Empiris Pada Perusahaan Listing di Bursa Efek Indonesia	Djoko Suhardjanto dan Novita Dian Permatasari	151-164
5	Hubungan Kinerja Tugas dan Kinerja Kontekstual Dengan Kepuasan Kerja Komitmen dan Kepribadian	D. Wahyu Ariani	165-181
6	Peran Gender, Pendapatan, dan Pendidikan Terhadap Loyalitas Konsumen yang Berkunjung ke Mall	Tulus Haryono dan Dwi Hastjarjo KB	182-195
7	Polikotomi Pilihan Pengembangan Ekowisata Kawasan Borobudur	Amiluhur Soeroso	196-211

JURNAL KINERJA, Volume 15, No. 1, Maret Tahun 2011

No.	Judul	Penulis	Halaman
1	Illegal Digital Media Usage: Based on Moral Judgment and Legal Awareness	lin Mayasari dan Dikara Barcah	1-14
2	Consumer Attitudes to Purchase Intention of Counterfeiting Bag Product	Santi Budiman dan Anas Hidayat	15-29
3	Restructuring in The Full Service Airline Company: The Case Of Garuda Indonesia	Roberto Akyuwen	30-44
4	Pengaruh Modal Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1983 - 2008: Pendekatan Error Correction Model (ECM)	Y. Sri Susilo dan Lincoln Arsyad	45-63
5	Mengapa Tingkat Pengangguran di Indonesia Tinggi dan Persisten?	D. S. Priyarsono, Djoni Hartono, dan Nilam Anggar Sari	64-72
6	Nlat Konsumen dalam Pembelian Makanan Organik	Heru Irianto dan Budhi Haryanto	73-87
7	Intensitas Pelaporan Keuangan Berbasis Internet dan Berbasis Kertas dalam Pembuatan Keputusan Investasi: Studi Eksperimen dengan Surogasi Mahasiswa Profesi Akuntansi Universitas Syiah Kuala	Yossi Diantimala dan Chairul Raziki	88-102

PEDOMAN PENULISAN

Format Umum:

1. Artikel harus diketik 2 (dua) spasi pada kertas folio (A4) dengan panjang artikel berkisar 20 – 30 halaman. Marjin atas, bawah dan samping harus dibuat paling tidak 3 cm. Pilihan huruf disarankan menggunakan *Times New Roman* ukuran 12. Pengolah kata disarankan menggunakan *MS Words* versi 2003.
2. Halaman *cover* harus menunjukkan judul tulisan, nama penulis, email penulis, institusi serta catatan kaki berupa ucapan terima kasih atau informasi lain yang berkaitan dengan artikel tersebut. Penulis juga wajib menyebutkan biodatanya secara singkat.
3. Halaman pertama dari artikel berisi judul, abstrak dan bagian pendahuluan dari artikel. Untuk memungkinkan *blind review*, penulis tidak boleh mengidentifikasi dirinya baik langsung maupun tidak langsung pada halaman pertama tersebut.
4. Tabel dan gambar harus diberi nomer. Tabel yang berisi data atau informasi dan gambar atau grafik yang dibuat harus dicantumkan sumber atau acuannya.
5. Artikel yang dikirim ke redaksi harus disertai *copy* dalam CD. Artikel termaksud dapat dikirim melalui email: kinerja@mail.uajy.ac.id

Format Artikel:

A. Judul Artikel

Judul artikel terdiri dari 10 – 15 kata.

B. Abstrak (*Abstract*)

Abstrak untuk artikel dalam bahasa Indonesia harus ditulis menggunakan bahasa Inggris dan sebaliknya. Panjang abstrak kurang lebih 100 kata, dan ditempatkan setelah judul artikel.

C. Kata Kunci (*Keywords*)

Setelah abstrak cantumkan 4 (empat) kata kunci yang berkaitan dengan isi artikel.

D. SKEMA PENULISAN

1. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang/dan atau motivasi penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian

2. KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS* (jika ada)

Berisi kajian teoritis dan atau hasil-hasil riset terdahulu yang berkenaan dengan topik penelitian, serta berisi pengembangan hipotesis (jika ada) atau kerangka model penelitian.

3. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, berisi paling tidak berupa populasi atau sampel penelitian, cara pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan alat analisis data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berupa hasil analisis data dan disertai dengan pembahasan serta diskusi.

5. PENUTUP

Pada bagian ini setidaknya berupa simpulan, keterbatasan penelitian, implikasi, dan atau saran.

Referensi

Karya yang diacu harus menggunakan “sistem penulis-tahun” (*Harvard-style*) yang mengacu pada daftar acuan atau daftar referensi. Jika memungkinkan, penulis disarankan juga untuk mencantumkan halaman karya yang diacu.

1. Dalam teks, karya diacu dengan cara menulis *nama akhir/keluarga penulis* dan *tahun* dalam tanda kurung, contoh: untuk satu penulis (Gujarati, 1995), dua penulis (Hansen and Mowen, 2003), lebih dari 2 penulis (Woodman *et al.*, 1993), lebih dari dua sumber yang diacu (Keegan, 1999; Jain, 2000), dua tulisan atau lebih oleh satu penulis (Amabile, 1997; Amabile, 1998).
2. Jika menggunakan halaman, jangan gunakan “*hal*”, “*pp*”, atau “*halaman*”. Tetapi sebelum halaman gunakan tanda titik dua, contoh: (Gujarati, 1995: 55), (Hansen and Mowen, 2003: 96 – 110), (Woodman *et al.*, 1993: 66).
3. Apabila daftar acuan lebih dari satu tulisan oleh penulis yang sama dalam tahun penerbitan yang sama, gunakan akhiran a, b dan seterusnya setelah tahun pada acuan, contoh: (Teoh, 1998a) atau (Teoh, 1998b).
4. Acuan tulisan yang merupakan karya institusional sedapat mungkin harus menggunakan akronim atau singkatan sependek mungkin, contoh (Komite SAK-IAI, PSAK 28, 1997).

E. Daftar Acuan (Daftar Referensi)

Setiap artikel harus mencantumkan daftar acuan yang isinya hanya karya yang diacu. Untuk daftar acuan, gunakan format berikut:

1. Urutkan acuan berdasarkan abjad, sesuai dengan nama akhir/keluarga pengarang atau institusi yang bertanggungjawab atas suatu karya.
2. Gunakan inisial nama depan dari penulis.
3. Judul jurnal tidak boleh disingkat.
4. Kalau lebih dari satu karya oleh penulis yang sama, urutkan secara kronologis waktu terbitan. Dua karya atau lebih dalam satu tahun oleh penulis yang sama dibedakan dengan huruf setelah tahun.

Beberapa contoh penulisan daftar acuan sebagai berikut:

a. Untuk jurnal/majalah ilmiah

Francis, J., E. Maydew and H. Sparks, (1999), “The Role of Big Six Auditors in the Credible Reporting of Accruals”, *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 18 (Fall), pp. 125 – 130.

Morrison, E. W., and Milliken, F. J. (2000), “Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in A Pluralistic World”, *Academy of Management Review*, Vol. 25 (4), pp. 706-725.

b. Untuk buku

Scott, W. R. (2000), *Financial Accounting Theory*, Canada Prentice Hall, 2nd edition.

Greenberg, J., & Baron, R.A., (2000), *Behavior in Organizations*, Tenth Edition, Prentice Hall.

c. Untuk makalah dan karya ilmiah lainnya yang tidak diterbitkan

Puspita, Lisa Martiah Nila, (2000), “Pengaruh Tindakan Supervisi terhadap Kepuasan Kerja Auditor Junior: Melalui Pendekatan Dyadic”, *Thesis S2*. (tidak dipublikasikan).

Abimanyu, A., (1993), “Choice of Self-Generation in the Industrial Firms: A Case Study of Indonesia”, *Dissertation*, University of Pennsylvania, Philadelphia. (unpublished).

d. Untuk jurnal/artikel yang didownload dari internet

Romon. F. (2000), “Contribution of Dividend Policy Stability to the Measurement of Dividend Announcement and Ex-Dividend Effects on the French Market.” *Download* dari www.ssrn.com, Institut d’Administration des Entreprises tanggal 21 Juli 2003.

West, P. and Bernard, B., (2000), “Applying Organizational Learning : Lessons from The Automotive Industry”, *International Journal of Operations and Production Management*, Vol. 20 No. 10 pp. 1236 – 1251, *Download* dari internet www.emerald-library.com. pada tanggal 1 Desember 2000.

F. Catatan Kaki

Catatan kaki tidak digunakan untuk acuan. Catatan kaki tekstual harus digunakan hanya untuk perluasan informasi yang jika dimasukkan dalam teks bisa mengganggu kontinuitas bacaan.